

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN

PALESTINA



SHAHNAZ SYAFIRA ADIRA
INSAN HARAPAN HARAHAP

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENDUKUNG
KEMERDEKAAN PALESTINA**

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta pada Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual.
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 100.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENDUKUNG
KEMERDEKAAN PALESTINA**

PENULIS:

**Shahnaz Syafira Adira
Insan Harapan Harahap**



2025

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA

Jumlah halaman : xv, 235 halaman

Ukuran halaman : 15,5 x 23 cm

ISBN e-book: 978-602-7989-69-6 (PDF)

Penulis:

- Shahnaz Syafira Adira
- Insan Harapan Harahap

Desain Cover:

Nurhakim As'ad Wicaksono

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.**

Siapapun dilarang keras menerjemahkan, mencetak, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Cetakan pertama:

Maret 2025

Diterbitkan oleh:

Universitas Bakrie Press

Penerbit Anggota IKAPI No. 638/Anggota Luar Biasa/DKI/2024



Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Kuningan
Jakarta 12920

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut baik terbitnya buku yang berjudul Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina. Buku ini telah menambah khazanah referensi diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Sebagai mantan pengajar diplomasi di Universitas Bakrie, saya sangat bangga terhadap penulisan dan penerbitan buku hasil kolaborasi dosen dan alumni Prodi Ilmu Politik Universitas Bakrie.

Sebagai mantan diplomat yang saat ini mengabdikan diri di Majelis Ulama Indonesia (MUI), saya melihat diplomasi Indonesia untuk Palestina adalah Diplomasi Total. Diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak hanya sebatas diplomasi antar pemerintah, tetapi juga melibatkan banyak elemen non-pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah penyerangan dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza, umat Islam yang mayoritas penduduk Indonesia sangat terlibat dalam diplomasi publik (melalui media massa, media sosial, dan penerbitan buku), dan diplomasi kemanusiaan (melalui pengumpulan dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza).

MUI yang merupakan tenda besar umat Islam Indonesia, telah mengeluarkan fatwa bahwa membela Palestina yang tertindas hukumnya wajib. MUI sebagai salah satu subyek diplomasi publik juga aktif menyerukan pembelaan kepada Palestina melalui media massa, mengadakan fundraising bersama BAZNAS untuk membantu Palestina, dan mendukung aksi unjuk rasa bela Palestina yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia.

Diplomasi publik dan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh non-pemerintah ini memperkuat diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menyadari hal ini pemerintah Indonesia sering melakukan koordinasi dengan organisasi non-pemerintah, termasuk MUI, terutama dalam kegiatan diplomasi kemanusiaan untuk Palestina. Kementerian Luar Negeri tanggal 26 Februari 2025 ini mengundang MUI bersama puluhan organisasi massa dan organisasi filantropi Indonesia pada acara kick-off Kampanye Bersama Penggalangan Bantuan Kemanusiaan untuk GAZA.

Saya juga berpendapat bahwa buku karya Sdri. Shanaz Syafira Adira dan Sdr. Insan Harapan Harahap ini merupakan bagian dari diplomasi publik yang dilakukan oleh elemen non-pemerintah untuk membela Palestina. Buku ini sangat bermanfaat dan perlu dibaca oleh para diplomat muda dan para mahasiswa yang sedang studi hubungan internasional dan diplomasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2025

Dubes Bunyan Saptomo
Ketua Komisi Luar Negeri MUI

PRAKATA

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan buku *Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina* ini. Buku ini lahir dari rasa kepedulian dan solidaritas terhadap perjuangan panjang rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka. Dalam dinamika dunia yang penuh tantangan, komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina tetap menjadi salah satu wujud nyata dari amanat konstitusi kita dan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah tegas menentang segala bentuk penjajahan. Sikap ini tidak hanya tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas kita sebagai bangsa yang mencintai perdamaian dan keadilan. Kami percaya bahwa perjuangan rakyat Palestina bukan hanya milik mereka, tetapi juga perjuangan bersama umat manusia untuk menghadirkan dunia yang lebih adil dan damai.

Buku ini mengajak Anda untuk memahami lebih dalam bagaimana Indonesia mendukung Palestina melalui diplomasi yang terus berjalan sejak era Presiden Soekarno hingga hari ini. Dalam setiap babnya, kami mencoba menggambarkan upaya Indonesia, baik melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun melalui hubungan bilateral dan kerja sama regional. Harapannya, pembaca dapat melihat bahwa dukungan Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan tindakan nyata yang membawa dampak signifikan.

Pada bagian awal buku ini, kami memaparkan bagaimana sejarah telah membentuk hubungan erat antara Indonesia dan Palestina. Dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia di masa lalu menjadi landasan kuat bagi solidaritas kedua bangsa hingga hari ini. Sejak itu, isu Palestina telah menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda diplomasi Indonesia. Berbagai langkah telah dilakukan, termasuk pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada tahun 1988 dan konsistensi dalam menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan di wilayah Palestina.

Dalam bab-bab selanjutnya, kami menceritakan kiprah Indonesia di berbagai forum internasional. Misalnya, di PBB, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan integritas wilayahnya. Meski sering menghadapi tantangan veto dari negara-negara besar, diplomasi Indonesia tak pernah surut. Di tingkat regional, peran Indonesia dalam ASEAN juga tak kalah penting. Kami berupaya membawa isu Palestina menjadi perhatian kolektif negara-negara Asia Tenggara, sekaligus menguatkan suara solidaritas dari kawasan ini.

Namun, perjuangan ini tidak selalu mudah. Buku ini juga mengulas tantangan yang dihadapi, baik di tingkat internasional maupun domestik. Di panggung global, dominasi kekuatan besar yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah seringkali menghalangi jalan menuju perdamaian yang adil. Sementara di dalam negeri, pergantian pemerintahan dan prioritas politik nasional kadang memengaruhi kontinuitas kebijakan luar negeri kita terhadap Palestina.

Meski demikian, Indonesia tidak pernah menyerah. Kami percaya, setiap tantangan adalah peluang untuk berbuat lebih baik. Dalam buku ini, kami membahas bagaimana diplomasi inovatif dapat menjadi solusi. Kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan Palestina, sekaligus menunjukkan bahwa solidaritas kita tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga aksi nyata yang membawa manfaat bersama.

Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi bacaan informatif, tetapi juga menyentuh hati pembaca. Kami ingin Anda, pembaca yang budiman, merasakan semangat dan kepedulian yang sama terhadap perjuangan rakyat Palestina. Buku ini kami persembahkan untuk Anda yang percaya bahwa dunia yang lebih adil adalah mungkin, asalkan kita semua mau mengambil peran.

Kami menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang dapat membantu menyempurnakan edisi selanjutnya. Kami berharap buku ini menjadi langkah kecil yang berarti dalam mendukung perjuangan Palestina dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk terlibat.

Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Semoga upaya kecil ini menjadi bagian dari perjuangan besar untuk keadilan dan perdamaian dunia.

Jakarta, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Prakata	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Sejarah Konflik Israel Palestina	25
Bab III Dukungan Indonesia Terhadap Palestina	35
3.1 Dukungan Indonesia Terhadap Palestina Sebelum Tahun 2015	35
3.2 Dukungan Indonesia Terhadap Palestina Tahun 2015-2024	37
3.2.1 <i>Public Diplomacy</i>	37
3.2.2 <i>Bilateral Diplomacy</i>	58
3.2.3 <i>Multilateral Diplomacy</i>	105
3.2.4 Analisis Pola Diplomasi Indonesia	186
Bab IV Penutup	189
Daftar Pustaka	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Three types of power</i> oleh Joseph S. Nye, Jr (Nye, 2004: p31)	21
Tabel 3.4 Diplomasi Publik Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina	43
Tabel 3.5 Diplomasi Bilateral Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina	64
Tabel 3.6 Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Rencana Pembagian Wilayah oleh PBB pada 1947	28
Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Korban Warga Palestina di Jalur Gaza	30
Gambar 3. 1 Cuitan Presiden Jokowi dalam Akun Twitter Pribadi	39
Gambar 3. 2 Cuitan Presiden Jokowi dalam Akun Twitter Pribadi	39
Gambar 3. 3 Pernyataan Presiden Jokowi Melalui Laman Resmi Presiden RI	40

DAFTAR SINGKATAN

ACD	Asia Cooperation Dialogue
AICHR	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
AMM	ASEAN Foreign Ministers' Meeting
APA	Asian Parliamentary Assembly
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
APEC AELM	APEC Economic Leaders' Meeting
APSC	ASEAN Political – Security Community
Arab-OIC	Arab-Organisation of Islamic Cooperation
ARF	ASEAN Regional Forum
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASEAN-AS	Association of Southeast Asian Nations- Amerika Serikat
ASEAN-EU	Association of Southeast Asian Nations- European Union
ASEAN-PBB	Association of Southeast Asian Nations- Perserikatan Bangsa-Bangsa
ASEM FMM	Asia Europe Meeting-Foreign Ministers Meeting
Baznas	Badan Amil Zakat Nasional
BKSAP DPR RI	Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
CEAPAD	Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development
CEIRPP	Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People
Delri	Delegasi RI
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EAS	East Asia Summit
ECOSOC	Economic and Social Council
ESS	Emergency Special Session
EU	European Union

FAO	Food and Agriculture Organization
FGD	Focus Group Discussion
FMM	Foreign Ministers Meeting
G77	Group of 77
GCC	Gulf Cooperation Council
GKSB	Grup Kerja Sama Bilateral
GNB	Gerakan non-Blok
HAM	Hak Asasi Manusia
Hon.	The Honourable
HR/VP	High Representative/Vice President
ICC	International Criminal Court
ICJ	International Court of Justice
ICRC	International Committee of the Red Cross
IFRC	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
ILO	International Labour Organization
IPU	Inter-Parliamentary Union
ISORA	International Summit of Religious Authorities
JCBC	Joint Commission on Bilateral Cooperation
JMC	Joint Ministerial Commission
KAA	Konferensi Asia Afrika
KAS	Kerajaan Arab Saudi
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenlu/Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KKT-LB	Konferensi Tingkat Tinggi-Luar Biasa
Komnas HAM RI	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
KTM	Konferensi Tingkat Menteri
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LiFE	Lifestyle for Environment
Menlu	Menteri Luar Negeri
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia
MoU	Memorandum of Understanding
MP	Member of Parliament
MPR RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MU PBB	Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

MUI	Majelis Ulama Indonesia
NAASP	New Asian African Strategic Partnership
NZ	New Zealand
OASE KIM	Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju
OIC	Organisation of Islamic Cooperation
OKI	Organisasi Kerja Sama Islam
OPT	Occupied Palestine Territory
PA	Palestinian Authority
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO	Palestinian Liberation Organization
PM	Prime Minister/Perdana Menteri
PMC	Post-Ministerial Conference
PPTM	Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri
PUIC	Parliamentary Union of the OIC Member States
RI	Republik Indonesia
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
RSI	Rumah Sakit Indonesia
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
Sekjen	Sekretaris Jenderal
SMU PBB	Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa
TDB UNCTAD	Trade and Development Board United Nations Conference on Trade and Development
UE	Uni Eropa
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNGA	United Nations General Assembly
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNOCHA	United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNSC VTC	United Nations Security Council Video Tele- Conference

UUD 1945

Wamenlu

Wapres

Watap

WHO

WWF

Undang-Undang Dasar 1945

Wakil Menteri Luar Negeri

Wakil Presiden

Wakil Tetap

World Health Organization

World Water Forum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Palestina Sebagai Tanah Suci

Palestina dan Israel adalah dua negara yang berseteru bahkan hingga hari ini. Palestina merupakan negara yang berlokasi di benua Asia tepatnya di bagian timur dunia Arab yang mana banyak diketahui sebagai negeri Syam, juga merupakan salah satu bagian dari negeri Syam disamping dengan Lebanon, Suriah, dan Yordania (Gandhi, 2009: p5). Tanah Palestina diketahui sebagai tanah dimana tempat diturunkannya tiga agama samawi (Gandhi, 2009: p1). Sementara Israel terletak di kawasan Timur Tengah di sepanjang Laut Mediterania tenggara pantai (Wirajaya et al., 2020: p46) yang berbatasan dengan Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir, persis dengan posisi Palestina, karena berdasarkan sejarahnya, tanah Israel adalah tanah Kan'an yang kemudian dikenal sebagai Palestina, yang berarti negara Israel didirikan di wilayah Palestina (Satrianingsih & Abidin, 2016: p173-174).

Kekalahan Ottoman membawa Inggris sebagai penguasa baru wilayah yang dipegang Ottoman, yang mana salah satunya adalah Palestina, dengan kata lain Palestina pun menjadi kekuasaan di bawah otoritas Inggris (National Geographic Indonesia, 2024). Kemudian Inggris mendukung pendirian 'rumah nasional' bagi Yahudi di tanah Palestina, yang dinyatakan melalui Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, serta dalam deklarasi tersebut juga menjamin hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi di wilayah tersebut, yang kemudian dalam implementasinya, kebijakan ini justru menjadi akar konflik Arab-Israel yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menyebabkan pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 (Nurdyawati, 2020: p25).

Bersamaan dengan itu, muncullah istilah *British Mandate* untuk Palestina, yang beriringan dengan mandat tersebut Inggris terus menerus memfasilitasi migrasi dalam jumlah besar Yahudi di Eropa ke Palestina yang menyebabkan peningkatan Yahudi di Palestina cukup besar (Nurdyawati, 2020: p28). Titik kontroversialnya adalah ketika naskah direvisi dari '*national home for the Jewish people*' yang tidak memiliki dasar kuat dalam hukum internasional menjadi definisi yang lebih konkret,

yaitu '*the reconstitution of Palestine as a Jewish State*' (Nurdyawati, 2020: p28-29).

Konflik antara Israel dan Palestina menjadi salah satu yang disoroti oleh dunia internasional berupa permasalahan utama terkait hak asasi manusia, meliputi penggunaan kekuatan militer dan perlindungan warga sipil (Nabila et al., 2024: p176). Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan menetapkan kewajiban bagi pihak yang terlibat, namun sering kali dilanggar, menimbulkan kritik internasional (Nabila et al., 2024: p176).

Israel dan Palestina memiliki sejarah yang sangat panjang hingga hari ini. Sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu, pertikaian kedua negara ini sudah dimulai (Gandhi, 2009: p1). Perjalanan panjang kedua negara berseteru, berkonflik, hingga penyelesaian konflik sudah berkali-kali terjadi namun masih belum ada titik terang hingga hari ini. Keduanya memperebutkan satu wilayah yang masing-masing dari mereka, yang mereka anggap merupakan tanah suci bagi agama mereka (Gandhi, 2009: p1). Yerusalem sebagai tanah yang diperebutkan, merupakan tanah dari tiga agama yang mereka anggap suci sehingga ketiganya merasa berhak atas tanah Yerusalem, yang mana ketiga agama itu adalah Islam, Yahudi, dan Kristen (Gandhi, 2009: p1).

Islam mengklaim bahwa Yerusalem sebagai tanah suci mereka dikarenakan kiblat pertama yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW. dan menjadi tanah suci ketiga bagi umat Muslim (Gandhi, 2009: p2). Kristen sendiri mengklaim bahwa Yerusalem sebagai tanah suci mereka dikarenakan dianggap sebagai tempat lahir dan berkembangnya agama Kristen (Gandhi, 2009: p2). Dan yang terakhir, Yahudi mengklaim bahwa Yerusalem sebagai tanah suci mereka dikarenakan menganggap bahwa tanah Yerusalem merupakan tanah yang dijanjikan bagi mereka sebagaimana pada firman tuhan yang mereka percayai (Gandhi, 2009: p2).

1.2 Politik Bebas Aktif Indonesia dalam Mendukung Palestina

Indonesia dalam bernegara menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang mana bebas berarti bebas menentukan sikap terhadap masalah yang ada tanpa harus berpihak pada blok atau persekutuan tertentu, dan aktif berarti Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan di dunia (Haryanto, 2014: p17-18). Dalam

bukunya, Presiden Soekarno menuliskan bahwa politik bebas kita adalah politik yang dinamis, politik bebas yang secara aktif mendekati semua negara dengan tujuan mencapai perdamaian dunia sesuai dengan kepentingan nasional dan Pancasila (Ir. Soekarno, 1965: p101).

Menurut Presiden Soekarno, berpolitik bebas berarti bersikap aktif untuk mencapai kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial (Kristiyanto, 2023: p195). Pemikiran Presiden Soekarno tersebut dirumuskan menjadi tujuan kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif serta anti-kolonialisme-imperialisme (Kristiyanto, 2023: p195). Salah satu pemikiran Presiden Soekarno mengenai politik bebas aktif adalah mewujudkan kepentingan nasional dan kebijakan politik luar negeri harus berprinsip anti-kolonialisme dan anti-imperialisme (Kristiyanto, 2023: p195). Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif membawa Indonesia kepada Gerakan Non-Blok, dimana GNB ini membahas mengenai isu Palestina yang masih diperjuangkan oleh Indonesia dikarenakan Palestina masih menjadi negara yang belum merdeka dan memiliki isu hak asasi manusia, sehingga membuat isu ini terus dibahas dalam pertemuan KTT dari tahun 1970 an hingga saat ini karena dianggap sebagai penjajahan dan harus segera dihapuskan (Sadewa & Hakiki, 2023: p25).

Politik bebas aktif adalah politik yang mendukung kemerdekaan dari imperialisme dan kolonialisme (Kristiyanto, 2023: p196). Prinsip politik luar negeri Presiden Soekarno tersebut menurutnya dapat dicapai dengan menggalang kekuatan global dan membentuk *front* internasional sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan di dunia (Kristiyanto, 2023: p196). Upaya ini menggunakan prinsip kesetaraan kedaulatan bagi semua bangsa, dengan menekankan pada hak asasi manusia dan hak asasi nasional, demi perlindungan diri dan keselamatan umat manusia (Kristiyanto, 2023: p196).

Dalam pidato pembukaan Konferensi Asia-Afrika pada 18 April 1995, Presiden Soekarno menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna tidak dapat dicapai selama masih ada bangsa-bangsa yang belum merdeka (Kusman, 2022: p76). Pengalaman Presiden Soekarno yang secara langsung mengalami penderitaan bangsa yang terjajah menimbulkan semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme (Kristiyanto, 2023: p26). Perubahan kepemimpinan di bawah Soeharto

tidak mengubah prinsip politik luar negeri Indonesia (Haryanto, 2014: p24). Landasan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif masih tetap dipegang teguh dari masa Orde Lama hingga masa Reformasi, dan seiring pergantian masa, politik luar negeri Indonesia menyesuaikan dengan perkembangan internasional (Wijayanti, 2022: p90).

Dalam kuliah umum dengan tema ‘Diplomasi Indonesia untuk Palestina’ yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM pada 3 Juni 2024 yang lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan kita (Indonesia) memiliki kewajiban untuk membela keadilan dan kemanusiaan (Fisipol UGM, 2024). Sikap tersebut sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 ‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’ (Radio Republik Indonesia, 2024b). Hal tersebut juga sesuai dengan yang ditulis oleh Presiden Soekarno dalam bukunya ‘Dibawah Bendera Revolusi’, dimanapun, penjajahan harus dihapuskan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa penjajahan bertentangan dengan kemanusiaan, maka dimanapun terdapat penjajahan, hal itu harus dihapuskan (Ir. Soekarno, 1965: p102).

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut isu ini sebagai penjajahan. Hal tersebut disampaikan melalui Pertemuan GNB pada 26 September 2022 (Kompas.com, 2022). Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno menegaskan “Satu hal yang tidak boleh kita lewatkan adalah komitmen kita untuk Palestina. Membebaskan Palestina dari penjajahan adalah ‘hutang’ kita bersama” (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022c). Selain dalam pertemuan internasional, Menlu Retno juga menyatakan hal yang serupa dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2024 (*The 2024 Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs*) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024a).

Dalam pembukaan pidatonya, Menlu Retno mengatakan hampir selama sepuluh tahun ini, diplomasi Indonesia terus membawa spirit dan prinsip KAA (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024c). Seperti yang diketahui, KAA atau Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi yang diprakarsai oleh Indonesia dengan tujuan memajukan kerja sama antarbangsa, membahas masalah ekonomi, sosial, budaya, mencari solusi

atas penyelesaian masalah kedaulatan nasionalisme dan kolonialisme, serta dari konferensi ini menghasilkan ‘Dasasila Bandung’ atau ‘*The Ten Principles*’ yang mencerminkan prinsip hak asasi manusia, kedaulatan nasional, dan perdamaian dunia (Diskominfo Kota Bandung, 2024).

Lebih lanjut Menlu Retno mengatakan bahwa dengan prinsip KAA inilah yang membuat Indonesia konsisten memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel, dan Indonesia memilih untuk berada di pihak yang benar dalam sejarah untuk membela kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024c). Bahkan dalam salah satu wawancara dengan media Medcom.id, Menlu Retno menegaskan bahwa isu ini adalah isu terkait penjajahan bukan isu terkait agama (Medcom.id, 2024). Pada tahun 2016, KTT-LB OKI ke-5 dilaksanakan di Jakarta dan menghasilkan sebuah Deklarasi Jakarta yang berisikan 23 butir komitmen OKI, dimana butir-butir komitmen tersebut merupakan gagasan dari Indonesia yang bercermin dan sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016h).

Sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, terlihat bahwa Indonesia sudah mendukung Palestina sejak lama. Perjuangan Presiden Soekarno dalam menentang kolonialisme dan imperialisme yang ditulisnya dalam bukunya (Ir. Soekarno, 1965: p313) terapkan melalui KAA dan GNB, dimana Indonesia turut serta dalam berbagai inisiatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia (Kristiyanto, 2023: p28). Konferensi Asia-Afrika atau KAA adalah bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan membebaskan negara-negara di dunia dari penjajahan (Haryanto, 2014: p24). Dalam KAA, melalui komunikasi politik tentang pembebasan dan kemerdekaan Palestina serta negara lainnya, serta menegaskan sikapnya yang anti kolonialisme dan imperialisme (Kristiyanto, 2023: p153). Sementara Gerakan Non-Blok atau GNB adalah gerakan dengan kekuatan moral yang memiliki cakupan luas dan mempengaruhi isu-isu geopolitik global yang salah satunya meliputi mendorong kemerdekaan Palestina (Kristiyanto, 2023: p191).

Secara ideologis, GNB dengan tegas dan konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme yang masih mengekang negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Kristiyanto, 2023: p191). Menurut Presiden Soekarno, berbagai ketegangan dan konflik di dunia terjadi

disebabkan karena penjajahan, dan oleh karena itu Presiden Soekarno selalu menekankan pentingnya persatuan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mencapai dunia yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme (Kristiyanto, 2023: p64). Kekonsistenan Presiden Soekarno dalam melawan penjajahan terlihat dari dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Kashmir dan Pakistan, Aljazair, negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan saat itu, termasuk juga Palestina yang tengah berjuang membebaskan diri dari penjajahan (Kristiyanto, 2023: p64).

Indonesia dan Palestina adalah kedua negara yang saling mengakui kemerdekaan kedua belah negara. Diawali dengan Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia satu tahun sebelum proklamasi Indonesia dikumandangkan, yakni pada tahun 1944, kemudian disusul pada tahun 1989, Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Aljazair dan Indonesia termasuk dalam negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina, n.d.-a).

Bagaimana Indonesia bisa mengakui kemerdekaan Palestina, di mana pada awalnya sesuai pada arsip Sekretariat Negara Surat Presiden Soeharto, pada tanggal 27 Agustus 1977, Ketua Dewan Eksekutif PLO atau Panglima Tertinggi Revolusi Palestina Yasser Arafat, mengirimkan surat yang berisi permohonan untuk dukungan dan validasi pendirian negara Palestina yang merdeka, yang kemudian surat tersebut ditanggapi oleh Presiden Soeharto dengan menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan Palestina dalam melawan Israel (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023: p17). Setelah Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina pada 1988, secara lebih lanjut dilakukan penandatanganan “Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik” antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi, yang mana ditandai pula atas pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina, n.d.-a).

Hubungan antara Indonesia dan Palestina meluas dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu Yang Berasal dari Wilayah Palestina (*Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories*), yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018a).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018, Perjanjian Kerja Sama Internasional Indonesia-Palestina bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan persaudaraan antara Republik Indonesia dengan Palestina, serta diperlukannya perkuatan kolaborasi perdagangan kedua belah entitas (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018a). Selain itu, dengan menghapuskan pungutan pajak impor atau tarif bea masuk atas barang-barang tertentu dari Palestina, Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan kehidupan sosial dan kemandirian ekonomi Palestina (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018a).

Pada tanggal 24 Mei 2022, berlokasi di KBRI Amman, Yordania, Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Palestina, menyelenggarakan pertemuan dengan Konsul Kehormatan Palestina Untuk Indonesia, Maha Abu Shuseh, dipimpin oleh Ketua GKSB Syahrul Aidi Maazat (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022). Ketua GKSB itu mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina memiliki hubungan baik sejak lama, sampai pada bidang ekonomi dan perdagangan dimana Indonesia secara resmi memberlakukan tarif impor nol untuk kurma, zaitun, dan barang-barang lainnya (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022). Dinyatakan pula oleh Ketua GKSB tersebut bahwa DPR RI akan selalu mendukung serta menyuarakan kemerdekaan Palestina di organisasi maupun forum-forum internasional (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022). Sebagai tanggapan pertemuan tersebut, Konsul Kehormatan Palestina Untuk Indonesia Maha Abu Shuseh mengapresiasi terhadap berbagai cara dan upaya Parlemen Indonesia dalam berdiplomasi untuk mendukung Palestina (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022).

Dalam laman resmi Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral Indonesia dan Palestina di Istana Kepresidenan Bogor pada 24 Oktober 2024 (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2022). Dalam pertemuan itu, kedua negara menunjukkan lambang persahabatannya dengan penanaman pohon meranti di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor (tvOneNews, 2022). Dalam keterangan pers yang dipublikasikan melalui laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang bersahabat dekat, dan Indonesia akan selalu mendukung perjuangan Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Terdapat tiga poin pembahasan dalam pertemuan yang membahas hubungan bilateral ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada keterangan pers tersebut, yang pertama adalah usaha penyelesaian masalah Palestina, dan menyatakan bahwa Indonesia siap untuk memfasilitasi rekonsiliasi di Palestina, serta mendukung Palestina untuk duduk menjadi bagian anggota penuh di PBB (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Yang kedua, disampaikan bahwa kerja sama ekonomi yang terjadi antara dua negara, dimana perdagangan antara keduanya terus meningkat pada Januari hingga Juli 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Bentuk dukungan yang telah diberikan Indonesia terhadap Palestina yakni soal pemberian fasilitas unilateral dimana membebaskan bea masuk untuk kurma dan zaitun yang masuk ke Indonesia dari Palestina, dan Presiden Jokowi juga berharap kerja sama ekonomi kedua negara ini dapat ditingkatkan di masa depan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022). Kemudian poin yang ketiga dikatakan oleh Presiden Jokowi mengenai komitmen Indonesia dalam memberikan bantuan kepada Palestina, dibuktikan dengan penandatanganan MoU bantuan hibah kepada Palestina yang ditandatangani beberapa waktu lalu, bantuan yang disalurkan melalui UNRWA dan ICRC, serta membangun rumah sakit Indonesia di Hebron, Palestina yang sedang dalam proses pembangunan (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022).

Indonesia tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga bantuan pengembangan kapasitas atau *capacity building* yang mana pada hari pertemuan itu disepakati dan ditandatangani MoU untuk membangun kapasitas untuk mendukung otoritas kesehatan dan makanan independen

di Palestina (Portal Informasi Indonesia, 2022). Sebagai penutup, Presiden Jokowi menekankan secara tegas komitmen dari Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Hubungan yang baik antara Indonesia dan Palestina selain didekatkan karena saling mendukung kemerdekaan satu sama lain, yakni karena Indonesia juga pernah merasakan dijajah dalam jangka waktu yang lama, sehingga Indonesia dan rakyat Indonesia tersadarkan akan jiwa kemanusiaannya untuk memberikan dukungan kepada Palestina (Radio Republik Indonesia, 2023a). Berdasarkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ada beberapa alasan mengapa Indonesia berhubungan baik dengan Palestina bahkan mendukung Palestina sepenuhnya, yang pertama dikatakan karena Indonesia pernah merasakan dijajah sama seperti yang dirasakan Palestina sekarang, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kesatu, bahwa Palestina berhak atas kemerdekaannya dan oleh sebab itu maka penjajahan di tanah Palestina harus dihentikan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017). Hal ini berarti Indonesia memandang bahwa isu Palestina pada dasarnya adalah isu dekolonisasi, dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menentang kolonialisme (Muhamad, 2014: p70).

Alasan kedua yang dijelaskan Menteri Agama, karena kereligiusan bangsa Indonesia, dimana tidak ada pembenaran atas penjajahan dalam agama manapun (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017). Di Yerusalem, terdapat Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid yang kedudukannya hampir sama dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahkan Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat sebelum Masjidil Haram, itulah mengapa Indonesia yang notabenehnya mayoritas berpenduduk muslim memiliki kaitan erat dengan Yerusalem (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017). Disampaikan pula oleh Menag dalam forum yang bertema 'Indonesia Bersama Palestina' bahwa masalah Israel-Palestina ini bukan lagi masalah agama tetapi masalah kemanusiaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Konflik adalah hal yang tidak mustahil di dunia internasional. Telah banyak konflik yang terjadi di dunia internasional. Konflik di dunia

internasional biasanya melibatkan dua negara, atau bahkan beberapa negara. Ada pula beberapa konflik yang memang belum terselesaikan hingga hari ini. Peran PBB sebagai organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan Israel-Palestina, dinilai kurang efektif meskipun berbagai negara telah mendesak resolusi gencatan senjata (Databoks, 2023). Konflik sendiri diartikan sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan seperti kekuasaan dan status (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, n.d.). Fisher, mengartikan konflik sebagai dua atau lebih individu maupun kelompok yang merasa bahwa kepentingan mereka tidak sesuai atau tidak sejalan (Ismail, 2011).

Dalam buku 'Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi', konflik diartikan pula sebagai adanya dua atau lebih individu atau negara yang berseteru disebabkan oleh perbedaan kepentingan (Ashari, 2020: p116). Konflik laten adalah jenis konflik lain yang memiliki karakter tidak terlihat dan tidak sepenuhnya terselesaikan, sehingga memungkinkan untuk muncul kembali (Ashari, 2020: p116). Dalam kerangka hubungan internasional, ada tiga jenis konflik, yaitu konflik antarnegara, konflik konflik internal, dan konflik yang mengarah kepada pembentukan negara baru (Ashari, 2020: p116). Salah satu perhatian utama hubungan internasional adalah konflik antarnegara, dan komunitas internasional telah lama memperhatikan langkah-langkah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik semacam ini (Ashari, 2020: p116).

Saat ini, konflik internal di suatu negara mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat internasional karena dampaknya yang signifikan terhadap penduduk negara tempat terjadinya perang serta negara-negara tetangganya (Ashari, 2020: p116). Meskipun konflik internal adalah masalah domestik, ada konsensus yang berkembang bahwa komunitas internasional harus terlibat dalam penyelesaiannya (Ashari, 2020: p116). Komunitas internasional dapat terlibat dalam resolusi konflik internasional melalui mediasi atau intervensi, dimana strategi ini juga sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang mengakibatkan konflik yang mengarah ke pembentukan negara baru (Ashari, 2020: p116). Rusdiyanta dalam bukunya mengklasifikasikan konflik Arab-Israel ini sebagai konflik kepentingan berupa sengketa perbatasan antarnegara (Rusdiyanta, 2022: p268). Garis gencatan senjata tahun 1948 yang muncul dari perang kemerdekaan Israel diperluas dalam perang tahun 1967, setelah itu Israel

mengembalikan Semenanjung Sinai ke Mesir namun tetap menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan (Rusdiyanta, 2022: p268).

Para pembela HAM internasional dengan tegas menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah kejahatan perang (Yuliantiningsih, 2009: p110). PBB juga telah mengakui bahwa Israel berulang kali melanggar hukum perang dan memusnahkan warga Palestina (Reuters, 2024). Perang sendiri diartikan sebagai konflik antara dua kelompok atau lebih, dan kelompok yang dimaksudkan disini adalah negara, dimana berarti perang antarnegara yang terjadi dikarenakan akan perebutan wilayah ataupun sumber daya (Heywood, 2016: p438). Dalam kasus Israel dan Palestina, perang terjadi di antara kedua negara tersebut atas dasar perebutan wilayah. Kedua negara merasa berhak atas wilayah yang tengah diperebutkan, sehingga memicu konflik yang berakhir pada perang. Hal yang unik dari sifat perang, yakni karena hal tersebut berasal dari kondisi historis yang khas (Heywood, 2016: p441).

Sejarah panjang bahkan sejak 5000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga saat ini. Thucydides, seorang sejarawan Yunani berpendapat bahwa ambisi dan ketamakan mengarah pada kehausan dan kekuasaan, yang pada akhirnya menghasilkan perang (Heywood, 2016: p441). Karena keinginan dan hasrat manusia tidak terbatas dan tidak pernah ada sumber daya yang cukup untuk memenuhinya, perang akan selalu ada (Heywood, 2016: p441). Konflik dan persaingan yang ditimbulkannya juga akan selalu menghasilkan kekerasan dan pertumpahan darah (Heywood, 2016: p441). Definisi perang lainnya datang dari Carl von Clausewitz dalam bukunya yang berjudul "On War", dimana ia menuliskan bahwa perang adalah sebuah tindakan kekuatan untuk memaksa musuh kita untuk melakukan kehendak kita (Clausewitz, 1976). Lebih lanjut, dikatakan bahwa tujuan sebenarnya dari perang adalah untuk mengamankan objek, kita harus membuat musuh tidak berdaya (Clausewitz, 1976).

Awal mula permasalahan yang diketahui secara umum adalah dikarenakan oleh Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada Pemimpin Komunis Yahudi di Inggris yang berisikan mengenai dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi di tanah Palestina (Hindun, 2018). Deklarasi Balfour sendiri diambil dari nama sang penulis surat

yakni Arthur James Balfour, dan Deklarasi Balfour juga menjadi unsur pokok mandat Palestina kepada Inggris untuk menentukan wilayah Israel dan Palestina (Kaslam, 2021). Latar belakang dari Deklarasi Balfour sendiri ini adalah awalnya seorang Yahudi Inggris yang membuatkan formula senjata yang mengarahkan pada kemenangan atas peperangan, dan karena hal tersebut, seorang Yahudi yang bernama Chaim Weizmann tersebut diberikan hadiah dari Perdana Menteri Inggris David Lloyd George, ia meminta sebuah wilayah untuk Yahudi tepatnya di Palestina (Nurjannah & Fakhruddin, 2019).

Setelah Deklarasi Balfour tersebut, PBB mengusulkan pembentukan negara untuk Arab dan negara untuk Yahudi di tanah Palestina pada 1947 yang mana usulan tersebut ditolak oleh Arab (Heywood, 2016: p372). Kemudian antara tahun 1948 hingga 1982 terjadi beberapa peperangan dan perundingan, hingga terjadinya intifada pertama pada 1987 hingga 1993, aksi pemberontakan Palestina terhadap pendudukan di West Bank dan Gaza Strip, serta pendeklarasian kemerdekaan Palestina tahun 1988 (Heywood, 2016: p372). Hingga terjadi kembali intifada kedua pada tahun 2000 hingga 2005, dan puncaknya pada 2007 dimana negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas gagal yang menyebabkan Israel menginvasi Jalur Gaza dengan skala penuh (Heywood, 2016: p372).

Pokok masalah yang hingga hari ini masih berlangsung adalah mengenai perebutan wilayah. Hingga hari ini, konflik Israel dan Palestina masih berlangsung, dengan keadaan Israel menyerang Gaza dan menutup seluruh akses ke Gaza (Indonesiadefense.com, 2024). Apa yang dilakukan Israel ke Palestina hari ini sudah bukan disebut perang, bahkan lebih ke arah genosida (Anadolu Ajansi, 2024). Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara yang mendukung Palestina untuk menghentikan konflik ini, seperti 153 negara yang menuntut Resolusi Majelis Umum PBB agar segera dilakukannya gencatan senjata kemanusiaan di Gaza (Roza, 2024). PBB bahkan tidak bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina, hingga Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Craig Mokhiber mengundurkan diri dari posisinya karena menganggap PBB sebagai organisasi dunia tidak bisa menyelesaikan masalah genosida yang terjadi (CNN Indonesia, 2023).

Upaya mediasi dan negosiasi internasional dalam konflik kedua negara ini terus dilakukan untuk mencari solusi politis yang membawa kedamaian dan kestabilan di wilayah tersebut (Nabila et al., 2024: p176). *Two state solution* merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik kedua negara ini. Pertama kali dicetuskan pada akhir tahun 1936 dengan pembentukan Komisi Kerajaan yang dipimpin oleh William Peel (Wibowo, 2020: p303). Komisi Peel kemudian sampai pada kesimpulan bahwa bangkitnya nasionalisme Palestina, ketidakpercayaan Arab Palestina terhadap Pemerintah Mandat Inggris, serta ketakutan akan ambisi Yahudi untuk mendirikan “*Jewish National Homeland*” (Wibowo, 2020: p303).

Komisi Peel kemudian pada bulan Juli 1937 memberikan saran untuk membagi dua wilayah untuk kedua belah pihak, yakni satu untuk Yahudi satu untuk Arab Palestina di samping zona internasional, dimana wilayah yang membentang dari Yerusalem hingga Jaffa akan tetap berada di bawah otoritas Inggris (Ministry of Foreign Affairs of Israel, n.d.-b). Dalam dokumen Laporan Komisi Peel yang diperoleh dari laman Jewish Virtual Library, pada Chapter XXII tertulis bahwa dalam perjanjian ini akan didirikan dua negara, dengan negara Arab Palestina yang terdiri dari Trans-Yordania yang bersatu dengan bagian Palestina yang terletak di sebelah timur dan selatan, dan negara Yahudi yang terdiri dari bagian Palestina yang terletak di sebelah utara dan barat perbatasan itu (Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty, 1937). Lebih tepatnya, Yahudi direkomendasikan untuk menempati wilayah pesisir yang membentang dari Gunung Karmel hingga selatan Be'er Tuvia, serta Lembah Yizreel dan Galilea, sedangkan Arab Palestina akan menempati wilayah perbukitan, Yudea dan Samaria, dan Negev, serta menyatukan dengan Trans-Yordania. Rencana ini ditanggguhkan karena ditolak oleh Palestina, akan tetapi dibangkitkan dan diadopsi oleh PBB pada tahun 1947 (Jewish Virtual Library, n.d.-b). Pada tahun 1947, PBB yang baru dibentuk menyetujui keputusan Inggris satu dekade yang lalu, bahwa pemisahan adalah satu-satunya solusi untuk masalah Palestina (Catherwood, 2006: p192). Presiden Joko Widodo menegaskan mengenai *two state solution* ini sebagai jalan menuju perdamaian yang adil, yang mana disampaikan dalam KTT ke-6 ASEAN-AS di Singapura (Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, 2018).

Setelah Komisi Peel, terdapat beberapa upaya lainnya seperti Perundingan David Camp, Perjanjian Oslo, Perjanjian Kairo, Kesepakatan Hebron, Wye River Agreement, Sharm el-Sheikh, serta Road Map atau Konsep Peta Jalan Damai. Perundingan David Camp dan Perjanjian Oslo dilakukan dua kali yakni Perundingan David Camp I pada tahun 1979 dan Perundingan David Camp II pada tahun 2000, sedangkan Perjanjian Oslo I pada tahun 1993 dan Perjanjian Oslo II pada tahun 1995 (Masyrofah, 2015: p82).

Perundingan David Camp bukanlah penyelesaian antara Israel dan Palestina, melainkan antara Israel dan Mesir yang dirundingkan pada September 1978 (Encyclopedia Britannica, 2024a). Mesir sempat mengambil alih Jalur Gaza di sepanjang Laut Tengah, dan pada Perang Enam Hari di Juni 1967, Israel menduduki Semenanjung Sinai di Mesir (Encyclopedia Britannica, 2024a). Kemudian dengan inisiasi Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Charter, mengundang Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin ke tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat di Maryland untuk berunding yang menghabiskan waktu selama 12 hari (U.S. Embassy in Israel, 2018).

Hasil dari pembicaraan ini, "*Framework for Peace in the Middle East*", memiliki tiga bagian yang mana bagian pertama yaitu proses untuk *self-government* atau pemerintahan sendiri Palestina di West Bank dan Gaza (Encyclopedia Britannica, 2024a). Sayangnya, perundingan tersebut gagal karena perwakilan Palestina menolak untuk berpartisipasi (Office of the Historian - U.S. Department of State, n.d.-a). Akan tetapi, dokumen pertama Perjanjian Camp David ini membuka jalan pada Perjanjian Oslo di tahun 1993 antara Israel dan Palestina (United States Institute of Peace, 2019). Kemudian pada 1991, digelar konferensi perdamaian yang dihadiri oleh Israel, Mesir, Suriah, Lebanon, serta Yordania dan delegasi Palestina yang bergabung dengan Yordania, yang disebut dengan konferensi Madrid (Fuhaidah, 2012). Palestina bergabung dengan Yordania karena Israel meminta hal tersebut, bahkan meminta untuk tidak ada delegasi yang berasal dari Yerusalem (Rodriguez, 2011). Konferensi ini diketuai oleh Presiden Amerika George W. Bush dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada Oktober 1991, menjadikan pertama kalinya dalam sejarah semua pihak yang terlibat dalam konflik Arab-Israel berkumpul untuk berunding secara langsung (Office of the Historian - U.S. Department of State, n.d.-b). Sayangnya, ada beberapa alasan mengapa potensi yang

dibentuk melalui Konferensi Madrid gagal dimanfaatkan secara maksimal (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2021).

Upaya penyelesaian selanjutnya yaitu Oslo Accord atau Perjanjian Oslo yang disepakati di White House dengan Presiden Bill Clinton sebagai penengah untuk mencapai kesepakatan (Office of the Historian - U.S. Department of State, n.d.-c). Perjanjian Oslo ini terjadi secara rahasia antara Pimpinan PLO Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, tidak diketahui oleh pihak lain selain pihak yang terlibat pada saat itu (Mohd Nor & Hamzah, 2015). Perjanjian Oslo I ini antara lain menyepakati untuk menghentikan konflik dan memungkinkan untuk saling mengakui entitas kedua pihak (Zainal, 2022: p125). Saat Perjanjian Oslo tengah berlangsung, kedua pihak tetap melakukan penyerangan, seperti Yahudi yang membantai warga Palestina dan Palestina yang membalas serangan dengan intifada (Badjohah et al., 2021: p411). Perjanjian Oslo II, sebagai lanjutan dari Perjanjian Oslo I diratifikasi pada 1995 di Taba, Mesir dan masih dengan usaha mediasi dari Amerika Serikat (Silpiah et al., 2022: p30-31). Menurut Perjanjian Oslo II, Tepi Barat akan dibagi tiga zona menjadi area A, B, dan C (Mousavi, 2019: p83). Perjanjian ini juga tidak berhasil menyelesaikan konflik dikarenakan Israel melanggar dengan melanjutkan pembangunan pemukiman ilegal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat (Soleimani, 2020).

Perjanjian perdamaian selanjutnya adalah Perjanjian Kairo, yang ditandatangani antara Israel dan PLO pada tanggal 4 Mei 1994 di Kairo, yang mana berisi untuk mengatur pembentukan entitas pertama Palestinian Authority (PA) yang otonom, serta menyatakan bahwa Israel akan memiliki otoritas penuh atas keamanan eksternal (Ministry of Foreign Affairs of Israel, n.d.-a). Pada pembukaan yang tertulis dalam dokumen perjanjian, perjanjian tersebut menegaskan kembali bertekad untuk hidup berdampingan dengan damai dan mencapai penyelesaian perdamaian yang adil (United Nations Peacemaker, 1994). Pada saat hari penandatanganan, Yasser Arafat pada awalnya menandatangani dahulu tapi tidak menandatangani peta yang dilampirkan dalam perjanjian (Israel State Archives, n.d.). Kemudian Perjanjian Hebron yang mana disahkan pada bulan Januari 1997 tetapi sebenarnya ditandatangani pada bulan September 1995 sebagai bagian dari Perjanjian Oslo II (Said, 1997). Dalam kesepakatan itu, Israel wajib menarik pasukannya dari pedesaan Tepi Barat dalam tiga tahap dari Maret hingga Agustus 1998 (Paat, 2013).

Selanjutnya pada 23 Oktober 1998, Perjanjian Wye River yang melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Pemimpin Palestina Yasser Arafat, dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang menghasilkan Israel memberikan sebagian kontrol atas Palestina, Israel membatasi pemukiman Yahudi di Tepi Barat, dan pembebasan 750 warga Palestina yang ditahan (Masyrofah & Nahrowi, 2019: p100). Perjanjian ini berisi Israel untuk mundur dan memungkinkan Palestina untuk menerapkan beberapa poin perjanjian Oslo (Nasution, 2010: p117). Perundingan pun berlanjut dengan Perjanjian Sharm el-Sheikh yang ditandatangani Ehud Barak pada tahun 1999, melibatkan negosiasi semua klausul pada Perjanjian Wye River (Mohd Nor & Hamzah, 2015: p64).

Negara sebagai entitas yang berdaulat dianggap merupakan aktor utama dalam dunia internasional (Susilo, 2016: p49). Di abad ini, abad kedua puluh satu, pengakuan suatu negara sangat dicari-cari dan digandrungi dibandingkan sebelumnya (Heywood, 2016: p205). Pada 1945, PBB mengakui 50 negara, dan pada tahun 2013, PBB mengakui 193 negara, dengan Palestina sebagai salah satu dari beberapa negara yang masih menunggu pengakuan dari PBB (Heywood, 2016: p205). Untuk terbentuknya suatu negara, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seorang pakar Ilmu Negara Oppenheim Lauterpacht, mengatakan bahwa unsur-unsur negara terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan (Muhtada & Diniyanto, 2018: p31). Sedangkan unsur-unsur atau syarat-syarat pembentukan negara juga didasarkan pada pasal satu *The 1993 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* ada empat, yaitu: “*The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.*”

Dalam hal ini, Palestina telah memenuhi keempat syarat yang didasarkan pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993. Dilansir melalui situs *website* Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Palestina memiliki 4.295 juta jiwa pada 2016 (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina, n.d.-b). Hal tersebut membuktikan bahwa Palestina memenuhi syarat ‘rakyat’. Palestina mempunyai wilayah tetap dengan ibukota Yerusalem yang mana memenuhi syarat ‘wilayah’, walaupun wilayah Palestina diperebutkan oleh Israel. Palestina memiliki pemerintahan dengan Kepala Negara

Mahmoud Abbas dan Kepala Pemerintahan PM Rami Hamdallah, hal itu menunjukkan bahwa Palestina memenuhi syarat ‘pemerintahan’ (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina, n.d.-b). Kemudian dalam syarat ‘kemampuan untuk memiliki hubungan dengan negara lain’ bisa dibuktikan dengan diakuinya Palestina sebagai negara oleh negara lain secara *de jure*.

Jauh sebelum saat ini, Israel menguasai sebagian besar wilayah Palestina akibat imbas dari perang tahun 1948 (Wibowo, 2020: p309). Kemudian Yordania menduduki wilayah Palestina yang tersisa, seperti Tepi Barat, dan Mesir mengambil Jalur Gaza (Catherwood, 2006: p194). Pada September 1948, Mesir mengusulkan pembentukan pemerintahan Palestina di tanah yang saat itu diduduki oleh tentara Mesir dan Yordania (Dawisha, 2016: p130). Pada tanggal 23 September 1948, Mesir mendirikan ‘Pemerintah Seluruh Palestina’ atau ‘*All Palestine Government*’ di Jalur Gaza (Wibowo, 2020: p309). Liga Arab secara sederhana menyatakan keputusan untuk mengubah administrasi sipil Palestina menjadi pemerintahan Palestina, dan Arab High Committee dengan tegas menyatakan bahwa ‘penduduk Palestina, berdasarkan hak alami mereka untuk menentukan nasib sendiri dan sesuai dengan resolusi Liga Arab, telah memutuskan untuk mendeklarasikan Palestina secara keseluruhan sebagai negara merdeka di bawah pemerintahan yang dikenal sebagai Pemerintah Seluruh Palestina yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi’ (Shlaim, 1990: p42). Kala itu, Hajj Amin al-Husayni terpilih sebagai Presiden Dewan, Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota, dan deklarasi kemerdekaan ditandatangani oleh para delegasi dan diumumkan kepada pers (Shlaim, 1990: p43). Meskipun begitu, negara ini tampak aneh karena mengklaim yurisdiksi atas seluruh Palestina, tetapi secara *de facto* hanya memiliki kekuasaan di Jalur Gaza (Wibowo, 2020: p309). Pemerintahan ini juga tidak memiliki layanan sipil, uang, dan tantara, bahkan bergantung pada Mesir (Shlaim, 1990: p43).

Indonesia memiliki kesempatan untuk memproyeksikan citra sebagai negara yang secara konsisten menjunjung tinggi gagasan perdamaian dunia, dengan adanya gejolak politik di Timur Tengah khususnya isu Israel-Palestina (Satriis, 2019). Donald Trump menunjuk Indonesia sebagai mediator terutama antara Palestina dan Israel, tidak lama setelah Jerusalem

diakui oleh Presiden Amerika Serikat tersebut sebagai ibukota Israel (CNN Indonesia, 2024).

Dalam Resolusi 242, PBB meminta Israel untuk kembali ke batas sebelum tahun 1967, yang ditolak Israel kemudian menganeksasi bagian Yerusalem yang sebelumnya milik Yordania (Catherwood, 2006: p207). Di pihak Arab, tidak ada negara yang setuju untuk bernegosiasi dengan negara Yahudi yang keberadaannya terus mereka tolak (Catherwood, 2006: p207). Akhir-akhir ini, dilansir dari CNN yang dikutip dari Al Jazeera, sebagai respon internasional, Afrika Selatan melayangkan gugatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) setelah segala perlakuan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina, dengan gugatan Israel atas dugaan genosida terhadap Palestina di Jalur Gaza (CNN Indonesia, 2024). Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang mendukung Palestina dalam kemerdekaannya, dibuktikan dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa yang menyatakan dukungannya di berbagai kesempatan atas kemerdekaan Palestina serta mengancam tindakan agresi Israel ke Palestina di berbagai kesempatan (CNN Indonesia, 2024). Afrika Selatan mendukung Palestina karena Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) saling mendukung satu sama lain, serta Palestina pernah menunjukkan empatinya ketika Afrika Selatan di bawah apartheid (CNN Indonesia, 2024). Lebih lanjut, melihat Hak Asasi Manusia dilanggar oleh Israel, mereka merasa perlu untuk bertindak (CNN Indonesia, 2024). Afrika Selatan merasa Israel melakukan pelanggaran yang berdasar atas Konvensi Jenewa 1948 tentang pencegahan dan hukuman genosida (CNN Indonesia, 2024).

Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia turut serta aktif dalam usaha penyelesaian-penyelesaian masalah HAM yang ada, termasuk persoalan di Palestina (BBC News Indonesia, 2023a). Isu yang terjadi di Palestina merupakan agenda tetap di Dewan HAM PBB, yaitu *Agenda item 7: Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Territories* (BBC News Indonesia, 2023a). Indonesia ingin menekankan mengenai konflik Palestina walaupun agak tertutup dengan konflik-konflik baru (BBC News Indonesia, 2023a). Dewan HAM PBB atau United Nations Human Rights Council adalah badan *intergovernmental* dengan 47 negara anggota dibawah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk

mempromosikan dan membela semua Hak Asasi Manusia secara global (United Nations Human Rights Council, n.d.). Dewan ini dapat membahas semua isu-isu Hak Asasi Manusia yang relevan sepanjang tahun dan situasi yang perlu ditangani (United Nations Human Rights Council, n.d.).

Berdasarkan dokumen yang bersumber dari *Genocide Convention Fact Sheet* yang dilansir dari laman UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, genosida adalah kejahatan yang dapat terjadi di masa perang maupun di masa damai. Definisi yang tercantum dalam Pasal II Konvensi menjelaskan genosida sebagai kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan suatu kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok ras, kelompok agama, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Definisi ini merupakan hasil dari proses negosiasi dan merefleksikan kompromi yang tercapai di antara negara-negara anggota PBB ketika merancang konvensi di tahun 1948 (United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, 2023).

Dari berbagai bidang studi termasuk Hubungan Internasional, pasti memiliki teori-teori atau paradigma dasar. Teori-teori ini menyediakan kerangka kerja yang membantu kita menyederhanakan kenyataan, sehingga kita bisa lebih mudah mengatasi kerumitan yang ada di dunia. Teori adalah seperangkat proposisi atau gagasan yang membantu kita untuk menyederhanakan realitas yang kompleks, sehingga kita dapat mendeskripsikan peristiwa yang telah terjadi (*to describe*), menjelaskan alasan dibalik terjadinya peristiwa tersebut (*to explain*), dan memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan (*to predict*) (Kaufman, 2022: p34).

Negara-negara akan memiliki kepentingan satu sama lain ketika mereka saling mengenal dan ketika mereka saling berbagi pengetahuan (Erbas, 2022: p5088). Para ahli konstruktivisme mengakui bahwa dunia material ada secara independen, namun mereka juga menyatakan bahwa melalui kebijakan luar negeri, negara-negara berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain, sehingga membentuk identitas mereka (Erbas, 2022: p5087). Para ahli juga menyatakan bahwa konstruktivisme dalam kebijakan luar negeri menekankan pentingnya norma dan ide yang terkait dengan identitas nasional, dan dalam konteks kebijakan luar negeri, norma dan ide tersebut dianggap sebagai identitas nasional, sehingga identitas nasional dapat dipahami sebagai pandangan dasar dunia yang dikombinasikan

dengan ide dan nilai-nilai yang diwakili oleh bangsa tersebut (Erbas, 2022: p5087). Untuk menganalisis kebijakan luar negeri dan hubungan internasional antar negara, pendekatan konstruktivis penting karena pendekatan ini berhubungan dengan identitas, identitas negara, identitas nasional, kepentingan nasional, dan merupakan alat damai untuk mempelajari kebijakan luar negeri serta hubungan internasional (Erbas, 2022: p5088).

Konstruktivis berbicara mengenai ide dan nilai yang dianut memiliki pengaruh terhadap tindakan sosial dan politik. Indonesia dalam bernegara berprinsip sesuai dengan UUD 1945, yang dalam alinea pertamanya berbunyi 'bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'. Hal tersebut dipertegas oleh Menlu Retno dalam Kuliah Umum di UGM, bahwa Indonesia konsisten dalam menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal serta terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024aa). Indonesia juga menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam bernegara, yang mana aktif dalam artian Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan di dunia (Haryanto, 2014: p17-18). Sejak masa Presiden Soekarno, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang mewujudkan kepentingan nasional dan harus berprinsip anti-kolonialisme dan anti-imperialisme (Kristiyanto, 2023: p195). Untuk mewujudkan prinsip tersebut, Indonesia menggunakan cara-cara diplomasi yang merujuk pada konsep *soft power* oleh Joseph S. Nye, yang memiliki tiga indikator: *public diplomacy*, *bilateral diplomacy*, *multilateral diplomacy*.

Indonesia dalam bernegara menganut sistem politik luar negeri bebas aktif, dimana konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan cita-cita yang ingin dicapai Indonesia melalui politik luar negeri bebas aktif (Wijayanti, 2022: p91). Dalam menjalankan politik luar negeri, diplomasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara (Kusno, 2014: p15). Diplomasi adalah kegiatan utama negara-negara dalam Hubungan Internasional, dan dapat dipandang sebagai alat yang memungkinkan negara-negara mencapai tujuan-tujuan tertentu (Peng & Wegge, 2015: p233). Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi secara singkat yaitu adalah cara mengelola urusan antarnegara

melalui cara-cara damai. Kemudian lebih lanjut ia menuliskan bahwa pemerintah melakukan hubungan internasionalnya melalui negosiasi, itulah diplomasi, yang jika dilakukan dengan tepat maka akan mencapai hasil yang baik (Satow, 1979).

Diplomasi mungkin perlu mencakup lebih dari sekedar negosiasi dan meyakinkan publik. Negosiator perlu menggunakan cara lain dalam diplomasi, seperti insentif positif yang berupa pengakuan diplomatik atau bantuan luar negeri, maupun ancaman negatif seperti pemutusan diplomatik dan penghapusan bantuan luar negeri. Hal tersebut yang dilakukan Indonesia kepada Palestina dalam bentuk diplomasinya, yaitu mengakui Palestina sebagai negara, dan memberikan bantuan langsung untuk Palestina (Mingst & Arreguín-Toft, 2017). Kemudian seorang diplomat dan penulis asal Inggris bernama Harold Nicolson, berpendapat bahwa diplomasi biasanya dimulai dengan negosiasi, baik melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai kesepakatan (Mingst & Arreguín-Toft, 2017). Harold Nicolson juga berpendapat bahwa ia di era modern saat ini, diplomasi tradisional yang difokuskan pada negosiasi dan berunding antar pemerintah sudah tidak lagi efektif dalam menghadapi situasi dunia yang jauh lebih kompleks seperti perang dan konflik (Nicolson, 1961).

Konsep *soft diplomacy* dipopulerkan oleh Joseph S. Nye, Jr., seorang professor Harvard University yang juga merupakan akademisi Hubungan Internasional (Kristiana & Benito, 2023: p125). Joseph Nye kemudian menyertakan tabel dalam bukunya mengenai tiga tipe *power*, sebagaimana berikut.

Tabel 1.1 *Three types of power* oleh Joseph S. Nye, Jr (Nye, 2004: p31)

<i>Types of Power</i>	<i>Behaviors</i>	<i>Primary Currencies</i>	<i>Government Policies</i>
<i>Military Power</i>	<i>coercion deterrence protection</i>	<i>threats force</i>	<i>coercive diplomacy war alliance</i>
<i>Economic Power</i>	<i>inducement coercion</i>	<i>payments sanctions</i>	<i>aid bribes sanctions</i>
<i>Soft Power</i>	<i>attraction agenda setting</i>	<i>values cultures policies institutions</i>	<i>public diplomacy bilateral and multilateral diplomacy</i>

Diplomasi publik tidak dapat dipungkiri terkait dengan kekuasaan (Snow, 2009: p3). Diplomasi publik merupakan salah satu instrumen kunci *soft power*, dan hal ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi publik (Melissen, 2005: p4). Perbedaan dasar antara diplomasi tradisional dan diplomasi publik yang jelas adalah: yang pertama berkaitan dengan hubungan antara perwakilan negara, atau aktor internasional lainnya; sedangkan yang kedua menargetkan masyarakat umum di negara asing dan kelompok-kelompok non-resmi yang lebih spesifik, organisasi, serta individu (Melissen, 2005: p5). Konsep diplomasi publik adalah gagasan lain yang semakin banyak digunakan oleh pemerintah dalam upaya membangun citra negara mereka, yang melibatkan pengembangan opini publik oleh pemerintah di negara lain (Dinnie, 2008: p251).

Tujuan diplomasi publik bagi konstruktivis tidak hanya terletak pada kepentingan nasional, karena mereka meyakini bahwa kepentingan nasional akan selalu berubah seiring dengan perubahan identitas negara akibat interaksi antarnegara (Rachmawati, 2017: p56). Menurut Nancy Snow, diplomasi publik adalah suatu hal yang tak terhindarkan yang berkaitan dengan kekuasaan, khususnya *soft power*, yang mempengaruhi secara tidak langsung melalui budaya, nilai-nilai, dan ideologi (Ma'mun, 2012: p61). Konsep diplomasi publik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu publik sebagai objek dan sebagai subjek, jika publik sebagai objek berarti masyarakat di negara lain menjadi target diplomasi suatu negara, dan publik sebagai subjek mencakup partisipasi masyarakat dalam negeri dalam aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh negara (Effendi, 2013: p49). Diplomasi publik pada dasarnya mengelola komunikasi di antara aktor diplomatik, termasuk negara dan aktor non-negara, yang memiliki tujuan informasional atau motivasional tertentu untuk menjangkau publik asing melalui berbagai saluran komunikasi guna mempromosikan kepentingan nasional (Golan & Yang, 2015: p2).

Diplomasi bilateral adalah negosiasi langsung antara dua negara (Rourke, 2009: p263). Dalam 'Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi' oleh Khasan Ashari, diplomasi bilateral adalah pelaksanaan hubungan diplomatik antara dua negara secara formal melalui misi diplomatik resmi dari kedua pihak dan mengedepankan prinsip resiprositas (Ashari, 2020: p71). Istilah ini juga merujuk pada kontak diplomatik antara delegasi dua negara di sela-sela pertemuan multilateral atau biasa disebut *side*

diplomacy (Ashari, 2020: p71). Diplomasi bilateral dapat membahas isu yang menjadi tema pertemuan multilateral yang sedang berlangsung maupun isu lain yang tidak terkait dengan tema pertemuan yang berlangsung (Ashari, 2020: p71-72). Diplomasi bilateral juga dikenal sebagai komunikasi antara dua pihak tanpa mendefinisikan sengketa atau metodenya, yang juga dikenal sebagai sistem diplomasi Prancis (Kastrati, 2023: p370). Diplomasi bilateral yang berhasil dapat menuju pada perjanjian bilateral, misalnya perjanjian bilateral yang mencakup perdagangan, dimana mengatur timbal balik untuk menurunkan hambatan perdagangan antara dua negara (Goldstein & Pevehouse, 2014: p298).

Jika diplomasi bilateral dilakukan oleh dua negara, maka diplomasi multilateral dilakukan setidaknya tiga negara, dan lebih banyak dilakukan melalui forum atau konferensi dunia (Ashari, 2020: p331). Diplomasi multilateral dilakukan dengan mekanisme yang bersifat *ad hoc* ataupun berkelanjutan untuk membahas isu yang menjadi permasalahan di dunia (Ashari, 2020: p331). Diplomasi multilateral ini juga berkembang bersamaan dengan *open diplomacy*, karena pembahasan dalam forum internasional ini bersifat terbuka dan beberapa isu melibatkan aktor non-negara, berbeda dengan diplomasi bilateral yang sifatnya lebih tertutup (Ashari, 2020: p331-332). Salah satu organisasi multilateral adalah PBB, yang keanggotaannya mencakup sebagian besar negara (Kaufman, 2022: p182), yang mana PBB dirancang untuk menjadi pusat diplomasi multilateral di dunia pascaperang politik (Pease, 2019: p22).

Sistem multilateral telah berkembang pesat, tidak seperti di masa lalu selama tahun-tahun antara dua Perang Dunia, ketika LBB terbukti tidak efektif. Piagam PBB menyediakan kerangka kerja konseptual dan operasional untuk hubungan kerja sama antar negara-negara, begitu juga dengan lembaga-lembaga multilateral lain yang menyatukan negara-negara, mulai dari GNB, OAU, dan semua pengelompokan regional yang beragam, hingga WTO dan sejenisnya (Rana, 2007: p23). Diplomasi multilateral memiliki potensi keberhasilan negosiasi lebih besar dibandingkan model diplomasi lainnya, karena negara-negara yang terlibat lebih memprioritaskan pencapaian kepentingan bersama daripada kekuasaan, dan kesepakatan yang dicapai melalui diplomasi multilateral cenderung lebih bertahan lama (Alexandra & Mujiono, 2019: p77). Dalam diplomasi multilateral terdapat prosedur pengambilan keputusan, berupa

melalui veto, suara terbanyak, ataupun konsesus (Alexandra & Mujiono, 2019: p77).

Indonesia tentu memiliki berbagai upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Mulai dari bantuan berupa barang ataupun makanan, bantuan pelatihan, maupun bantuan untuk menyuarakan kepada dunia seberapa urgensinya masalah yang tengah dihadapi di negara timur tengah tersebut. Indonesia sebagai negara yang aktif di berbagai organisasi dunia, tentu memiliki hak untuk berbicara menyuarakan keresahannya. Jokowi selaku Presiden Indonesia dan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia tentunya merupakan dua orang penting yang memegang kunci dalam mendiplomasikan dukungan kemerdekaan Palestina. Selain dua tokoh negara tersebut, tentunya tokoh negara lain juga memiliki peran untuk mendiplomasikan.

Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seringkali menghadiri konferensi-konferensi internasional, pertemuan internasional, dan di berbagai kesempatan lainnya untuk menyuarakan Palestina. Bantuan langsung yang diberikan pun dikirimkan kepada Palestina untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas karena serangan Israel. Indonesia bahkan pernah membangun Rumah Sakit Indonesia di Palestina tepatnya di Gaza pada tahun 2016 yang pada saat itu diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai macam bantuan diberikan kepada Palestina, berbagai upaya diplomasi diusahakan oleh Indonesia, yang mana akan menjadi pembahasan yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB II

SEJARAH KONFLIK ISRAEL PALESTINA

2.1 Asal Muasal Konflik

Israel dan Palestina berkonflik sejak 5.000 tahun yang lalu yang masih berlangsung hingga saat ini, yang mana konflik yang terjadi merupakan konflik perebutan wilayah antara Islam dan Yahudi, dimana keduanya saling mengklaim tanah Palestina sebagai miliknya (Gandhi, 2009: p1). Islam mengklaim bahwa Yerusalem sebagai tanah suci mereka dikarenakan kiblat pertama yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW. dan menjadi tanah suci ketiga bagi umat Muslim, sedangkan Yahudi mengklaim bahwa Yerusalem sebagai tanah suci mereka dikarenakan menganggap bahwa tanah Yerusalem merupakan tanah yang dijanjikan bagi mereka sebagaimana pada firman tuhan yang mereka percayai (Gandhi, 2009: p2). Wilayah Palestina saat ini dulunya disebut dengan wilayah Kan'an, karena dalam sejarah yang pertama kali menempati wilayah ini adalah bangsa Kan'an pada sekitar 2500 tahun SM (Shaleh, 2002: p13).

Orang-orang Yahudi terbagi menjadi Yahudi Semitik dan Yahudi non-Semitik (Amri, 2018: p1). Yahudi Semitik adalah keturunan Nabi Ibrahim a.s. yang bermigrasi dari kota Ur di wilayah selatan Mesopotamia ke kota Kharan di Suriah. Perjalanan Nabi Ibrahim ini kemudian dilanjut menuju kota Kan'an pada sekitar tahun 2000 SM (Amri, 2018: p1). Kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ya'qub yang memiliki 12 orang anak yang keturunannya disebut dengan Bani Israil (Shaleh, 2002: p19). Tanah Palestina kemudian melalui banyak pergantian kekuasaan seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Raja Herod, Pemerintahan atau Kekaisaran Roma, Pemerintahan Islam, dan Turki Utsmani (Gandhi, 2009: p21-29).

Konflik Israel-Palestina diidentifikasi sebagai titik awal pada tahun 1897, dimana pada tahun tersebut, World Zionist Congress atau Kongres Zionis Dunia pertama diadakan di Basel, Swiss, atas inisiatif Theodor Herzl, seorang visioner negara Yahudi (Shlaim, 1988: p2). Dalam kongres tersebut dinyatakan tujuan untuk mendirikan rumah nasional Yahudi di Palestina dan mendirikan World Zionist Organization atau Organisasi Zionis Dunia dengan Herzl sebagai presidennya untuk bekerja

mewujudkan tujuan tersebut (Shlaim, 1988: p2). Rencana pemukiman Zionis pada tahun 1919 mencakup seluruh bagian timur negara tersebut ditambah dengan sebagian besar wilayah yang akan menjadi Transyordania, yang tidak dipisahkan oleh Inggris dari Palestina hingga tahun 1922 (Kimmerling & Migdal, 2003: p25).

Turki Utsmani menduduki tanah Palestina cukup lama yakni selama tiga abad, yang berpindah tangan ke Imperialisme Inggris pada tahun 1917 (Muchsin, 2015: p398). Kerajaan Turki Utsmani mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama yang menyebabkan harus menyerahkan wilayah kekuasaan pada pihak yang menang dalam perang, termasuk wilayah Timur Tengah yang masuk dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani (Fudia et al., 2022: p136). Hal tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada negara anggota untuk memerintah bekas koloni Turki sesuai dengan Pasal 22 Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa (Encyclopedia Britannica, 2021).

Deklarasi Balfour menjadi titik balik besar dalam perkembangan konflik Israel-Palestina (Shlaim, 1988: p3). Sebelumnya, para pemimpin Zionis seperti Chaim Weizmann sangat menyadari ketergantungan mereka sepenuhnya pada harapan Inggris untuk mengalahkan pasukan Turki dan Jerman dan merebut Palestina (Mathew, 2013: p236). Deklarasi Balfour merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada Pemimpin Komunis Yahudi di Inggris yang berisikan mengenai dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi di tanah Palestina (Hindun, 2018). Deklarasi Balfour sendiri diambil dari nama sang penulis surat yakni Arthur James Balfour, dan Deklarasi Balfour juga menjadi unsur pokok mandat Palestina kepada Inggris untuk menentukan wilayah Israel dan Palestina (Kaslam, 2021). Latar belakang dari Deklarasi Balfour sendiri ini adalah awalnya seorang Yahudi Inggris yang membuatkan formula senjata yang mengarahkan pada kemenangan atas peperangan, dan karena hal tersebut, seorang Yahudi yang bernama Chaim Weizmann tersebut diberikan hadiah dari Perdana Menteri Inggris David Lloyd George (Nurjannah & Fakhruddin, 2019). Chaim Weizmann kemudian meminta pemulangan orang-orang Yahudi ke tanah suci mereka, dan mendirikan *National Home* untuk Yahudi di Palestina, yang kemudian dikeluarkannya Deklarasi Balfour, yang mana menjadi charter atau piagam bagi gerakan Zionis (George, 1938: p349). Kemudian pada

tanggal 2 November 1917, Arthur James Balfour mengeluarkan pernyataan yang berbunyi (Shlaim, 1988: p3):

“His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by the Jews in any other country” (Jewish Virtual Library, n.d.-a)

Pemerintah Inggris secara terang-terangan menolak hak-hak demokratis bagi orang Arab Palestina. Arthur Balfour, penulis deklarasi tersebut menegaskan bahwa aspirasi Zionis jauh lebih penting dibandingkan dengan keinginan dan prasangka dari 700.000 orang Arab yang saat itu tinggal di Palestina, dan bahwa klaim orang Arab atas Palestina jauh lebih lemah dibandingkan dengan klaim orang Yahudi (Mathew, 2011: p27).

Pada tahun 1947, PBB mengeluarkan Resolusi 181, yang berisikan rencana pembagian wilayah Palestina kepada dua pihak, satu untuk Arab Palestina, dan satu untuk Yahudi, dengan Yerusalem sebagai corpus separatum atau entitas yang terpisah, yang akan menjadi wilayah internasional yang khusus (Encyclopedia Britannica, 2024c). Akan tetapi, resolusi tersebut ditolak oleh komunitas Arab yang disusul dengan kekerasan (Encyclopedia Britannica, 2024c).

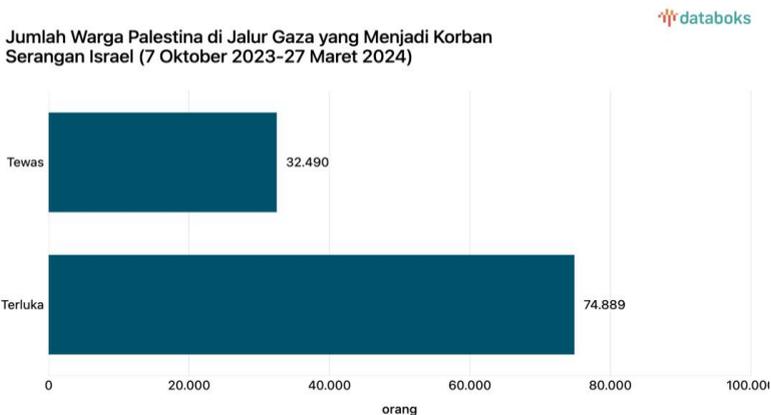


Gambar 2. 1 Peta Rencana Pembagian Wilayah oleh PBB pada 1947
(Encyclopedia Britannica, 2024c)

Dilansir dari Al Jazeera, pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangannya ke tembok apartheid yang telah dibangun Israel untuk mengeluarkan warga Palestina dari penjara di Gaza (Al Jazeera, 2023a). Hamas menyatakan bahwa Operasi Banjir Al-Aqsa merupakan langkah strategis untuk mengatasi blokade Gaza, mengakhiri pendudukan Israel, memulihkan hak-hak nasional Palestina, mencapai kemerdekaan, menentukan nasib sendiri, dan mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota (Kompas.tv, 2024).

Dalam laporan yang berjudul '*Our Narrative... Operation Al-Aqsa Flood*', dijelaskan bahwa Operasi Banjir Al-Aqsa merupakan langkah dan reaksi atas rencana Israel untuk menyahudikan Masjid Al-Aqsa, perebutan wilayah, kegagalan komunitas internasional, dan pencegahan atas pendirian negara Palestina (Hamas Media Office, 2024: p5-6). Pemerintah Israel merespon dengan mendeklarasikan perang melalui Operasi Pedang Besi di utara Jalur Gaza, dengan melancarkan serangan udara dan menargetkan berbagai lokasi termasuk gedung-gedung pemukiman dan rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang berada di utara Jalur Gaza (Radio Republik Indonesia, 2023b). Terhitung tujuh hari terakhir sejak 7 Oktober 2023, tantara Israel telah membunuh lebih dari 2.200 warga Palestina di Gaza, termasuk 600 anak-anak (Al Jazeera, 2023a).

Setelah 49 hari pertempuran yang mengakibatkan lebih dari 15.000 warga Gaza tewas, Hamas dan Israel menyepakati jeda kemanusiaan (Radio Republik Indonesia, 2023b). Berdasarkan data dari United Nations for the Coordinator of Humanitarian Affairs (OCHA) menunjukkan bahwa antara 7 Oktober 2023 hingga 27 Maret 2024, sebanyak 32.490 warga tewas dan 74.889 terluka akibat serangan tersebut, dimana pada 27 Maret 2024, 76 orang tewas dan 102 terluka dalam satu hari, serta ditanyakan pula oleh WHO bahwa 24 dari 36 rumah sakit di Gaza tidak berfungsi pada 27 Maret 2024 (Databoks, 2024).



Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Korban Warga Palestina di Jalur Gaza (Databoks, 2024)

Indonesia membangun Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza pada tahun 2011, yang mana Rumah Sakit itu dibangun dari sumbangan Indonesia sebesar 126 miliar (CNBC Indonesia, 2023). Rumah Sakit Indonesia terletak di Bayt Lahiya, Gaza Utara, dengan luas 16.26 meter persegi diatas lahan yang tersebut merupakan lahan wakaf Pemerintah Palestina (CNBC Indonesia, 2023). Pada tahun 2016, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Jusuf Kalla, menyerahkan RS Indonesia kepada Palestina (CNBC Indonesia, 2023). Rumah Sakit Indonesia telah beberapa kali diserang oleh Israel, seperti pada tahun 2011, dua orang tewas dan luka-luka akibat bom Israel yang meledak di dekat lokasi Rumah Sakit Indonesia, dan pada tahun 2021, serangan juga dilakukan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia yang menyebabkan plafon kantor administrasi ambruk (CNBC Indonesia, 2023).

Pada November 2023, Israel mengepung Rumah Sakit Indonesia dengan tank di mana 12 orang warga Palestina tewas tertembak akibat tembakan artileri dan puluhan lainnya terluka (The Jakarta Post, 2023). Israel menarget Rumah Sakit Indonesia untuk pengeboman, serta melancarkan serangan udara menggunakan pesawat tempur di sekitar rumah sakit yang menampung korban terluka dan para warga yang berlindung (Wafa News Agency, 2023). Situasinya sangat buruk hingga ratusan orang terjebak, dan para petugas Rumah Sakit Indonesia bersikeras bahwa mereka akan tetap merawat korban yang terluka (Al Jazeera, 2023b).

Rumah Sakit Indonesia ini menampung lebih dari 700 orang termasuk pasien yang terluka dan staf rumah sakit (Al Jazeera, 2023b). Militer Israel mengklaim bahwa Hamas membangun infrastruktur dibawah tanah rumah sakit untuk keperluan militer, yang dibantah oleh Hamas (Al Jazeera, 2023b). Hal yang dilakukan Israel tersebut telah melanggar hukum humaniter internasional.

Sebagai reaksi dari pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke negara-negara yang merupakan anggota tetap UN Security Council atau Dewan Keamanan PBB bersama para Menteri Luar Negeri negara anggota OKI. Menurut Menlu Retno, para Menteri Luar Negeri negara anggota OKI mengutuk tindakan Israel terhadap Gaza dalam pertemuan tersebut (BBC News Indonesia, 2023b). Dalam keterangan pers yang dilansir dari portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 21 November 2023, Menlu Retno dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa alasan "*self defence*" Israel tidak dapat diterima. Ia mengatakan bahwa penjajah seperti Israel tidak dapat menggunakan alasan tersebut, dan alasan *self defence* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyerang fasilitas sipil dan membunuh masyarakat sipil atau "*a licence to kill civilian*". Dalam pers tersebut juga dikatakan bahwa penyerangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia juga termasuk dalam pembahasan dalam pertemuan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023r).

Pada bulan Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan kasus dengan tuduhan Israel melakukan genosida di Gaza, Palestina, ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) terkait dugaan pelanggaran Israel dibawah Konvensi Genosida, dan permohonan tersebut telah disetujui oleh pengadilan PBB (BBC News, 2023). Pihak Israel membantah tuduhan tersebut dengan menyebutnya "tidak berdasar". Israel merespon bahwa Afrika Selatan bekerja sama dengan organisasi teroris yang bertujuan menghancurkan negara Israel, serta mengatakan Hamas bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan menggunakan mereka sebagai tameng hidup dan mencuri bantuan kemanusiaan dari mereka (BBC News, 2024).

Respon lebih lanjut, Israel berkomitmen pada hukum internasional dan bertindak sesuai hukum, mengarahkan upaya militernya hanya untuk melawan Hamas dan organisasi lainnya yang bekerja sama dengan Hamas

(BBC News, 2023). Atas sikap Afrika Selatan tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, menyatakan BKSAP DPR RI berpihak dan mendukung penuh penggugatan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024a). Dikatakan oleh Ketua BKSAP DPR RI tersebut bahwa Indonesia mendukung tindakan Afrika Selatan walaupun Indonesia bukan pihak dari ICJ (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024a). BKSAP menunjukkan dukungannya untuk Palestina, termasuk di forum IPU di Angola pada bulan Oktober 2023 dengan menginisiasi *emergency item* mengenai *stopping the war* dan *violations of human right in Gaza* (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024a). Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah genosida dan kejahatan manusia, itulah yang membuat BKSAP DPR RI dengan tegas mendukung Afrika Selatan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024a). Ketua BKSAP DPR RI tersebut juga menyatakan bahwa yang dilakukan Israel adalah kejahatan perang dan genosida, meskipun perang baru berlangsung lima hari, ia menyatakan pernyataannya itu di forum parlemen negara-negara G20 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024a).

Pada tanggal 22 November 1974, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk memiliki negara sendiri dan kembali ke tanah Palestina, bahkan memberikan status pengamat tetap kepada PLO di Majelis Umum PBB dan konferensi internasional dibawah pimpinan Yasser Arafat (Anrian, 2023: p132). Indonesia mendukung deklarasi yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 bersama dengan dua puluh negara lainnya, kecuali Amerika Serikat dan Israel yang menentang secara terbuka mengenai deklarasi tersebut (Anrian, 2023: p132).

Indonesia dan Palestina sendiri memiliki hubungan baik sejak Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia satu tahun sebelum proklamasi Indonesia dikumandangkan, yakni pada tahun 1944, kemudian disusul pada tahun 1989, Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Aljazair dan Indonesia termasuk dalam negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina, n.d.-a). Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga memiliki relasi yang baik dengan Palestina. Pada masa

kepemimpinannya, Indonesia membangun bank dan Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, serta bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi dan komunitas Indonesia (Anrian, 2023: p137). Kementerian Luar Negeri Indonesia juga memberikan pelatihan untuk warga Palestina, pejabat Palestina, dan duta besar Palestina selama masa pemerintahan Presiden SBY (Anrian, 2023: p138).

Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi, yaitu menghilangkan penjajahan dan berperan serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022a). Indonesia meyakini bahwa kebebasan adalah hak setiap bangsa, seperti yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi negara (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023e).

Presiden Soekarno sendiri mengatakan dalam bukunya bahwa salah satu sumber dari pertikaian antar bangsa yang perlu dihapuskan dari bumi adalah sumber kolonialisme, nafsu yang menduduki wilayah orang lain, dan menurutnya, jika sumber ini tidak dihapuskan, selama masih ada satu bangsa yang mengungku bangsa lain, maka tidak akan ada perdamaian bahkan suatu penyelesaian pun tidak akan bertahan lama (Ir. Soekarno, 1965: p120). Indonesia memang sejak dahulu menentang kolonialisme yang masih ada di dunia. Sejak masa Presiden Soekarno, diplomasi beliau menegaskan sikap Indonesia mengenai perdamaian dunia, dan menegaskan pandangannya terhadap berbagai ketidakadilan yang muncul akibat kolonialisme (Kristiyanto, 2023: p28).

Menlu Retno sendiri mengatakan bahwa isu Palestina ini bukanlah konflik, melainkan penjajahan. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 20 Mei 2021, dihadapan para perwakilan negara yang hadir, Menlu mengatakan bahwa konflik ini bersifat asimetris, antara Israel selaku penjajah dan penindas dengan bangsa Palestina selaku yang diduduki dan terus menerus ditindas (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021a). Menlu menegaskan kembali bahwa penjajahan adalah inti masalahnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021a). Hal serupa juga dikatakan oleh Duta Besar RI untuk Lebanon Hadjriyanto Y. Thohari, ia mengkritik pandangan yang menganggap permasalahan Palestina dan Israel hanya sebatas konflik atau perebutan wilayah (Muhammadiyah, 2021). Ia mengutip kalimat dari Joseph Massad, seorang

doktor di Columbia University yang menyebutkan bahwa hal ini sangat tidak simetris, bukan konflik, tapi penjajahan (Muhammadiyah, 2021).

BAB III

DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA

3.1 Dukungan Indonesia Terhadap Palestina Sebelum Tahun 2015

Pada tahun 2011, Palestina mengajukan diri untuk menjadi negara anggota penuh PBB serta mengajukan keanggotaan penuh di UNESCO (Aslamiah, 2015: p13). General Conference UNESCO ke-36 kemudian menyetujui Palestina menjadi anggota penuh UNESCO ke-194, dengan tentunya Indonesia yang memberikan dukungan penuh dalam pemungutan suara, sedangkan dalam PBB Palestina gagal mendapatkan rekomendasi dari DK PBB (Aslamiah, 2015: p13). Kemudian di tahun 2012, Palestina kembali mengajukan diri untuk mendapatkan status di PBB, yang mana kali ini akan diputuskan melalui Sidang Majelis Umum PBB tanpa memerlukan rekomendasi DK PBB terlebih dahulu (Aslamiah, 2015: p13). Indonesia sebagai negara yang berteman dengan Palestina, melancarkan diplomasi multilateralnya pada Sidang Majelis Umum yang dihadiri 193 negara, untuk mendukung Palestina menjadi negara peninjau di PBB (Aslamiah, 2015: p14). Dalam merealisasikan dukungannya tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi *co-sponsor* dari *draft* resolusi yang diajukan oleh Palestina, berpartisipasi aktif dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-67 dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menyampaikan pernyataan dan menyuarakan dukungan dan ajakan di hadapan peserta sidang, serta mendukung dalam pemungutan suara (Aslamiah, 2015: p14-15).

Adapun bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina telah berlangsung sejak lama. Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, merupakan sebuah wadah bagi negara-negara Asia dan Afrika yang diprakasai Indonesia untuk Bersatu dalam memperjuangkan negara dibawah kolonialisme dan belum merdeka, yang mana Palestina termasuk salah satunya (Aslamiah, 2015: p10). Kemudian di tahun 1962, Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games 1962 menolak visa bagi atlet Israel untuk berpartisipasi dalam *event* tersebut (Aslamiah, 2015: p10). Gerakan Non-Blok (GNB) menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-16 di Bali, dan Indonesia dengan negara anggota lainnya berkomitmen untuk mendukung Palestina, dan mengusulkan untuk menggalang suara untuk pengakuan Palestina sebagai anggota di PBB (Aslamiah, 2015: p10). Indonesia

sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2007-2008, dan selama menjabat Indonesia kerap mendorong DK PBB untuk mengeluarkan keputusan terkait isu Palestina (Aslamiah, 2015: p10). Indonesia juga merupakan bagian dari kerja sama regional *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP), dan menginisiasi *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* pada tanggal 14-15 Juli 2008 di Jakarta, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, salah satunya dengan program peningkatan kapasitas bagi 1000 warga Palestina yang telah berjalan dari 2008 hingga 2013 (Aslamiah, 2015: p10). Selain bantuan diplomasi, Indonesia juga memberikan bantuan finansial kepada Palestina, baik dalam bentuk pledge sebesar masing-masing USD 1 juta pada Paris Donor Conference 2007 dan selama Krisis Gaza 2008-2009, dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) memberikan peralatan medis senilai USD 83.325,21 kepada warga Palestina di Jalur Gaza melalui KBRI Kairo, kemudian Indonesia mengalokasikan 20 miliar rupiah untuk pembangunan Indonesia Cardiac Center di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, dan mendirikan Rumah Sakit Indonesia melalui Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di atas tanah wakaf dari pemerintah Palestina (Aslamiah, 2015: p10-11). Pada 29 November 2012 anggota Komisi I DPR RI berkunjung ke Gaza, Palestina bersama beberapa anggota LSM untuk memberikan dukungan politik, bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, dan memberikan dukungan moral kepada Palestina (Aslamiah, 2015: p11).

Pada KTT GNB ke-16 di Tehran, Iran pada tahun 2012, pertemuan kala itu dipimpin oleh Wakil Presiden RI yang menyepakati beberapa hal salah satunya Deklarasi Tahanan Politik Palestina dan Deklarasi Solidaritas Palestina (Sadewa & Hakiki, 2023: p23). Selain itu, Wakil Presiden RI menyampaikan agar GNB perlu untuk terus membantu Palestina (Sadewa & Hakiki, 2023: p23). Kemudian pada KTT GNB ke-18 di Baku, Azerbaijan pada tahun 2019 mengangkat kembali isu Palestina, karena bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina telah menjadi prioritas selama Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB (Sadewa & Hakiki, 2023: p24). Selain itu, negara-negara anggota GNB telah mendukung peran Palestina di berbagai organisasi internasional, termasuk kepemimpinan Palestina di G77 pada tahun itu (Sadewa & Hakiki, 2023: p24).

3.2 Dukungan Indonesia Terhadap Palestina Tahun 2015-2024

Indonesia konsisten dalam mendukung Palestina sejak dulu hingga saat ini. Berbagai bantuan diberikan mulai dari bantuan kemanusiaan maupun bantuan dalam bentuk diplomasi. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung Palestina menggunakan tiga diplomasi berdasarkan Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul 'Soft Power', yakni *public diplomacy*, *bilateral diplomacy*, dan *multilateral diplomacy*.

3.2.1 Public Diplomacy

Public diplomacy atau diplomasi publik tidak dapat dipungkiri terkait dengan kekuasaan (Snow, 2009: p3). Diplomasi publik merupakan salah satu instrumen kunci *soft power*, dan hal ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi publik (Melissen, 2005: p4). Perbedaan dasar antara diplomasi tradisional dan diplomasi publik yang jelas adalah: yang pertama berkaitan dengan hubungan antara perwakilan negara, atau aktor internasional lainnya; sedangkan yang kedua menargetkan masyarakat umum di negara asing dan kelompok-kelompok non-resmi yang lebih spesifik, organisasi, serta individu (Melissen, 2005: p5). Konsep diplomasi publik adalah gagasan lain yang semakin banyak digunakan oleh pemerintah dalam upaya membangun citra negara mereka, yang melibatkan pengembangan opini publik oleh pemerintah di negara lain (Dinnie, 2008: p251). Tujuan diplomasi publik bagi konstruktivis tidak hanya terletak pada kepentingan nasional, karena mereka meyakini bahwa kepentingan nasional akan selalu berubah seiring dengan perubahan identitas negara akibat interaksi antarnegara (Rachmawati, 2017: p56). Menurut Nancy Snow, diplomasi publik adalah suatu hal yang tak terhindarkan yang berkaitan dengan kekuasaan, khususnya *soft power*, yang mempengaruhi secara tidak langsung melalui budaya, nilai-nilai, dan ideologi (Ma'mun, 2012: p61). Konsep diplomasi publik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu publik sebagai objek dan sebagai subjek, jika publik sebagai objek berarti masyarakat di negara lain menjadi target diplomasi suatu negara, dan publik sebagai subjek mencakup partisipasi masyarakat dalam negeri dalam aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh negara (Effendi, 2013: p49). Diplomasi publik pada dasarnya mengelola komunikasi di antara aktor diplomatik, termasuk negara dan aktor non-negara, yang memiliki tujuan informasional atau motivasional tertentu untuk menjangkau publik asing

melalui berbagai saluran komunikasi guna mempromosikan kepentingan nasional (Golan & Yang, 2015: p2).

Sehari setelah pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan pers terkait hal tersebut. Pernyataan pers yang disampaikan pada 7 Desember 2017 tersebut menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, karena melanggar berbagai resolusi DK dan MU PBB dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dunia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017c). Ia juga menegaskan bahwa dirinya dan rakyat Indonesia akan terus mendukung secara konsisten perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan hak-hak mereka, sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017c). Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat guna menyampaikan langsung sikap pemerintah Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017c).

Presiden Joko Widodo sempat mengunggah cuitan di sosial media melalui akun pribadi Twitter-nya (sekarang menjadi X) @jokowi pada tanggal 10 Mei 2021, yang berisikan tentang kutukan Indonesia atas tindakan Israel terhadap Palestina, dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak, serta menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2021a).



Gambar 3. 1 Cuitan Presiden Jokowi dalam Akun Twitter Pribadi @jokowi (10/05/2021)

Kemudian pada 15 Mei 2021, Presiden Jokowi kembali mengunggah cuitan pada akun Twitter (sekarang menjadi X) pribadinya @jokowi untuk menyuarakan mengenai Palestina, dengan kembali menyatakan bahwa Indonesia mengutuk serangan Israel dan meminta agresi segera dihentikan (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2021c).



Gambar 3. 2 Cuitan Presiden Jokowi dalam Akun Twitter Pribadi @jokowi (15/05/2021)

Presiden Jokowi juga menyampaikan pernyataan terkait situasi konflik Palestina dan Israel di Istana Merdeka Jakarta, pada 10 Oktober 2023. Presiden Jokowi menyatakan untuk mendesak agar perang dan kekerasan dihentikan, dan akar konflik tersebut harus diselesaikan sesuai dengan aturan PBB (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023e). Hal tersebut juga diunggah melalui laman resmi Presiden RI (<https://www.presidentri.go.id/>) seperti yang terlampir berikut ini (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023f).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPRESIDENAN PERS PEMERINTAHAN PENCARIAN

KATEGORI
Amanat
Dialog
Keterangan Pers
Sambutan
Sidang Kabinet

Pernyataan Presiden Republik Indonesia Terkait Situasi Terkini Konflik Palestina-Israel

Selasa, 10 Oktober 2023
Istana Merdeka, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar.

Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik.

Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB.

Dikelola oleh:
BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT PRESIDEN
Jl. Veteran No. 16
Jakarta Pusat, Kode Pos 10110

KEPRESIDENAN
Presiden Joko Widodo
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

PERS
Siaran Pers
Foto Presiden
Video Presiden
Transkrip

PEMERINTAHAN
Kabinet Indonesia Maju
Capaian Kinerja

© 2019-2024 Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara

Gambar 3. 3 Pernyataan Presiden Jokowi Melalui Laman Resmi Presiden RI

Selain itu, Presiden juga kerap mengunggah pernyataan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, seperti pada unggahan 19 Oktober 2023 (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023h). Dalam pernyataan tersebut, Presiden Jokowi mengecam keras kekerasan di Gaza, Palestina, yang mengakibatkan banyak korban sipil dan menyerang Rumah Sakit Al Ahli (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023h). Presiden menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menghadiri Pertemuan Luar Biasa Para Menlu OKI di Jeddah (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023h). Dikatakan pula Indonesia bersama dengan OKI akan terus mendukung penghentian kekerasan, fokus pada isu kemanusiaan, dan menyelesaikan akar masalah pendudukan Israel atas Palestina, serta Presiden juga mengajak negara-negara di dunia membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan terus menyuarkan isu ini di forum internasional (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023h).

Presiden Jokowi juga sempat mengisi kuliah Umum di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat pada 13 November 2023 yang dihadiri oleh hampir 500 peserta yang merupakan akademisi maupun mahasiswa (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023t). Dalam penyampaiannya di kuliah umum tersebut, Presiden menyinggung mengenai perang di Gaza yang mengakibatkan satu anak tewas setiap 10 menit, dan mengatakan bahwa lebih dari 66 persen korban adalah wanita dan anak-anak (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023b). Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan bahwa ini adalah masa kemanusiaan, dan untuk menghentikannya diperlukan solidaritas global dan kepemimpinan dunia yang mengutamakan kemanusiaan, kemudian ditutup dengan pernyataan “kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kita harus tunaikan tanggung jawab ini sekarang juga” (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023b).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga memainkan peran penting dalam menjalankan diplomasi publik untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti pada 22 November 2023, Menlu Retno bersama dengan beberapa Menlu anggota OKI lainnya mengunjungi London dan Paris. Di London, Menlu Retno bersama dengan Menlu Arab Saudi, Jordan, Nigeria, Mesir, Palestina, dan Sekjen Liga Arab mengadakan pertemuan dengan Pers Internasional. Dalam pertemuan dengan Pers Internasional tersebut, para

Menlu menyampaikan tujuan kunjungan mereka ke beberapa negara, yaitu untuk menindaklanjuti KTT Bersama OKI-Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh pada 11 November lalu guna menggalang dukungan untuk menyelesaikan masalah Gaza. Menlu Retno sendiri menyampaikan dua hal dalam pertemuan dengan Pers Internasional tersebut, pertama, Menlu Retno menyoroti pentingnya menghormati hukum humaniter internasional, ia menyampaikan bahwa dalam perang pun ada hukum dan aturan yang harus diikuti, salah satunya adalah perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit. Kedua, disampaikan oleh Menlu Retno bahwa negara-negara dari Global South sering mendengar *lectures* tentang penghormatan HAM dan pentingnya menghormati hukum internasional dan hukum humaniter internasional, kemudian Menlu Retno mempertanyakan apakah semua *lectures* tersebut, serta *values* dan standar tersebut juga berlaku untuk isu Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023s).

Kemudian dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Museum Konferensi Asia-Afrika (KAA), Bandung pada 8 Januari 2024, Menlu Retno juga menyampaikan hal mengenai Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024b). Ia mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sangat buruk bagi Palestina, dengan lebih dari 21 ribu korban jiwa di Gaza yang 70 persennya merupakan perempuan dan anak-anak, kemudian juga fasilitas publik termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang hancur akibat serangan Israel (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024c). Menlu Retno menyatakan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina, termasuk dengan memberikan pernyataan lisan (*advisory opinion*) di Mahkamah Internasional pada 19 Februari untuk mendukung posisi hukum Palestina dan memastikan PBB tidak melupakan perjuangan bangsa Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024c).

Tabel 3.4 Diplomasi Publik Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pernyataan Awal Tahun 2015 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta	8 Januari 2015	Dalam pernyataan awal tahun 2015 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebutkan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga terbentuk negara yang merdeka dan berdaulat (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015).
Presiden RI Joko Widodo	Pernyataan Pers Bersama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani usai Penutupan KTT Luar Biasa OKI Ke-5 di JCC	7 Maret 2016	Pernyataan pers dilakukan setelah penutupan KTT-LB OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, disampaikan oleh Presiden bahwa KTT kali ini merupakan jawaban Indonesia atas permintaan Palestina, dan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016g).

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
Presiden RI Joko Widodo	Pernyataan Pers Terkait Pengakuan Yerusalem oleh AS di Istana Kepresidenan Bogor	7 Desember 2017	Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia mengemukakan keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, karena melanggar berbagai resolusi PBB dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dunia. Ia juga menegaskan bahwa dirinya dan rakyat Indonesia akan terus mendukung secara konsisten perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan hak-hak mereka, sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017c).
Presiden RI Joko Widodo	Pernyataan Jokowi pada Wartawan: Indonesia Mengemukakan Keras Israel	28 Oktober 2018	Presiden RI Joko Widodo kepada wartawan menyatakan bahwa Indonesia mengemukakan keras serangan Israel ke Palestina pada tanggal 27 Oktober 2023 lalu. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia akan selalu ada untuk

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018d).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari	Konferensi Pers Komisi I DPR RI	30 Juni 2020	Komisi I DPR RI, melalui Wakil Ketua Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan sikap tegas menentang rencana aneksasi Israel yang dianggap sebagai upaya legalisasi penjajahan. Komisi I DPR RI sebagai representasi masyarakat Indonesia mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya, kemudian juga mendesak Kementerian Luar Negeri untuk mengoptimalkan diplomasi dan meminta PBB untuk melindungi warga sipil Palestina (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020).
Presiden RI Joko Widodo	Cuitannya di Akun Twitter Resminya @jokowi	10 Mei 2021	Presiden Joko Widodo mengunggah cuitan di sosial media melalui akun pribadi Twitter-nya, yang berisikan

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			tentang kutukan Indonesia atas tindakan Israel terhadap Palestina, dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak, serta menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2021a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Menyampaikan Keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta	12 Mei 2021	Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyatakan Indonesia mengutuk keras tindakan Israel yang mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah dan menyerang warga sipil di Masjid Al-Aqsha. Kemudian Menlu juga menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung hak-hak rakyat Palestina yang telah lama terganggu oleh Israel (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2021b).

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
Presiden RI Joko Widodo	Cuitannya di Akun Twitter Resminya @jokowi	15 Mei 2021	Presiden Jokowi kembali mengunggah cuitan pada akun Twitter pribadinya untuk menyuarakan mengenai Palestina, dengan kembali menyatakan bahwa Indonesia mengutuk serangan Israel dan meminta agresi segera dihentikan (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2021c).
Presiden RI Joko Widodo	Pernyataan Presiden RI terkait Penyelenggaraan Piala Dunia U-20	28 Maret 2023	Indonesia sebagai tuan rumah terpilih untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023, Presiden Jokowi menekankan bawa partisipasi tim nasional Israel dalam ajang olahraga ini tidak mempengaruhi konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Presiden juga menyampaikan prinsip Indonesia yang selalu konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sejalan dengan konstitusi yang menolak segala bentuk

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			penjajahan (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023a).
Presiden RI Joko Widodo	Pernyataan Presiden Republik Indonesia Terkait Situasi Terkini Konflik Palestina-Israel di Istana Merdeka	10 Oktober 2023	Presiden Jokowi menyatakan untuk mendesak agar perang dan kekerasan dihentikan, dan akar konflik tersebut harus diselesaikan sesuai dengan aturan PBB, yang diunggah juga melalui laman resmi Presiden RI (https://www.presidenri.go.id/) (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023e).
Presiden RI Joko Widodo	Keterangan Presiden Melalui Video yang Ditayangkan pada Kanal Youtube Sekretariat Presiden	19 Oktober 2023	Dalam pernyataan tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan keras kekerasan di Gaza, Palestina, yang mengakibatkan banyak korban sipil dan menyerang Rumah Sakit Al Ahli. Presiden menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Presiden juga mengajak negara-negara di dunia membangun solidaritas global untuk

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan terus menyuarkan isu ini di forum internasional (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023h).
Presiden RI Joko Widodo	Keterangan Pers Presiden RI Terkait Perkembangan Konflik Palestina-Israel di Istana Merdeka	30 Oktober 2023	Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sangat prihatin dengan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan mengutuk keras serangan terhadap warga sipil dan fasilitas publik. Lebih lanjut, Indonesia menekankan pentingnya menghentikan kekerasan, mempercepat gencatan senjata, dan mendorong bantuan kemanusiaan (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023j).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	<i>Press Briefing</i> Menlu RI Mengenai Palestina	1 November 2023	Menlu menyampaikan tiga hal, pertama mengenai Rumah Sakit Indonesia yang akan shut down dalam kurang dari 48 jam, kedua mengenai WNI, ketiga mengenai bantuan kemanusiaan yang

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			akan dikirim pada akhir minggu sejak <i>press briefing</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023l).
Ibu Negara Iriana Joko Widodo	Ibu Iriana Joko Widodo Bersama OASE KIM Sampaikan Simpati untuk Palestina, yang Ditayangkan pada Kanal YouTube Sekretariat Presiden	5 November 2023	Ibu Iriana Joko Widodo menyerukan agar konflik di Palestina segera dihentikan dan mengajak semua pihak untuk membantu para korban. Dalam pernyataannya bersama OASE KIM, Ibu Iriana menekankan pentingnya menghentikan kekerasan, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan menciptakan perdamaian demi masa depan yang lebih baik. Ibu Iriana juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu demi menciptakan kehidupan yang damai (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023k).
Presiden RI Joko Widodo	Kuliah Umum Presiden Joko Widodo di Georgetown University	13 November 2023	Dalam penyampaianya di kuliah umum tersebut, Presiden menyinggung mengenai perang di Gaza yang

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			mengakibatkan satu anak tewas setiap 10 menit. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan bahwa ini adalah masa kemanusiaan, dan untuk menghentikannya diperlukan solidaritas global dan kepemimpinan dunia yang mengutamakan kemanusiaan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Pers Internasional Bersama Beberapa Menlu OKI di London	22 November 2023	Salah satu hal yang disampaikan oleh Menlu Retno adalah, ia menyoroti pentingnya menghormati hukum humaniter internasional, ia menyampaikan bahwa dalam perang pun ada hukum dan aturan yang harus diikuti, salah satunya adalah perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023s).
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid	Siaran Pers di Jakarta	30 November 2023	Wakil Ketua MPR yang akrab disapa HNW ini menyampaikan bahwa saat

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			Indonesia meraih kemerdekaan, Palestina memberikan dukungannya, sehingga Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia memiliki kewajiban moral untuk membalas budi dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2023).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung	8 Januari 2024	Menlu Retno menyatakan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina, termasuk dengan memberikan pernyataan lisan (<i>advisory opinion</i>) di Mahkamah Internasional pada 19 Februari untuk mendukung posisi hukum Palestina dan memastikan PBB tidak melupakan perjuangan bangsa Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024b).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Keterangan Pers Pernyataan Komnas HAM RI Terkait Gugatan Afrika	9 Januari 2024	Komnas HAM RI mengeluarkan dua pernyataan, pertama, mendukung

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
Republik Indonesia (Komnas HAM RI)	Selatan Terhadap Israel Atas Dugaan Genosida di Gaza Palestina		langkah hukum yang diambil oleh Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ terkait dugaan genosida di Gaza, Palestina. Kedua, mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut melakukan intervensi di ICJ dengan memberikan dukungan terhadap langkah hukum Afrika Selatan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024).
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	Pernyataan kepada Parlementaria	16 Januari 2024	BKSAP DPR RI mendukung penuh gugatan Afrika Selatan ke ICJ dengan tuduhan genosida Israel di Gaza, mengingat Indonesia dan Afrika Selatan memiliki kesamaan sikap terhadap penjajahan di Palestina. Fadli Zon menegaskan bahwa Langkah Afrika Selatan ini adalah yang dinantikan masyarakat untuk menanggapi genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024a).
Presiden RI Joko Widodo	Keterangan Pers Presiden Jokowi Menentang Keras Pernyataan PM Netanyahu Soal Tidak Adanya Negara Palestina	26 Januari 2024	Presiden Jokowi menolak keras pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang menyatakan bahwa <i>two-state solution</i> tidak memiliki masa depan, menurutnya pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Kemudian Presiden juga mengecam serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang menimbulkan banyak korban, serta menegaskan bahwa Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk kepentingan Israel (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pernyataan pada Wartawan	26 Maret 2024	Setelah melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas permohonan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan, di hadapan

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			wartawan Menlu Retno menyampaikan Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi DK PBB mengenai gencatan senjata segera di Gaza (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2024f).
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid	Konferensi Pers di Sela-Sela Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Imam Palestina di Jakarta	1 April 2024	Wakil Ketua MPR HNW menegaskan bahwa MPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan konstitusi akan memastikan bahwa konstitusi Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. MPR akan terus memastikan bahwa konstitusi UUD NRI Tahun 1945 mendukung perjuangan Palestina dan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2024).
Presiden RI Joko Widodo	Pernyataan Pers Presiden Jokowi Kecam Keras Serangan Israel ke Rafah di Kota Dumai, Provinsi Riau	1 Juni 2024	Presiden Jokowi dengan tegas mengecam serangan militer Israel ke Rafah, Palestina, sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan yang terjadi. Dalam

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			<p>pernyataannya, Presiden Jokowi mengulangi sikap Indonesia yang mengemukakan keras tindakan Israel dan menekankan bahwa Israel harus mematuhi hukum internasional, termasuk perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan serangan terhadap Palestina. Kecaman ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, hukum internasional, dan perdamaian di Timur Tengah (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024d).</p>
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi	<i>Public Lecture</i> ‘Diplomasi Indonesia untuk Palestina’ di UGM	3 Juni 2024	Menlu Retno menampilkan beberapa foto situasi di Gaza, kemudian menyampaikan kuliah menjadi dua bagian, pertama tentang perkembangan situasi di Gaza, kedua bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi terhadap isu Palestina. Kemudian juga

Aktor	Kegiatan	Tanggal	Deskripsi
			Menlu Retno menyampaikan beberapa prioritas Indonesia dalam mendukung Indonesia kedepannya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024z).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi	Diskusi “Road to Platinum Jubilee” di Jakarta Jelang Peringatan 70 Tahun KAA	6 Juni 2024	Dalam sambutannya, Menlu menyampaikan bahwa resolusi konflik yang terjadi di Gaza belum terlihat hasilnya. Dan ditegaskan pula bahwa kita masih memiliki satu utang yang belum terbayarkan, yaitu kemerdekaan Palestina. Menlu juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus berusaha membantu rakyat Palestina melalui berbagai jalur, termasuk Mahkamah Internasional, OKI, PBB, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan melalui UNRWA (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ab).

Dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina, salah satu yang dilakukan Indonesia adalah menjalankan diplomasi publiknya. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina sejak tahun 2015 hingga 2024. Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap melakukan pernyataan pers mengenai situasi di Palestina, yang menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap Palestina. Presiden dan Menlu pun pernah sama-sama mengisi kuliah umum, terutama Presiden Jokowi yang mengisi kuliah umum di universitas di Amerika Serikat, yang audiensnya merupakan mahasiswa dan akademisi yang merupakan masyarakat asing. Kemudian bukan hanya Presiden yang menyuarakan mengenai Palestina, tetapi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pun menyuarakan mengenai Palestina bersama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, parlemen seperti DPR dan MPR juga ikut andil dalam mendiplomaskan mengenai Palestina, yang memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina. Bahkan lembaga seperti Komnas HAM pun menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung Palestina.

Presiden Jokowi yang mengunggah cuitannya melalui akun pribadinya, juga menunjukkan dukungan pribadi secara langsung dan dapat dilihat oleh seluruh pengguna sosial media tersebut bahkan oleh masyarakat asing, ditambah dengan penggunaan bahasa Inggris dalam cuitannya, yang bisa dimengerti oleh masyarakat asing. Presiden mengeluarkan pernyataan pers setiap kali ada hal yang terjadi di Palestina, seperti pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem, pernyataan PM Netanyahu tentang tidak adanya negara Palestina, dan tiap serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dalam pernyataan-pernyataannya, para aktor secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Palestina, mengutuk segala kejahatan Israel terhadap Palestina, mengutuk penjajahan yang terjadi di tanah Palestina sesuai dengan konstitusi Indonesia, mengajak untuk peduli akan kemanusiaan, dan menekankan pentingnya gencatan senjata.

3.2.2 Bilateral Diplomacy

Bilateral diplomacy atau diplomasi bilateral adalah negosiasi langsung antara dua negara (Rourke, 2009: p263). Dalam 'Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi' oleh Khasan Ashari, diplomasi bilateral adalah pelaksanaan hubungan diplomatik antara dua negara secara formal melalui misi diplomatik resmi dari kedua pihak dan mengedepankan

prinsip resiprositas (Ashari, 2020: p71). Istilah ini juga merujuk pada kontak diplomatik antara delegasi dua negara di sela-sela pertemuan multilateral atau biasa disebut *side diplomacy* (Ashari, 2020: p71). Diplomasi bilateral dapat membahas isu yang menjadi tema pertemuan multilateral yang sedang berlangsung maupun isu lain yang tidak terkait dengan tema pertemuan yang berlangsung (Ashari, 2020: p71-72). Diplomasi bilateral juga dikenal sebagai komunikasi antara dua pihak tanpa mendefinisikan sengketa atau metodenya, yang juga dikenal sebagai sistem diplomasi Prancis (Kastrati, 2023: p370). Diplomasi bilateral yang berhasil dapat menuju pada perjanjian bilateral, misalnya perjanjian bilateral yang mencakup perdagangan, dimana mengatur timbal balik untuk menurunkan hambatan perdagangan antara dua negara (Goldstein & Pevehouse, 2014: p298).

Dalam mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia juga menggunakan diplomasi melalui diplomasi bilateral. Pertemuan bilateral dapat dilakukan dalam sehari dengan berbagai perwakilan negara, biasanya disela-sela pertemuan atau forum multilateral internasional. Seperti pada 6 Maret 2016, dimana tanggal tersebut sedang terselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam atau KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta. Baik Presiden Jokowi maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi keduanya dijadwalkan pertemuan bilateral dengan beberapa negara. Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Kerajaan Yordania El Hassan Bin Talal dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Bersama Yordania, kedua negara membahas mengenai upaya Indonesia dan Yordania dalam meningkatkan dukungan, integritas, dan solidaritas negara-negara Islam terhadap Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016a). Sedangkan dengan Palestina, membahas berbagai isu terkait perbatasan, pemukiman illegal, pengungsi Palestina di luar Palestina, serta masalah keamanan di wilayah-wilayah yang dikuasai Israel (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016b).

Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016b). Lalu Menlu Retno sendiri melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maurithania, Menteri Luar Negeri Gambia Neneh MacDouall-Gaye, Deputy Foreign Minister Afghanistan Atiqullah Atifmal, Menteri Luar Negeri Tajikistan, Menteri Luar Negeri Republik Arab Mesir, dan Menteri

Luar Negeri Siera Leone. Pembahasan dengan keenam perwakilan negara ini menyesuaikan dengan bahasan bilateral, dengan salah satu bahasan yang hampir sama, yaitu sesuai dengan bahasan KTT-LB OKI yang sedang berlangsung, yakni kepada masing-masing perwakilan negara disampaikan untuk mendorong persatuan negara-negara anggota OKI untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian masalah Al-Quds Al-Sharif dan memperkuat peran negara Islam dalam proses perdamaian kedua negara konflik (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016c).

Selain pertemuan bilateral dengan perwakilan negara, Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan pejabat organisasi internasional. Seperti pada tanggal 2 November 2019, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres setelah sesi Pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019c). Dalam pertemuan itu, Presiden membahas mengenai isu kemanusiaan di Palestina dan Rakhine States (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2019). Keduanya bertukar pikiran mengenai kedua isu tersebut, kemudian Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia secara aktif bersedia dan memiliki kesiapan untuk berkontribusi menyelesaikan isu tersebut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019c). Sekjen PBB mengapresiasi Presiden Jokowi atas diplomasi Indonesia yang terkenal akan banyak berkontribusi dalam penyelesaian isu Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2019). Menurut Sekjen PBB, situasinya memang belum ada kemajuan yang signifikan, akan tetapi tidak boleh menyerah karena masalah tersebut terkait dengan masalah kemanusiaan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019d).

Pertemuan bilateral dapat pula dilakukan dengan cara kunjungan perwakilan negara ke Indonesia. Seperti pada tanggal 23 Mei 2023, Presiden Republik Islam Iran Seyyed Ebrahin Raisi, mengunjungi Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor untuk melakukan pertemuan bilateral (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023c). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah negara membahas berbagai hal, termasuk salah satunya bahasan mengenai kondisi geopolitik dunia (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023c). Kedua negara sepakat untuk terus mendukung perjuangan Palestina dan kedua negara

akan terus memberikan bantuan kemanusiaan (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023b).

Selain perwakilan negara lain yang mengunjungi Indonesia, dapat pula pertemuan dilakukan dengan perwakilan Indonesia yang mengunjungi negara tujuan. Hal ini dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 19 Oktober 2023, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023g). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi di Palestina, serta menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras segala bentuk penyerangan yang berdampak pada kemanusiaan (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023g). Kemudian Presiden Jokowi juga mengajak pemerintah Arab Saudi untuk bersama-sama menghentikan eskalasi agar tidak semakin meningkat, dan mendorong agar permasalahan di Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023g).

Sebagai satu-satunya negara yang diundang ke Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan bilateral di Washington DC sebelum pelaksanaan KTT APEC di San Francisco, Presiden Joko Widodo bertolak ke Washington DC pada 13 November 2023 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House (Kementerian Luar Negeri Republik, 2023). Pertemuan ini membahas dan menghasilkan sejumlah hal, yang salah satunya adalah membahas mengenai situasi di Gaza. Presiden Jokowi menyampaikan hasil keputusan dari KTT OKI Riyadh yang telah dilaksanakan pada 11 November 2023 kepada Presiden Joe Biden, yang mana secara khusus diminta oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menyampaikannya ke Presiden Joe Biden (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023s). Kedua pemimpin saling bertukar pandangan mengenai krisis yang sedang berlangsung di Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023n). Presiden Jokowi mengajak Presiden Joe Biden untuk berada di garis depan dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina berdasarkan *two-state solution*, karena menurut Presiden Jokowi, kontribusi Amerika Serikat dianggap penting dalam menciptakan

perdamaian global, dan dunia menunggu tindakan nyata dari Amerika Serikat dalam hal ini (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023r).

Presiden Jokowi juga menegaskan posisi Indonesia, meminta Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Israel agar menghentikan kekejaman di Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik, 2023). Gencatan senjata yang segera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan, dinyatakan sangat penting oleh Presiden, termasuk dimulainya kembali proses perdamaian berdasarkan *two-state solution* sesuai dengan parameter internasional yang telah disepakati (Kementerian Luar Negeri Republik, 2023).

Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *World Water Forum* ke-10 di Bali, Indonesia, Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masing-masing mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis pada 20 Mei 2024. Menlu Retno lebih dahulu bertemu dengan Presiden SMU PBB pada tanggal 19 Mei 2024. Menlu Retno mengapresiasi adopsi resolusi Majelis Umum PBB yang memberikan hak istimewa kepada Palestina yang membuatnya hampir setara dengan negara anggota lainnya, yang juga dinilai sebagai langkah signifikan dalam mendorong hak kesetaraan bagi Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024w). Namun, Menlu Retno menyampaikan bahwa hanya dengan resolusi ini saja tidaklah cukup, lebih lanjut ia mengatakan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan, serta mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB harus terus dilanjutkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024w).

Pada keesokan harinya, yaitu 20 Mei 2024, giliran Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden SMU PBB Dennis Francis. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi kemajuan di Majelis Umum PBB terkait status Palestina, namun menekankan perlunya tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan konflik (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024c). Presiden Jokowi menyampaikan agar akar konflik, yaitu pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina, harus diselesaikan (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024c). Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi badan-badan PBB untuk membantu rakyat

Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024c). Presiden Majelis Umum PBB menanggapi bahwa MU PBB telah memberikan rekomendasi kuat kepada DK PBB untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Palestina, dan PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi dua negara untuk Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024c).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga kerap kali melakukan pertemuan bilateral di sela-sela kegiatan konferensi, sidang, maupun forum internasional, seperti yang dilakukan Menlu Retno saat menghadiri KTT OKI ke-15 di Banjul, Gambia pada tanggal 4-5 Mei 2024. Di sela-sela KTT OKI tersebut, Menlu Retno melakukan 12 pertemuan bilateral, yakni dengan Sekjen OKI, Advisor Presiden Palestina, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Mesir, Menteri Luar Negeri Iran, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Menteri Luar Negeri Tunisia, Menteri Luar Negeri Gambia, Menteri Luar Negeri Maroko, Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, dan Wakil Perdana Menteri Uganda (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024s). Hampir seluruh pertemuan fokus pada isu Palestina dengan beberapa poin utama: proses negosiasi yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan hasil yang positif, termasuk kemungkinan terjadinya gencatan senjata; perlunya upaya berkelanjutan untuk mendorong negara lain mengakui Palestina; dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB; peningkatan upaya bantuan kemanusiaan; dan kekhawatiran mendalam mengenai rencana Israel untuk menyerang Raffah yang dikecam oleh semua negara anggota OKI (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024s).

Tabel 3.5 Diplomasi Bilateral Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan PM Palestina Rami Hamdallah di Sela-Sela Rangkaian Acara KTT Asia Afrika ke-60 di Jakarta	21 April 2015	Dalam pertemuan bilateral tersebut membahas berbagai hal, salah satunya yaitu mengenai Presiden Jokowi yang menyampaikan kepada PM Rami Hamdallah bahwa setelah ini akan ada pertemuan lebih lanjut untuk Palestina, agar segera mengakhiri penjajahan di Palestina. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya, serta berjuang untuk keanggotaan penuh di PBB (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015a).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Pangeran Kerajaan Yordania, El	6 Maret 2016	Dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas salah satunya

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Hassan Bin Talal di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta		mengenai upaya Indonesia dan Yordania dalam meningkatkan dukungan, integritas, dan solidaritas negara-negara Islam terhadap Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016a).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	6 Maret 2016	Pertemuan bilateral ini membahas berbagai isu terkait perbatasan, pemukiman ilegal, pengungsi Palestina di luar Palestina, serta masalah keamanan di wilayah-wilayah yang dikuasai Israel. Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016b).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Mauritania di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	6 Maret 2016	Pertemuan bilateral ini membahas sesuai dengan bahasan KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, dengan fokus utama mendorong persatuan negara-negara anggota OKI dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian masalah Al-Quds Al-Sharif (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Gambia Neneh MacDouall-Gaye di Sela- Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	6 Maret 2016	Pertemuan bilateral antara kedua menteri ini salah satunya membahas isu Palestina, dengan mendorong persatuan negara- negara anggota OKI dalam mendukung kemerdekaan Palestina (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016d).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Deputy Foreign Minister Afghanistan, Atiqullah Atifmal di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	6 Maret 2016	Dalam pertemuan bilateral ini dibahas mengenai dorongan untuk menyatukan negara-negara anggota OKI untuk mendukung kemerdekaan Palestina, serta meningkatkan peran negara-negara Islam dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016g).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tajikistan di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	6 Maret 2016	Pertemuan bilateral ini membahas mengenai mendorong kesatuan antara negara-negara anggota OKI untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan memperkuat peran negara-negara Islam dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016e).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Arab Mesir di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	6 Maret 2016	Dalam pertemuan bilateral ini, disampaikan bahwa Indonesia prihatin terhadap kekerasan yang terjadi di Palestina, penyelenggaraan KTT ini menunjukkan dukungan dan solidaritas penuh dari Indonesia dan OKI untuk Palestina, mendukung inisiatif baru yang mendorong perdamaian global, dan mendorong negara-negara Islam anggota OKI untuk secara aktif terlibat dalam upaya perdamaian Palestina (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016f).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Siera Leone di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	6 Maret 2016	Disebutkan bahwa pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Siera Leone tidak jauh berbeda dengan pertemuan bilateral lainnya yakni membahas

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			isu Palestina yang menjadi bahasan dalam KTT-LB OKI ke-5 (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016c).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Kehormatan/Pertemuan Bilateral Ketua Dewan Negara (Chairman of State Council) Oman, Yahya Bin Mahfoodh Bin Salim di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	7 Maret 2016	Indonesia dan Oman sepakat untuk terus mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Kemudian dibahas juga dukungan dan solidaritas terhadap Palestina, serta peningkatan peran negara Islam dalam proses perdamaian Palestina dan Israel (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016e).
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla	Kunjungan Kehormatan/Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri Republik Tunisia Kheimaies Jhinaoui di Sela-Sela KTT-LB OKI ke-5 di Jakarta	7 Maret 2016	Isu Palestina dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wapres dan Menlu Tunisia. Wapres menekankan bahwa KTT negara-negara Islam sangat penting untuk menyatukan pandangan, dukungan, dan solidaritas anggota

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			OKI terhadap Palestina. KTT ini meningkatkan peran negara-negara Islam dalam mencari solusi untuk isu Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016f).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sudan	7 Maret 2016	Kedua kepala negara sepakat memberi dukungan untuk Palestina, serta membahas pentingnya negara-negara Islam berperan dalam proses perdamaian Palestina-Israel (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016h).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Pertemuan Bilateral dengan PM Shahid Khaqan Abbasi di Islamabad, Pakistan	27 Januari 2018	Terdapat tiga isu bilateral utama yang difokuskan, salah satunya adalah kerja sama untuk Palestina. Pada akhir pertemuan, Presiden Jokowi mengajak untuk memberikan dukungan bersama kepada Palestina, dan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			meningkatkan PM Abbasi bahwa lobi untuk mendapatkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina harus terus dilakukan dimanapun kedua pemimpin berada (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018a).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Ketua Senat Parlemen Republik Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev di Istana Merdeka, Jakarta	13 Maret 2018	Dalam pertemuan bilateral ini, Indonesia melalui Presiden Jokowi mengajak Kazakhstan untuk bekerja sama, memperkuat kerja sama mereka khususnya dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018b).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Resmi Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, ke Istana Kepresidenan Bogor	31 Agustus 2018	Dalam kesempatan ini, kedua belah negara membahas berbagai hal, salah satunya komitmen kuat Indonesia-Australia untuk terus bekerja sama dalam menangani

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			isu-isu regional dan global, yang salah satunya yaitu isu Palestina (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018c).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison di Sela-Sela Rangkaian Acara Pertemuan ASEAN di Singapura	14 November 2018	Presiden Jokowi kembali menegaskan sikap Indonesia dan berharap Australia dapat berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel berdasarkan <i>two-state solution</i> (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018e).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres Selepas Sesi Pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand	2 November 2019	Presiden Jokowi membicarakan isu krisis kemanusiaan di Palestina dan Rakhine State, dan Presiden menyampaikan pandangannya tentang situasi terkini terkait isu tersebut. Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			penyelesaian konflik (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019d).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan President of the 75th Session UNGA dan juga sebagai President for the UN Security Council	19 Mei 2021	Dalam pertemuan ini dibahas mengenai Debat Sidang Majelis Umum PBB mengenai Palestina yang akan diselenggarakan pada 20 Mei 2021. Menlu Retno menekankan pentingnya DK PBB satu suara dan segera bertindak mengatasi situasi di Palestina (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2021).
Ketua DPR RI Puan Maharani	Pertemuan Bilateral dengan Ketua Parlemen Aljazair Speaker National Assembly of Algeria Ibrahim Boughal di Sela-Sela Konferensi PUIC Ke-17 di Aljazair	30 Januari 2023	Dalam pertemuan, isu Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas, mengingatkan kesamaan pandangan antara Indonesia dan Aljazair. Puan menekankan pentingnya terus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui proses

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			perdamaian dan negosiasi multilateral yang kredibel (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023d).
Ketua DPR RI Puan Maharani	Pertemuan Bilateral dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di Sela-Sela Konferensi PUIC Ke-17 di Aljazair	30 Januari 2023	Dalam pertemuan dibahas mengenai isu Palestina, dan Puan menyatakan keprihatinannya atas berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh Israel. Ia berpandangan bahwa perlu segera mengakhiri pendudukan ilegal Israel di Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023d).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Presiden Republik Islam Iran, Seyyed Ebrahim Raisi, di Istana Kepresidenan Bogor	23 Mei 2023	Kedua negara membahas mengenai situasi geopolitik dunia, kemudian sepakat untuk terus mendukung perjuangan Palestina dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan (Laman

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Kedatangan Menteri Luar Negeri Turki Dr. Hakan Fidan ke Jakarta	15 Juli 2023	Kedua Menlu membahas beberapa hal, salah satunya isu Palestina. Kedua Menlu akan terus bekerja sama dalam memajukan isu-isu kepentingan bersama, dan kedua negara memiliki posisi prinsip yang sama, yaitu menginginkan kebebasan untuk Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023d)
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, di Istana Merdeka, Jakarta	7 Agustus 2023	Terdapat empat bahasan dalam pertemuan ini, yang salah satunya adalah bahasan mengenai isu Palestina. Sekjen OKI menghargai posisi Indonesia yang selama ini membela kepentingan perjuangan Palestina (Laman

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023d).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi (KAS) Mohammed bin Salman Al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh	19 Oktober 2023	Presiden Jokowi mengajak pemerintah Arab Saudi untuk bersama-sama menghentikan eskalasi agar tidak semakin meningkat, dan mendorong agar permasalahan di Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023g).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Kedatangan Menteri Luar Negeri Lithuania Gabreilius Landsbergis ke Jakarta	30 Oktober 2023	Kedua Menlu bertukar pandangan mengenai situasi yang memburuk di Gaza. Menlu Retno mengajak Lithuania untuk ikut mendesak penghentian segera serangan terhadap warga sipil, serta memastikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan tanpa

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			hambatan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023i).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Kedatangan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot ke Jakarta	31 Oktober 2023	Kedua Menlu melanjutkan diskusi di New York mengenai situasi yang memburuk di Gaza. Menlu Retno mengatakan bahwa isu kemanusiaan harus menjadi fokus utama kita semua saat ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023k).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Sela-Sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi	11 November 2023	Kedua Presiden sepakat untuk bekerja sama untuk terus menyelesaikan masalah Gaza dan mendukung mewujudkan kemerdekaan Palestina. Presiden Jokowi menekankan OKI harus mendesak gencatan senjata. Kedua Presiden juga menyebutkan bahwa kedua negara terus berupaya aktif berkontribusi

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			menyelesaikan masalah di Gaza (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023a).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, di Sela-Sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi	11 November 2023	Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia dan Yordania satu pandangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, serta menyampaikan pentingnya kesatuan OKI untuk menjadi bagian dari solusi (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023o).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Bilateral Presiden RI ke Washington DC kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden	13 November 2023	Presiden Jokowi menyampaikan hasil dari KTT OKI Riyadh kepada Presiden Joe Biden sesuai dengan permintaan Presiden Palestina. Presiden Jokowi juga meminta Presiden Joe Biden untuk berada di garis depan untuk membela kemanusiaan bagi Palestina, dan meminta AS

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan Israel melakukan kekejaman di Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik, 2023).
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin	Pertemuan dengan Wakil Ketua 1 Parlemen Yunani, Ioannis Plakiotakis, di Hellenic Parliament, Athena, Yunani	22 November 2023	Pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai dukungan untuk mempercepat penyelesaian konflik Israel-Palestina. Wapres menyampaikan bahwa Pemerintah Yunani setuju untuk segera diakhirinnya peperangan tersebut. Kedua negara memiliki prinsip dan pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023b).
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin	Pertemuan dengan Uskup Agung Athena, His Beatitude Ieronymos II, di Holy Archdiocese of Athens	23 November 2023	Wapres menyampaikan duka cita atas serangan udara Israel terhadap Gereja Ortodoks Yunani, Santo Porfirius, di Gaza pada 19

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Oktober 2023. Wapres juga mengajak para pemimpin agama yang hadir dalam pertemuan ini untuk berkontribusi dalam meredam eskalasi konflik (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023c).
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin	Pertemuan Bilateral dengan Presiden Slovakia, Zuzana Čaputová, di Istana Presiden Slovakia	27 November 2023	Wapres mengungkapkan keprihatiannya terhadap perlakuan kurang baik yang masih sering dialami perempuan terutama dalam situasi konflik di Gaza. Ia mengajak pemimpin seluruh dunia untuk bersama-sama menyuarakan perdamaian demi bermasyarakat yang damai dan sejahtera.(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023d).
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin	Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia	28 November 2023	Wapres sempat membahas konflik Israel Palestina bersama PM

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Anwar Ibrahim di Kuching, Malaysia		Malaysia. Malaysia memiliki kesamaan pandangan dengan Indonesia, menyerukan agar perang segera di akhiri dan mendorong agar konflik diselesaikan secara permanen (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023f).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Negara Inggris untuk PBB, Lord Ahmad of Wimbledon	29 November 2023	Beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup upaya memastikan kelangsungan bantuan kemanusiaan ke Gaza, memanfaatkan situasi sebagai kesempatan untuk mendorong <i>two-state solution</i> , serta pentingnya memberikan dukungan kepada Palestinian Authority (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023u).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di Expo City Dubai	2 Desember 2023	Presiden menegaskan sikap tegas Indonesia terhadap kekerasan Israel dan mendukung penyelidikan internasional atas pelanggaran Israel, dan menyerukan penghentian kekerasan secara permanen. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan masuk dengan aman dan tanpa hambatan ke Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023v).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	<i>Courtesy Call</i> Delegasi Norwegia	7 Desember 2023	Menlu Retno kedatangan delegasi Norwegia untuk 17th Human Rights Dialogue dan membahas isu Gaza (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Phone Call dengan EU HR/VP Josep Borrell	7 Desember 2023	Menlu mendiskusikan situasi di Gaza bersama EU HR/VP, dan menyampaikan dukungannya

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			terhadap surat Sekjen PBB kepada Presiden DK PBB yang menekankan pentingnya <i>humanitarian ceasefire</i> di Gaza (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	<i>Courtesy Call</i> Duta Besar Prancis yang Terakreditasi dengan Negara ASEAN	8 Desember 2023	Dalam pertemuan salah satu yang dibahas adalah situasi di Gaza yang memburuk. Indonesia meminta Prancis untuk memberikan dukungannya terhadap rencana Resolusi tentang Gaza yang akan dibahas di DK PBB pada 8 Desember (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023d).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Commissioner-General UNRWA	13 Desember 2023	Indonesia mendukung UNRWA dengan memberikan kontribusi 3 kali lipat. UNRWA sendiri juga mengharapkan Indonesia menggunakan pengaruhnya agar

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			UNRWA mendapat dukungan dari negara lain (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023e).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran	13 Desember 2023	Menlu membahas dan mendiskusikan isu Gaza, kemudian sepakat mengenai <i>ceasefire</i> dan sepakat untuk bekerja sama dalam membantu Palestina (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023e).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Tokyo	16 Desember 2023	Dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal, salah satunya Presiden Jokowi mengangkat isu Palestina. Presiden menekankan tiga hal penting, yaitu upaya gencatan senjata permanen, bantuan kemanusiaan berkelanjutan, dan mendorong proses damai penyelesaian dua negara (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023u).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menlu Aljazair Ahmed Attaf di Aljir, Aljazair	20 Desember 2023	Kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam membela keadilan dan kemanusiaan Palestina, dan meminta Aljazair untuk terus membawa kepentingan Palestina dalam berbagai pertemuan DK PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023aa).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Kehormatan kepada Presiden Aljazair Abdelmajid Tebboune	20 Desember 2023	Dalam pertemuan dengan Presiden Aljazair, Menlu kembali membahas isu Palestina dan menekankan bahwa kedua negara akan terus bersatu dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023aa).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tunisia Nabil Ammar, Courtesy Call	21 Desember 2023	Indonesia dan Tunisia memiliki pandangan yang sama untuk selalu membela keadilan dan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	dengan Presiden Tunisia Kais Saied dan Perdana Menteri Tunisia Ahmed Hachani		kemanusiaan Palestina. Keduanya sepakat untuk bekerja sama untuk membela rakyat Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023ab).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko di Rabat	22 Desember 2023	Kedua Menlu mendiskusikan secara mendalam mengenai isu Palestina. Maroko memegang peran penting dalam isu Palestina, dikarenakan Maroko menjadi Ketua Komite OKI dan Ketua KTM Liga Arab. Indonesia meminta Maroko untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023ac).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo dalam format	9 Januari 2024	Kedua Menlu membahas mengenai isu global, salah satunya isu Palestina. Menlu

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC)		menegaskan bahwa kekejaman Israel harus dihentikan, dan menyampaikan bahwa posisi Indonesia konsisten dalam membela keadilan dan kemanusiaan Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024d).
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin	Kunjungan Kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Kerajaan Arab Saudi Waleed bin Abdul Karim El-Khereji, di Istana Wakil Presiden	11 Januari 2024	Wapres menyampaikan keprihatinannya atas situasi di Gaza. Wamenlu Arab mengatakan bahwa Arab Saudi berkomitmen untuk mengupayakan kebebasan Palestina dari Israel (Laman Resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, 2024).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menlu Lebanon, Menlu Rusia, Menlu Norwegia, Menlu Aljazair, Menlu Palestina, Menlu Austria, Menlu Yordania, dan Presiden	23 Januari 2024	Masing-masing pertemuan utamanya membahas kondisi di Gaza, dengan penekanan pada upaya mendorong gencatan senjata segera serta pengiriman

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Palang Merah Internasional (ICRC) di Sela-Sela Open Debate DK PBB		bantuan kemanusiaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Tanzania, Samia Suluhu Hassan, di Istana Kepresidenan Bogor	25 Januari 2024	Kedua pemimpin negara membahas situasi di Palestina. Kedua negara memiliki posisi yang sama, dan akan terus saling berkoordinasi untuk mendukung perjuangan Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot	31 Januari 2024	Kedua Menlu membahas mengenai situasi di Palestina, dan menyangkan Belanda menanggukkan dukungan mereka terhadap UNRWA. Menlu Retno menekankan untuk melakukan investigasi menyeluruh mengenai tuduhan UNRWA, dan menyampaikan bahwa penanggukan dukungan ke

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			UNRWA hanya akan memperburuk kondisi kemanusiaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024i).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belgia, Slovenia, Hongaria, Swedia, Rumania, Finlandia, Polandia, Italia, HRVP Uni Eropa	2 Februari 2024	Dalam masing-masing pertemuan bilateral, dibahas mengenai isu Palestina, dan Menlu Retno menekankan urgensi untuk segera melakukan gencatan senjata serta memberikan dukungan kepada UNRWA (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024j).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan PM/Menlu Qatar	19 Februari 2024	Dalam pertemuan bilateral dengan PM Qatar, pembahasan utamanya yaitu mengenai perkembangan di Gaza Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024k).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Menlu Yordania	22 Februari 2024	Menlu Retno membahas pentingnya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan ke Gaza. Selain itu, kedua Menlu juga melakukan <i>compare notes</i> elemen-elemen kunci untuk saling memperkuat argumen yang disampaikan dalam <i>oral statement</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran di Sela-Sela Sidang Dewan HAM PBB	26 Februari 2024	Dalam pertemuan bilateral ini pembahasan utamanya adalah mengenai situasi di Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024o).
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin	Pertemuan Bilateral dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Winston Peters	28 Februari 2024	Wapres mengangkat pembahasan mengenai Palestina bersama pemerintah NZ. Wapres juga mengajak NZ untuk menggalang bantuan kemanusiaan untuk

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Palestina (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan State Minister Inggris untuk isu Indo-Pasifik, RT. Hon Anne-Marie Trevelyan, MP di Jakarta	29 Februari 2024	Dalam pertemuan ini membahas isu Palestina, dan Menlu Retno menekankan urgensinya gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan untuk Gaza (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2024a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan UN Assistant Secretary-General for the Middle East, Asia & the Pacific, Mr. Khaled Khiari di Jakarta	14 Maret 2024	Menlu Retno dan Mr Khaled membahas mengenai berbagai tantangan dunia, salah satunya situasi di Gaza (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2024c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Deputi Perdana Menteri/Menlu Selandia Baru, Hon. Winston Peters di Jakarta	14 Maret 2024	Kedua perwakilan negara membahas situasi di Gaza, dan Menlu Retno menegaskan kembali pentingnya gencatan senjata, akses kemanusiaan, dan komitmen terhadap <i>two-state</i>

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon	Pertemuan Bilateral dengan Direktur UNRWA Marta Lorenzo Rodriguez dan Chief of Staff UNRWA Ben Majekodunmi di Sela-Sela Persidangan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148	23 Maret 2024	<p><i>solution</i> (Akun Instagram Menu RI Retno Marsudi, 2024d).</p> <p>Kedua pihak membahas mengenai tantangan organisasi kemanusiaan di tengah blokade sepihak oleh Israel. DPR RI mengutuk keras tindakan Israel yang memblokade akses kemanusiaan ditengah kondisi masyarakat Palestina yang buruk (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024c).</p>
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon	Pertemuan Bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Swedia Kerstin Lundgren di Sela-Sela Persidangan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148	24 Maret 2024	DPR RI kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan mengecam berbagai tindakan Israel. Sebagai negara UE yang pertama mengakui Palestina sebagai negara, Swedia mendorong implementasi two-state solution untuk menyelesaikan konflik antara

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Israel dan Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon	Pertemuan Bilateral dengan Parlemen Australia diwakili Ketua Delegasi Senator Deborah O'Neill di Sela-Sela Persidangan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148	25 Maret 2024	Pertemuan ini salah satunya membahas mengenai Palestina, dan DPR RI dianggap mampu menjadi perantara antar kelompok geopolitik dalam situasi debat sengit seperti pembahasan isu darurat terkait Palestina. Kedua delegasi parlemen sepakat kedepannya untuk komunikasi yang intensif untuk isu Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Kedatangan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi ke Jakarta	18 April 2024	Menlu Retno menjelaskan upaya diplomatik Indonesia dalam penyelesaian masalah Gaza. Kedua negara memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya gencatan senjata dan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			<i>two-state solution</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024r).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Kedatangan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi ke Jakarta	18 April 2024	Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada pihak yang ingin melihat eskalasi lebih lanjut. Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa RRT akan menggunakan pengaruhnya untuk mencegah terjadinya eskalasi (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pembicaraan dan Pertemuan dengan Sekjen OKI; Advisor Presiden Palestina; Menlu Arab Saudi; Menlu Mesir; Menlu Iran; Menlu Bangladesh; Menlu Tunisia; Menlu Gambia; Menlu Maroko; Menlu Malaysia; Menlu Brunei Darussalam, dan Wakil	4-5 Mei 2024	Hampir setiap pertemuan membahas mengenai isu Palestina, dengan fokus pada: negosiasi yang sedang berlangsung agar terciptanya gencatan senjata, upaya mendorong negara lain untuk mengakui Palestina, upaya keanggotaan penuh Palestina di

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Perdana Menteri Uganda di Sela-Sela KTT OKI di Banjul, Gambia		PBB, bantuan kemanusiaan yang lebih intensif, dan kekhawatiran akan Israel yang ingin menyerang Rafah (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024s).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Presiden SMU PBB ke-78 Dennis Francis di Sela-Sela World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Indonesia	19 Mei 2024	Menlu Retno menyampaikan bahwa hanya dengan adopsi resolusi saja tidaklah cukup, lebih lanjut ia mengatakan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan, serta mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB harus terus dilanjutkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024w).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa	20 Mei 2024	Presiden Jokowi menekankan perlunya tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan konflik.

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	(PBB), Dennis Francis di BICC, Bali, Indonesia		Presiden Jokowi menyampaikan agar akar konflik, yaitu pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina, harus diselesaikan, dan menekankan pentingnya memperkuat koordinasi badan-badan PBB untuk membantu rakyat Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan High Representative/Vice President European Commission Josep Borrel di Sela-Sela Ministerial Level Meeting the Follow-Up of the Riyadh Meeting Brussels	26 Mei 2024	Dalam pertemuan bilateral dengan VP European Commission, Menlu Retno mendiskusikan mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan <i>two-state solutions</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024y).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Spanyol di Sela-Sela Ministerial Level	26 Mei 2024	Dalam pertemuan bilateral ini membahas pengakuan Spanyol terhadap Palestina dan harapan agar negara-negara Uni Eropa

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Meeting the Follow-Up of the Riyadh Meeting Brussels		lainnya dapat mengikuti langkah ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024y).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Irlandia di Sela-Sela Ministerial Level Meeting the Follow-Up of the Riyadh Meeting Brussels	26 Mei 2024	Pertemuan bilateral dengan Irlandia serupa seperti yang dilakukan dengan Menlu Spanyol, mengenai pengakuan Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024y).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Norwegia di Sela-Sela Ministerial Level Meeting the Follow-Up of the Riyadh Meeting Brussels	26 Mei 2024	Pertemuan bilateral dengan Norwegia mendiskusikan bagaimana memanfaatkan momentum saat ini untuk mendorong lebih banyak negara mengakui Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024y).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Luksemburg di Sela-Sela Ministerial Level	26 Mei 2024	Dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Luksemburg, Menlu Retno secara khusus mendorong Luksemburg untuk mengakui

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Meeting the Follow-Up of the Riyadh Meeting Brussels		Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024y).
Ketua DPR RI Puan Maharani	Pertemuan Bilateral dengan Ketua Parlemen Tiongkok, Zhao Leji di Kompleks Gedung Great Hall of The People (Balai Agung Rakyat) Tiongkok	28 Mei 2024	Ketua DPR Puan mengharapkan dukungan Parlemen Tiongkok untuk segera memulai gencatan senjata permanen dan mengimplementasikan <i>two-state solution</i> . Kedua negara juga perlu sepakat untuk menggunakan pengaruhnya dalam mencegah eskalasi dan mendukung Palestina masuk sebagai anggota PBB (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024d).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Resmi Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent Biruta di Jakarta	6 Juni 2024	Kedua Menteri Luar Negeri mendiskusikan masalah global, khususnya terkait Palestina. Indonesia dan Rwanda memiliki pandangan yang sama untuk terus memperkuat dukungan demi

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui <i>two-state solution</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ac).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Courtesy Call dengan Perdana Menteri Norwegia di Oslo, Norwegia	11 Juni 2024	Pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah seputar Palestina, khususnya mengenai kerja bersama untuk menggalang dukungan agar lebih banyak negara memberikan pengakuan kepada Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ae).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen di Helsinki, Finlandia	13 Juni 2024	Saat masuk pembahasan isu global, isu Palestina dibahas cukup panjang. Menlu Retno menyampaikan harapannya agar Finlandia segera mengakui Palestina. Menlu Retno juga mengapresiasi Finlandia karena

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			sempat membekukan dukungan ke UNRWA, namun sekarang sudah dijalankan kembali (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024af).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Kehormatan kepada Presiden Finlandia Alexander Stubb di Helsinki, Finlandia	13 Juni 2024	Pertemuan bilateral dengan Presiden Finlandia hanya berfokus pada isu internasional terutama Palestina. Menlu Retno membahas mengenai pengakuan Palestina sebagai negara. Presiden Finlandia pun mengatakan bahwa negaranya akan menunggu waktu yang tepat untuk mengakui Palestina, sehingga Menlu Retno mengatakan pada Presiden Finlandia bahwa Indonesia akan terus memantau posisi Finlandia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024af).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg di Wina, Austria	25 Juni 2024	Dalam pertemuan dibahas isu Palestina, dan Menlu mendorong Austria untuk mempertimbangkan mengakui Palestina. Menlu Retno juga mengapresiasi bantuan Austria yang diberikan ke UNRWA yang sempat dihentikan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ah).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, di Ljubljana, Slovenia	26 Juni 2024	Menlu Retno mengapresiasi Slovenia atas keputusannya untuk mengakui Palestina sebagai negara dan juga mengapresiasi Slovenia yang konsisten dalam mendukung Palestina. Kedua negara pun sepakat untuk bekerja sama dalam hal memperjuangkan hak-hak Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ai).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan PM Qatar di Sela-Sela 3rd Meeting of Special Envoys on Afghanistan/Doha III	1 Juli 2024	Dalam pertemuan dengan PM Qatar, Menlu Retno secara khusus membahas perkembangan situasi di Gaza serta langkah-langkah perdamaian yang dapat didorong. Indonesia dan Qatar berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024aj).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Kehormatan Menlu RI kepada Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim di Putra Jaya, Malaysia	3 Juli 2024	Kedua perwakilan negara membahas mengenai keprihatinan kedua negara terhadap situasi di Gaza, dan kedua negara juga memiliki posisi yang sama untuk membela kemanusiaan bangsa Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ak).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia,	3 Juli 2024	Dalam pertemuan bilateral juga dibahas isu Palestina. Kedua

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan di Putra Jaya, Malaysia		negara berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan sepakat untuk bersikap tegas dan aktif di berbagai forum internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ak).
Presiden RI Joko Widodo	Kunjungan Grand Syekh Al Azhar, Prof. Ahmed Mohammed Ahmed Al-Thayeb ke Jakarta	9 Juli 2024	Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perang yang terjadi di Gaza penting untuk terus disuarakan gencatan senjata dan mempermudah penyaluran bantuan serta perwujudan perdamaian (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2024e).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Bilateral dengan Deputy Prime Minister/Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam format Joint Ministerial Commission	30 Juli 2024	Menlu Retno dan Menlu Selandia Baru membahas berbagai isu bilateral, dan juga membahas isu kawasan dan global, salah satunya adalah isu Palestina (Kementerian

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	(JMC) di Auckland, Selandia Baru		Luar Negeri Republik Indonesia, 2024bf).
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury	Kunjungan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council (GCC), Jasem Mohamed A.A. Albudaiwi, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta	31 Juli 2024	Saat pembahasan isu Palestina, Wamenlu mengajak GCC untuk terus mendesak penghentian kekerasan oleh Israel terhadap warga Palestina, tercapainya gencatan senjata yang berkelanjutan, kelancaran bantuan kemanusiaan, dan dimulai kembali proses perdamaian menuju <i>two-state solution</i> , serta diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024bg).

Dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia aktif menjalankan diplomasi bilateral dengan berbagai negara. Melalui tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina sejak tahun 2015 hingga 2024 melalui jalur diplomasi bilateral. Dibuktikan dengan banyaknya serangkaian pertemuan bilateral, baik melakukan kunjungan ke negara lain, maupun kunjungan kedatangan, bahkan diantaranya merupakan pertemuan di sela-sela forum atau pertemuan organisasi internasional. Banyak dari diantara pertemuan-pertemuan tersebut yang membahas hal-hal lain, akan tetapi para aktor tetap menyelipkan pembahasan mengenai isu Palestina dalam pertemuan.

Disini, parlemen Indonesia juga berperan dalam berjalannya diplomasi bilateral, yang memperkuat dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Beberapa dari pertemuan-pertemuan diatas, kedua negara bahkan bekerja sama untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dalam semua pertemuan, yang paling sering dibahas adalah mengenai gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang lancar, pendanaan untuk UNRWA, mendukung Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan mengakui Palestina sebagai negara. Indonesia juga mendapatkan penghargaan atas konsistensinya dalam mendukung dan memperjuangkan Palestina di dunia internasional

3.2.3 Multilateral Diplomacy

Jika diplomasi bilateral dilakukan oleh dua negara, maka diplomasi multilateral atau *multilateral diplomacy* dilakukan setidaknya tiga negara, dan lebih banyak dilakukan melalui forum atau konferensi dunia (Ashari, 2020: p331). Diplomasi multilateral dilakukan dengan mekanisme yang bersifat *ad hoc* ataupun berkelanjutan untuk membahas isu yang menjadi permasalahan di dunia (Ashari, 2020: p331). Diplomasi multilateral ini juga berkembang bersamaan dengan *open diplomacy*, karena pembahasan dalam forum internasional ini bersifat terbuka dan beberapa isu melibatkan aktor non-negara, berbeda dengan diplomasi bilateral yang sifatnya lebih tertutup (Ashari, 2020: p331-332). Multilateralisme telah menjadi aspek penting dalam politik internasional, dengan meningkatnya peran diplomasi multilateral di negara-negara merdeka yang berkembang (Pujayanti, 2012: p116). Diplomasi ini dijalankan melalui organisasi internasional, pertemuan, dan konvensi yang mereka selenggarakan, oleh karena itu

salah satu komponen kunci dari diplomasi multilateral adalah forum-forum konferensi internasional (Pujayanti, 2012).

Diplomasi multilateral sangat kompleks, ditandai dari panjangnya waktu persidangan, banyaknya pihak yang terlibat, beragamnya isu dan kepentingan, serta faktor lainnya (Pujayanti, 2012: p117). Tantangan penting dalam diplomasi multilateral adalah mencapai kesepakatan ketika banyak pihak terlibat dan isu yang dibahas beragam (Pujayanti, 2012: p117). Kompleksitas persidangan di forum internasional tidak hanya disebabkan oleh aturan yang baku, tetapi juga oleh lamanya pembahasan akibat berbagai kepentingan dari setiap negara (Pujayanti, 2012: p117). Meskipun begitu, negosiasi dan diplomasi tetap menjadi elemen utama dalam setiap persidangan internasional (Pujayanti, 2012: p118).

Salah satu organisasi multilateral adalah PBB, yang keanggotaannya mencakup sebagian besar negara (Kaufman, 2022: p182), yang mana PBB dirancang untuk menjadi pusat diplomasi multilateral di dunia pascaperang politik (Pease, 2019: p22). Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional telah diakui karena beberapa diantaranya berhasil menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara (Pujayanti, 2012: p116). Sistem multilateral telah berkembang pesat, tidak seperti di masa lalu selama tahun-tahun antara dua Perang Dunia, ketika LBB terbukti tidak efektif. Piagam PBB menyediakan kerangka kerja konseptual dan operasional untuk hubungan kerja sama antar negara-negara, begitu juga dengan lembaga-lembaga multilateral lain yang menyatukan negara-negara, mulai dari GNB, OAU, dan semua pengelompokan regional yang beragam, hingga WTO dan sejenisnya (Rana, 2007: p23). Diplomasi multilateral memiliki potensi keberhasilan negosiasi lebih besar dibandingkan model diplomasi lainnya, karena negara-negara yang terlibat lebih memprioritaskan pencapaian kepentingan bersama daripada kekuasaan, dan kesepakatan yang dicapai melalui diplomasi multilateral cenderung lebih bertahan lama (Alexandra & Mujiono, 2019: p77). Dalam diplomasi multilateral terdapat prosedur pengambilan keputusan, berupa melalui veto, suara terbanyak, ataupun konsesus (Alexandra & Mujiono, 2019: p77). Berikut beberapa organisasi internasional sebagai bagian dari diplomasi multilateral yang Indonesia menjadi anggota didalamnya.

a. United Nations (UN)

United Nations (UN) atau dalam bahasa Indonesia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945, dengan anggota saat ini sebanyak 193 negara, dan pekerjaannya dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam (*Charter*) pendiriannya (United Nations, n.d.-a). PBB merupakan tempat satu-satunya di dunia dimana semua negara di dunia dapat berkumpul bersama, mendiskusikan masalah bersama, dan menemukan solusi bersama yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia (United Nations, n.d.-a). Ketika Perang Dunia II akan berakhir pada tahun 1945, perwakilan dari 50 negara berkumpul di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Francisco untuk menyusun dan menandatangani Piagam PBB, yang bertujuan mencegah perang dunia lainnya (United Nations, n.d.-b). Empat bulan setelah konferensi tersebut berakhir, pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi berdiri setelah Piagamnya diratifikasi oleh Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan mayoritas penandatanganan lainnya (United Nations, n.d.-b). Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950. Sejak itu, PBB telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan, memperkuat demokrasi, dan mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 (The United Nations in Indonesia, n.d.). Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam berbagai lembaga di bawah naungan PBB, seperti ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), dan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

ICJ atau International Court of Justice atau Mahkamah Internasional adalah pengadilan tertinggi serta organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan didirikan untuk menyelesaikan perselisihan antar negara setelah Perang Dunia Kedua (BBC News, 2024). ICJ juga berfungsi untuk memberikan pendapat penasihat tentang masalah hukum, yang juga dilakukan untuk Israel (BBC News, 2024). ICJ tidak dapat mengadili individu atas kejahatan dengan tingkat kejahatan tertinggi seperti genosida, tidak seperti ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional (BBC News, 2024). Saat ini, kasus yang dilayangkan oleh Afrika Selatan masuk dalam status *pending cases* yang

mana sedang didengarkan atau sedang dalam pertimbangan (International Court of Justice, 2024).

b. Organisation of Islamic Cooperation (OIC)

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau dalam bahasa Indonesia Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan salah satu forum internasional dimana Indonesia dapat melakukan diplomasi bilateral. Berdasarkan laman resmi OKI, OKI merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di empat benua, dan sebuah organisasi suara kolektif dunia Muslim (Organisation of Islamic Cooperation, n.d.). OKI didirikan berdasarkan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Islam Pertama yang diadakan di Rabat pada 22-25 September 1969, atas reaksi Dunia Islam terhadap serangan pembakaran Masjid Al-Aqsa, situs suci ketiga dalam Islam yang terletak di Yerusalem yang diduduki Israel, oleh seorang ekstremis Yahudi Australia pada 21 Agustus 1969 (Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs, n.d.). Di bawah bendera perjuangan umat Islam, organisasi ini berjanji untuk menghapus segregasi rasial dan diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan bangsa Palestina (Encyclopedia Britannica, 2024b).

OKI memiliki beberapa tujuan dibentuk, salah satunya adalah mendukung perdamaian dan keamanan global dan melindungi tempat suci Islam dan membantu rakyat Palestina dalam berjuang, kemudian berdasarkan *OIC-2025 Programme of Action* isu Palestina menjadi salah satu isu prioritas, dan dalam KTT Islam di Makkah pada tahun 2019, OKI mengesahkan Resolusi Palestina dan Al Quds Al Sharif (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022e). Dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri, dipaparkan beberapa kiprah Indonesia di OKI: OKI menjadi salah satu forum yang dimanfaatkan Indonesia untuk menyuarakan dukungannya terhadap rakyat Palestina, dan Indonesia juga menjadi anggota Committee on Al-Quds (Yerusalem) OKI yang didirikan pada tahun 1975.

Pada 25 April 2022, Indonesia berinisiatif menyelenggarakan *Open-ended Extraordinary Meeting of the OIC Executive Committee at the level of Permanent Representatives* di Markas OKI yang berlokasi di Jeddah, yang bertujuan untuk menanggapi kekerasan yang dilakukan aparat dan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al Aqsa selama bulan Ramadhan 2022; menyepakati Final Communique yang berisi penegasan bahwa Masjid Al Aqsa adalah *red line* bagi OKI, dan OKI tidak akan mentoleransi perubahan status atas Masjid (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022e).

c. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh negara-negara pendiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (ASEAN Main Portal, n.d.). Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada 7 Januari 1984, diikuti oleh Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada 30 April 1999, sehingga membentuk sepuluh negara anggota ASEAN yang ada saat ini (ASEAN Main Portal, n.d.).

ASEAN sendiri menyerukan agar Israel dan Palestina untuk mengambil Langkah positif menuju negosiasi demi perdamaian, dimana desakan ini disampaikan dalam Pernyataan Ketua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-41 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat (Kompas.com, 2023). Pernyataan tersebut berisi desakan ASEAN kepada kedua pihak untuk secara aktif mengambil langkah positif yang memungkinkan negosiasi dan bekerja sama untuk memulai kembali negosiasi demi mencapai perdamaian abadi, ASEAN juga beranggapan perlu solusi yang adil bagi kedua pihak untuk tercapainya perdamaian (Kompas.com, 2023).

d. Inter-Parliamentary Union (IPU)

Inter-Parliamentary Union atau IPU adalah organisasi global untuk parlemen nasional yang diinisiasi tahun 1889 oleh sekelompok kecil anggota parlemen yang didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian melalui diplomasi dan dialog parlemen, hingga berkembang menjadi organisasi global (Inter-Parliamentary Union, n.d.). IPU memfasilitasi

diplomasi parlemen dan memberdayakan parlemen maupun anggota parlemen untuk mempromosikan perdamaian, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, dengan slogan *'For democracy. For everyone'* (Inter-Parliamentary Union, n.d.). IPU secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu internasional dan demokrasi, dengan tujuan memberikan saran konkret atau dorongan kepada pemerintah masing-masing atau organisasi internasional jika diperlukan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022d). IPU diakui secara signifikan oleh PBB dengan status observer pada tahun 2002, dengan hak khusus yang sangat luar biasa dimana IPU dapat mendistribusikan dokumen di Sidang Umum PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022d).

Indonesia sendiri telah menjadi anggota IPU sejak 1959 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022d). Keanggotaan parlemen Indonesia di IPU dianggap bermanfaat dalam pelaksanaan diplomasi parlemen untuk kepentingan nasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022d). Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI telah berkontribusi signifikan dalam mendukung tujuan dan kepentingan nasional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022d). DPR RI aktif dalam forum-forum kerja sama parlemen multilateral terutama melalui IPU, dalam membahas isu-isu tata kelola pemerintahan yang demokratis, pemajuan perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan isu-isu lain yang menjadi kepentingan nasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022d).

3.2.3.1 Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia mengambil kesempatan untuk menyampaikan kepada dunia tentang dukungan Indonesia kepada Palestina, dengan menuliskan surat berisi ketersediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT-LB OKI, dengan dasar bersedia atas bentuk dukungan kepada Palestina dan mengkhawatirkan situasi Al-Quds (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016a). Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) OKI ke-5 yang berlangsung pada tanggal 6-7 Maret 2016 di Jakarta menghasilkan pemikiran dan komitmen seluruh negara anggota yang dirumuskan menjadi Deklarasi Jakarta, yang mencerminkan komitmen

yang kuat untuk mengakhiri penindasan dan ketidakadilan yang dialami suatu bangsa oleh bangsa lain yang telah berlangsung lama, dan masih belum ada titik terang menuju berakhirnya ketidakadilan tersebut (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016h).

Deklarasi Jakarta berisikan 23 butir komitmen OKI, dimana butir-butir komitmen tersebut merupakan gagasan dari Indonesia yang bercermin dan sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016h). Deklarasi Jakarta ini dinamakan '*Jakarta Declaration on Palestine and Al-Quds Al-Sharif*', salah satu poinnya, berbunyi '*uniting efforts to end the Israeli occupation of the State of Palestine, occupied since 1967, including Al-Quds Al-Sharif*' (Jakarta Declaration on Palestine and Al-Quds Al-Sharif, 2016). KTT-LB tersebut diadakan untuk menunjukkan komitmen dan keprihatinan negara anggota terhadap situasi yang dihadapi bangsa Palestina, dimana perjuangan Palestina belum mencapai hasil yang diharapkan, rasa kemanusiaan terusik, bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tetapi untuk menegakkan keadilan dan hak asasi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016h). Masalah di Palestina bukan hanya soal agama, tetapi juga sosial dan politik, bukan hanya masalah dua negara yang memperebutkan sebuah wilayah, tetapi juga sudah menjadi masalah dunia yang melibatkan banyak negara di dunia dalam upaya penyelesaiannya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016h).

Dalam Open Debate Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 Januari 2023, Menlu Retno mengatakan bahwa 2023 harus menjadi tahun kemajuan dalam penyelesaian isu Palestina dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mengakhiri okupasi Israel selamanya. Menlu Retno juga menyoroti tiga hal mengenai isu Palestina: Indonesia menyambut baik Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum dari ICJ tentang dampak hukum pendudukan Israel di Palestina; Langkah konkret diperlukan untuk mencapai perdamaian, meminta Israel menghentikan provokasi, mematuhi hukum internasional, dan melanjutkan proses damai menuju solusi dua negara; bantuan kemanusiaan sangat penting bagi lebih dari dua juta rakyat Palestina yang memerlukan, dan kita tidak boleh tinggal diam di situasi sulit ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023a).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 11 November 2023 yang digelar sebagai tanggapan terhadap situasi di Gaza, Palestina yang disebabkan oleh Israel (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023m). KTT tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, beserta beberapa pejabat yang turut mendampingi Presiden Jokowi (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023p). Presiden Jokowi menganggap KTT tersebut sangat penting sebagai upaya kolektif untuk menghentikan serangan Israel terhadap Palestina, serta Presiden akan mempertegas seruan untuk segera melakukan gencatan senjata dan memperluas bantuan kemanusiaan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023a). Presiden Jokowi dalam pernyataan nasionalnya menyampaikan bahwa OKI harus bersatu dan memimpin upaya penyelesaian krisis di Gaza, serta mengusulkan beberapa saran, yaitu (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023n):

1. Mendesak gencatan senjata segera, menolak klaim Israel tentang *self-defence*
2. Mempercepat dan memperluas bantuan kemanusiaan dengan mekanisme yang lebih terprediksi dan berkelanjutan, serta mencatat bahwa Indonesia telah mengirim bantuan dan akan meningkatkan lagi, serta menyebutkan contoh dimana Israel menargetkan Rumah Sakit Indonesia yang menyebabkan rumah sakit kehabisan bahan bakar sehingga pelayanan terhadap masyarakat berkurang
3. Menuntut pertanggungjawaban Israel atas kekejaman kemanusiaan dengan mendesak akses bagi Independent National Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB untuk menjalankan mandatnya dan mendukung proses *advisory opinion* di ICJ
4. Mendorong dimulainya kembali perundingan damai untuk mencapai solusi dua negara dan Presiden menolak solusi satu negara karena Palestina yang akan dirugikan, dan Indonesia siap berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina.

Presiden menutup pernyataannya dengan penegasan pentingnya persatuan OKI dan penggunaan semua cara damai dan diplomasi untuk keadilan bagi Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023l). KTT ini menghasilkan Resolusi yang memuat 31 keputusan dengan pesan-pesan

yang sangat kuat dan tegas, dan dianggap oleh hampir semua anggota OKI sebagai pesan paling keras yang pernah dikeluarkan oleh OKI, serta Resolusi ini juga mencerminkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023m).

Salah satu isi keputusan dari Resolusi adalah diberikannya mandat kepada beberapa Menlu anggota OKI untuk memulai aksi atas nama OKI dan memulai proses perdamaian (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023m). Presiden Jokowi dalam keterangan persnya mengatakan bahwa ia memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang telah dipilih oleh para pemimpin OKI sebagai salah satu Menlu yang dipercayakan untuk mengupayakan perdamaian di Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023q). Setelah dari Riyadh, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk kunjungan bilateral ke Amerika Serikat, oleh karena itu Presiden akan menyampaikan hasil KTT OKI Riyadh kepada Presiden Joe Biden untuk penyelesaian konflik di Gaza (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menghadiri Open Debate Dewan Keamanan PBB di New York pada 23 Januari 2024. Dalam pernyataannya, Menlu Retno menekankan bahwa Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk mentoleransi perang atau genosida (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Ia juga mengingatkan bahwa piagam PBB secara tegas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dipatuhi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Menlu menanyakan kepada Dewan Keamanan berapa banyak resolusi tentang Palestina yang telah diadopsi dan seberapa banyak yang telah dilaksanakan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Pertanyaan tersebut sengaja diajukan oleh Menlu karena melihat banyaknya resolusi tentang Palestina yang dilanggar tanpa adanya sanksi terhadap pelanggar (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g).

Dalam pernyataannya juga, Menlu menyoroti kemana Palestina bisa mengadu jika Dewan Keamanan selama puluhan tahun gagal melaksanakan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa diberikan hukuman (Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia, 2024g). Menlu mendesak kembali anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan penderitaan yang dialami warga Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Ia juga bertanya kepada Dewan Keamanan, apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah hilang, ditambah dengan banyaknya korban kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, belum cukup untuk mendorong tindakan segera (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Menlu menekankan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum humaniter internasional, termasuk dalam situasi di Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g).

Lebih lanjut, Menlu mengingatkan dimana Perdana Menteri Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina berdiri, yang menunjukkan niat Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia, dan mempertanyakan apakah DK PBB akan diam saja menghadapi hal ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Di tengah ancaman perang terbuka di Timur Tengah yang semakin nyata, Menlu menekankan pentingnya tiga hal: segera terciptanya gencatan senjata permanen untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai rekonstruksi pasca-konflik, dan mendukung *two-state solution*; Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB untuk mewujudkan *two-state solution* yang adil dan mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel; menghentikan pasokan senjata ke Israel, karena senjata tersebut digunakan untuk membunuh warga sipil (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g).

Menlu menegaskan Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak ada negara yang kebal akan hukum (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Menlu juga menyampaikan mengenai Indonesia yang akan menyampaikan pernyataan lisannya untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional terkait masalah ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g). Menlu pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengambil langkah-langkah untuk mendukung Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g).

Dalam video yang beredar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta beberapa perwakilan negara lain melakukan *walk out* atau keluar dari ruangan saat Perwakilan Tetap Israel untuk PBB Gilad Erdan

menyampaikan pernyataannya di Open Debate DK PBB (Kompas.com, 2024). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Menlu Retno dan beberapa negara OKI keluar ruangan saat perwakilan tetap Israel menyampaikan pernyataannya, yang mana hal serupa terjadi, saat Menlu Retno dan negara OKI menyampaikan pernyataan, wakil Israel tidak berada di ruangan (Radio Republik Indonesia, 2024a). Aksi Menlu Retno tersebut didukung oleh Wakil Presiden RI dan Wakil BKSAP DPR RI.

Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menanggapi bahwa sikap Menlu menunjukkan sikap kita yang tidak setuju dengan pendapat Israel, serta aksi Menlu tersebut dinilai mencerminkan ketegasan dalam menentang penjajahan Israel di Palestina (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024a). Kemudian Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta, merespon aksi *walk out* Menlu dengan mengapresiasi dan mendukung Kemenlu yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, serta menegaskan bahwa secara diplomasi Indonesia harus terus melakukan langkah kreatif dan upaya lobi intensif terhadap negara-negara yang masih mendukung Israel agar mereka menghentikan tindakan kejam Israel terhadap Palestina (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024b).

Kemudian Indonesia dalam upaya mendukung kemerdekaan Indonesia secara tegas, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan *oral statement* atau pandangan lisan pemerintah Indonesia di International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional dalam sesi *advisory opinion* terkait dengan konsekuensi hukum dari kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n). Sebelumnya, Majelis Umum PBB meminta nasihat hukum (*advisory opinion*) dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai dampak hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, yang permintaan ini diajukan oleh Majelis Umum ke ICJ pada 17 Januari 2023 (CNBC Indonesia, 2024).

Menanggapi permintaan tersebut, Indonesia sejak awal memutuskan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan hukum kepada ICJ. Pandangan Indonesia disampaikan melalui dua cara. *Pertama*, pernyataan tertulis yang telah dikirimkan ke ICJ pada Juli 2023, dan *kedua*, pernyataan

lisan yang disampaikan oleh Menlu RI pada 23 Februari 2024 (Metro TV, 2024). Menlu mengatakan bahwa tampilnya Indonesia di hadapan Mahkamah Internasional akan melengkapi berbagai upaya diplomasi Indonesia dalam mendukung Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024e). Untuk mempersiapkan pernyataan tersebut, Menlu mengumpulkan masukan dari pakar hukum internasional melalui diskusi bertema ‘Advisory Opinion di Mahkamah Internasional: Upaya Mendukung Kemerdekaan Palestina melalui Penegakan Hukum Internasional’ yang diadakan di kantor Kemlu, Jakarta (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024e). Menlu Retno menjelaskan bahwa pandangan dan masukan dari para ahli hukum internasional sangat diperlukan untuk membangun *legal opinion* yang komprehensif dan sesuai dengan hukum internasional, guna memperlihatkan kepada dunia pelanggaran hukum internasional yang jelas dilakukan Israel terhadap Palestina (tvOneNews, 2024).

Menlu menyampaikan *oral statement*-nya pada 23 Februari 2024 di Den Haag, Belanda. Terdapat dua aspek dalam pandangan lisan Indonesia, pertama, penegasan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi untuk memberikan *advisory opinion*, kedua, penegasan bahwa berbagai kebijakan Israel melanggar hukum internasional diikuti dengan penjelasan mengenai konsekuensi hukumnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n). Argumen pertama yang terkait dengan yurisdiksi, sesuai dengan yang dipaparkan sebelumnya, ICJ memiliki yurisdiksi untuk memberikan *advisory opinion*, sehingga tidak ada alasan bagi ICJ untuk tidak memberikan opini, karena hal ini sudah sesuai dengan yurisdiksi hukum ICJ (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n).

Ada tiga alasan dibalik argumen tersebut, pertama, pemberian fatwa hukum tidak akan mengganggu proses negosiasi yang sedang berlangsung, sebaliknya justru Israel terus melanggar hukum internasional dan mengabaikan keputusan Dewan Keamanan PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m). Kedua, Menlu menegaskan bahwa fatwa hukum Mahkamah Internasional tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan akhir dari konflik saat ini, karena solusi konflik hanya dapat dicapai melalui perundingan, namun fatwa hukum tersebut akan membantu Majelis Umum PBB dalam mengambil tindakan sesuai dengan fungsinya terkait konflik Israel-Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m). Ketiga, fatwa hukum dari Mahkamah

Internasional akan mendukung proses perdamaian dengan mempresentasikan elemen hukum tambahan untuk penyelesaian konflik secara menyeluruh (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m).

Kemudian argumen kedua, yang membahas substansi dari *advisory opinion* itu sendiri, disampaikan oleh Menlu bahwa mahkamah dengan tegas telah menyatakan bahwa hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) Palestina bukan lagi menjadi isu, artinya hak ini telah diakui sebagai hak sah bangsa Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n). Pernyataan ini diperkuat oleh berbagai keputusan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n). Dalam pernyataannya, Menlu menekankan bahwa Israel terus melanggar hukum internasional melalui berbagai kebijakannya di Wilayah Pendudukan Palestina (Occupied Palestine Territory/OPT) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n). Menlu menyebut pemenuhan hak untuk penentuan nasib sendiri ini sebagai kewajiban *erga omnes*, atau kewajiban yang berlaku bagi semua (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n).

Untuk argumen tersebut, Menlu mengemukakan empat alasan, pertama, pendudukan Israel terjadi sebagai hasil dari penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m). Kedua, Israel telah melakukan aneksasi ilegal terhadap Wilayah Pendudukan Palestina (OPT), dan Menlu menambahkan argumen ini bahwa pemerintah pendudukan seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk membuat pendudukannya bersifat sementara, tetapi Israel telah menjadikannya permanen dan bahkan mencaplok sebagian dari wilayah pendudukan tersebut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m). Ketiga, Israel terus memperluas pemukiman ilegal. Kebijakan Israel yang memindahkan penduduknya ke wilayah pendudukan dan secara paksa mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, dan yang dilanggar oleh Israel adalah artikel 49 Fourth Geneva Convention, dimana Israel adalah negara pihak konvensi (*state party*) tersebut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m). Keempat, Israel menerapkan kebijakan apartheid terhadap warga Palestina, dengan menerapkan dua rezim kebijakan yang berbeda untuk *Jewish Israeli settlers* dan warga Palestina, yang mana ini merupakan

pelanggaran hukum internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m).

Menlu mengakhiri pernyataan lisan Indonesia dengan menegaskan bahwa tidak ada negara yang ada di atas hukum, setiap individu tanpa terkecuali, dilindungi oleh hukum(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n). Menlu juga menekankan bahwa masyarakat internasional tidak boleh terus membiarkan Israel melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024n). Menlu menutup pernyataan lisannya dengan menyampaikan bahwa dunia dan masyarakat internasional menaruh harapan besar pada Mahkamah Internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m).

Tabel 3.6 Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Presiden RI Joko Widodo	KTT Asia Afrika ke-60 di Jakarta	22-23 April 2015	Dalam pembukaan KTT, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita dan dunia masih berhutang pada Palestina yang belum merdeka. Presiden mengajak untuk berjuang dan mendukung negara Palestina yang merdeka (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015b).
Presiden RI Joko Widodo	Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) ke-5 di Jakarta	6-7 Maret 2016	Presiden menyampaikan bahwa dunia Islam masih memiliki hutang kemerdekaan untuk Palestina. Presiden mengajak masyarakat internasional bersatu untuk memperjuangkan Palestina, dan meminta negara-negara OKI menjadi bagian dari solusi dari isu Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016c).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Presiden RI Joko Widodo	Penunjukan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina	7 Maret 2016	Dalam KTT-LB OKI di Jakarta, Presiden Jokowi melantik Maha Abou Susheh sebagai Konsul Kehormatan RI untuk Palestina sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016d).
Presiden RI Joko Widodo	Sidang Pleno KTT ASEAN-Rusia ke-20 di Rusia	20 Mei 2016	Presiden menyampaikan pandangannya bahwa konflik Palestina-Israel perlu segera diselesaikan dan kemerdekaan Palestina harus diwujudkan (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016i).
Presiden RI Joko Widodo	KTT ASEAN-PBB di Vientiane, Laos	7 September 2016	Presiden mengajak ASEAN dan PBB bekerja sama untuk memperluas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			mengajak dimulainya perundingan <i>two-state solution</i> (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016i).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di Istanbul, Turki	1 Agustus 2017	Menlu Retno menekankan pentingnya negara anggota OKI memanfaatkan berbagai forum termasuk DK PBB untuk menekan Israel mematuhi resolusi PBB terkait Palestina. Menlu juga mengusulkan agar OKI segera meminta Dewan HAM PBB di Jenewa untuk mengadakan pertemuan khusus membahas pelanggaran HAM di Al-Aqsa (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	50th ASEAN Foreign Ministers' Meeting (50th AMM) di Filipina	6 Agustus 2017	Atas inisiatif Indonesia, ASEAN telah sepakat untuk mengeluarkan pernyataan bersama mengenai

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			situasi di Kompleks Masjid Al-Aqsa (Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, 2017).
Presiden RI Joko Widodo	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN-PBB Manila, Filipina	13 November 2017	Presiden Jokowi meminta PBB agar lebih berperan aktif dalam membantu mewujudkan impian rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan penuh (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017b).
Presiden RI Joko Widodo	KTT-LB OKI di Istanbul, Turki	13 Desember 2017	Presiden Jokowi menolak keras pengakuan Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Presiden mengajak untuk bersatu membela Palestina, dan menyampaikan usulan enam poin penting sikap negara OKI (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017d).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan Trilateral (Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan) Ulama di Istana Kepresidenan Bogor	11 Mei 2018	Pertemuan ini diadakan ditengah rencana pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden mendesak DK dan MU PBB, serta meminta negara lain untuk tidak mengikuti tindakan AS (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018b).
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla	KTT-LB OKI di Istanbul, Turki	18 Mei 2018	Wapres meminta persamaan sikap dan bersatu untuk mendukung Palestina. Wapres juga mengatakan bahwa OKI bertemu hanya untuk bicara, tetapi juga harus bertindak (Laman Resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, 2018).
Indonesian Ambassador to the UN Dian Triansyah Djani	General Assembly of the United Nations/Majelis Umum PBB di New York	13 Juni 2018	Delegasi Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dalam memberikan dukungan dan berperan sebagai <i>co-sponsor</i> utama untuk resolusi yang disahkan, yaitu

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			resolusi mengenai perlindungan warga sipil Palestina. Resolusi ini sempat ditolak dan diajukan kembali atas inisiatif Indonesia bersama Turki dan Aljazair (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018c).
Presiden RI Joko Widodo	Pertemuan ASEAN-Rusia	14 November 2018	Presiden menyinggung tentang permasalahan terkait Palestina yang masih berlangsung, dan meyakinkan kemitraan ASEAN-Rusia dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah Palestina (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018e).
Presiden RI Joko Widodo	KTT ke-6 ASEAN-AS di Singapura	15 November 2018	Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu perdamaian antara Palestina dan Israel dengan berlandaskan <i>two-state solution</i>

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018f).
Presiden RI Joko Widodo	Lunch Retreat KTT Asia Timur di Singapura	15 November 2018	Presiden Jokowi mengajak negara-negara Asia Timur untuk mengambil langkah konstruktif yang dapat mendukung perdamaian di Palestina dan Israel berdasarkan <i>two-state solution</i> (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018d).
Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir	Pertemuan DK PBB Mengenai Palestina di Markas PBB New York	26 Maret 2019	Indonesia mengancam kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, dan menentang Dataran Tinggi Golan diakui milik Israel. Wamenlu meminta DK PBB untuk terus memantau perkembangan di Palestina untuk menghindari eskalasi konflik (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019a).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	United Nations (UN) Forum on Palestine di Markas PBB	4 April 2019	Menlu Retno mendesak negara-negara lain untuk menentang aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. Menlu juga menyampaikan agar negara-negara PBB tidak memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem dan menghormati resolusi DK PBB mengenai isu Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Arria Formula di New York	9 Mei 2019	Menlu Retno menyampaikan bahwa untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina perlu tekanan besar dari masyarakat internasional (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019c).
Ketua Delegasi RI, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik,	Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestine	3-4 Juli 2019	Ketua Delegasi RI menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia aktif dalam memberikan penguatan kapasitas untuk mendukung

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
<p>Kemlu RI, Cecep Herawan</p> <p>Dubes RI untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto</p>	<p>Development (CEAPAD) di Ramallah, Palestina</p>		<p>pembangunan manusia dan ekonomi di Palestina. Dubes RI untuk Palestina juga menyebutkan beberapa proyek yang sedang dilakukan Indonesia untuk Palestina di berbagai bidang (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina, 2019).</p>
<p>Duta Besar Utusan Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani</p>	<p>Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang Situasi di Timur Tengah</p>	<p>28 Oktober 2019</p>	<p>Indonesia terus menyatakan dukungan tegas bagi kemerdekaan Palestina dan mengajak dunia internasional untuk mendukung UNRWA dalam memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina. Indonesia juga mendorong semua kelompok perjuangan Palestina bekerja lebih keras dalam mencapai rekonsiliasi</p>

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			(Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, 2019).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	ASEM FMM (Asia Europe Meeting-Foreign Ministers Meeting) di Madrid, Spanyol	16 Desember 2019	Menlu Retno menyampaikan bahwa 51 negara anggota ASEM seharusnya bisa berperan sebagai kekuatan penyangga multilateralisme yang bisa membantu rakyat Palestina dalam mendapatkan hak-haknya (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2019).
Duta Besar Utusan Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani	Open Debate DK PBB	23 April 2020	Indonesia mendesak DK PBB untuk segera menghentikan rencana Israel melakukan aneksasi formal terhadap wilayah Palestina, dan menghentikan pembangunan pemukiman ilegal di tanah Palestina. Wapar RI juga mengajak masyarakat internasional untuk

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			mendukung UNRWA (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	10 Juni 2020	Menlu Retno mengajak negara anggota OKI untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan dalam menolak aneksasi Israel terhadap Palestina melalui tiga cara (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Extraordinary Virtual Ministerial Pledging Conference for UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)	23 Juni 2020	Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan bantuan untuk Palestina, baik secara langsung kepada pemerintah Palestina maupun melalui UNRWA dan ICRC, sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap Palestina (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020c).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	21st ASEAN Political – Security Community (APSC) Meeting	24 Juni 2020	Menlu Retno mengimbau negara-negara dan organisasi internasional untuk mencegah terjadinya aneksasi Israel ke Palestina. Menlu juga mengajak untuk bertindak secara kolektif untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menolak pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan ke-35 Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC)	24 Juni 2020	Menlu Retno mengajak secara kolektif negara-negara anggota ASEAN untuk bertindak mendukung Palestina dan menolak aneksasi Israel ke Palestina (Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, 2020).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	UNSC VTC Meeting on the Palestinian Question	25 Juni 2020	Menlu mengajak untuk memobilisasi dukungan untuk

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			rakyat Palestina (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2020).
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani	Save the Children	14 Agustus 2020	Watap menyampaikan bahwa anak-anak merupakan korban paling rentan terkena dampak dari konflik di Palestina, sehingga masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi bagi masa depan mereka (Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, 2020a).
Presiden RI Joko Widodo	Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	23 September 2020	Presiden menyinggung tentang Palestina yang belum merdeka dan dukungan konsisten Indonesia untuk Palestina. Presiden juga menyampaikan beberapa pemikirannya, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			solusi dan perdamaian (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2020).
Presiden RI Joko Widodo	Pesan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina	29 November 2020	Pada penutup pidato, Presiden mengajak masyarakat internasional untuk terus mendukung perjuangan Palestina dan memastikan tercapainya <i>two-state solution</i> (Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, 2020b).
Ambassador of the Republic of Indonesia to the United Nations Mohammad K. Koba	United Nations Security Council Open Debate (VTC) on the Situation in Middle East, including the Palestinian Question	16 Mei 2021	Perwakilan RI menyampaikan beberapa hal, diantaranya mendesak DKK PBB untuk memastikan Israel agar patuh terhadap hukum internasional, mengajak masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Perwakilan juga berharap masyarakat internasional dan DK

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			memenuhi tanggung jawabnya dan menghentikan agresi (Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations New York, 2021).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York	20 Mei 2021	Menlu Retno menyerukan tiga langkah yang perlu dilakukan PBB: hentikan kekerasan dan segera berlakukan gencatan senjata di Palestina, pastikan akses bagi bantuan kemanusiaan, dorong negosiasi multilateral yang kredibel. Menlu juga mengajak para negara untuk berkomitmen dan bersatu untuk melawan aksi Israel terhadap Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	KTM Mid-Term GNB	13-14 Juli 2021	Menlu menyampaikan bahwa semua negara anggota GNB harus

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			mengakui Palestina, mendukung dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel, dan memastikan akses bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021b).
Presiden RI Joko Widodo	Sidang Majelis Umum Ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	23 September 2021	Presiden menyampaikan berbagai hal, salah satunya mengenai kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan. Presiden menekankan jawaban dari langkah nyata adalah kewajiban kita (negara-negara) (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2021d).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Tingkat Menteri GNB di New York	24 September 2022	Menlu menyampaikan penyebab mengapa isu Palestina masih menjadi agenda GNB adalah karena

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			belum terselesaikannya antara komitmen dan tindakan nyata GNB. Ia mengatakan bahwa GNB hanya berbicara, tapi tidak bertindak (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022c).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon	Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-16 di Istanbul, Turki	9-10 Desember 2021	Fadli Zon mengajak PUIC untuk mendorong PBB untuk menerapkan resolusi tentang Palestina, dan penting untuk PUIC untuk menjadi yang terdepan dalam menyuarakan masalah ini (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021).
Wakil Tetap Indonesia untuk OKI, Duta Besar Eko Hartono	Pertemuan Luar Biasa Tingkat Wakil Tetap Negara Anggota OKI (The Open-Ended Meeting of the Executive Committee at the Level of Permanent Representatives) di Markas OKI, Jeddah, Arab Saudi	25 April 2022	Indonesia mengajak semua anggota OKI untuk memanfaatkan berbagai jalur komunikasi guna menghentikan agresi Israel, memastikan bahwa isu Palestina tetap menjadi fokus perhatian internasional, mendorong

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			dlanjutkannya proses perdamaian dan negara anggota OKI terus mendukung dan membantu Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Tingkat Menteri Mengenai UNRWA di New York	22 September 2022	Menlu Retno mengajak dunia internasional bekerja sama untuk ikut serta membantu UNRWA, karena para pengungsi Palestina berhak hidup selayaknya seperti yang kita jalani. Mendukung UNRWA adalah bagian dari solusi isu Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Open Debate DK PBB	18 Januari 2023	Menlu Retno menyoroti tiga hal mengenai isu Palestina: Indonesia menyambut baik Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum dari ICJ, meminta Israel menghentikan provokasi,

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			mematuhi hukum internasional, dan melanjutkan proses damai menuju solusi dua negara; bantuan kemanusiaan sangat penting bagi rakyat Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023a).
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Jazuli Juwaini	The 17th Session of the PUIC Conference: Sesi The 11th Meeting of the PUIC Standing Committee on Palestine di Aljir, Aljazair	26 Januari 2023	Delri menekankan bahwa Israel selaku pelaku kejahatan harus dihukum dan meminta PBB konsisten menerapkan resolusi terkait Palestina, serta menyampaikan pentingnya nyawa warga Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023d).
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez	The 17th Session of the PUIC Conference: Sesi 9th Meeting of the PUIC Specialized Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions di Aljir, Aljazair	28 Januari 2023	Gilang menyoroti pentingnya resolusi untuk melindungi Al-Aqsa dari ancaman Israel, dan mengancam kunjungan Menhan Israel ke kompleks tersebut karena berpotensi mengganggu status quo dan memicu

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			ketegangan. Ia juga mendesak komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023d).
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Eema Umiyatul Chusnah	The 17th Session of the PUIC Conference: Sesi 10th Session of the PUIC Conference of Muslim Women Parliamentarians di Aljir, Aljazair	28 Januari 2023	Ia berpendapat tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, dan mendesak PUIC dan organisasi lainnya untuk menekan Israel menghentikan tindakan yang tidak manusiawi. Ia juga meminta semua anggota parlemen PUIC untuk lebih lantang menyuarakan hak Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023d).
Ketua DPR RI Puan Maharani	The 17th Session of the PUIC Conference: Inaugural Session di Aljir, Aljazair	29 Januari 2023	Ketua DPR mengingatkan situasi di Palestina yang tak banyak berubah, kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus berlanjut. Ia

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			menyampaikan bahwa harapan untuk berdirinya negara Palestina yang dijanjikan oleh dunia internasional tampaknya masih jauh dari kenyataan (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023d).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Para Menlu (FMM) G20 di New Delhi, India	2 Maret 2023	Menlu Retnpo mengingatkan dalam hal kemanusiaan beberapa negara telah mengabaikan dan menerapkan standar ganda terkait isu kemanusiaan di Palestina. Menlu menyampaikan ketidakadilan ini harus segera diakhiri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023b).
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera	The 146th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Committee on Middle East Questions di Manama, Bahrain	12 Maret 2023	Wakil Ketua BKSAP Ali Sera mengusulkan untuk mendukung secara penuh untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan berharap komite ini dapat

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			berkontribusi dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023a).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon	The 146th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): General Debate di Manama, Bahrain	13 Maret 2023	Ketua BSKAP Fadli Zon mengingatkan bahwa dunia masih diskriminatif dan yang paling memprihatinkan adalah ketidakadilan global yang masih bertahan, yang telah menyebabkan penderitaan kolektif yang berat bagi rakyat Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023a).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon	The 146th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Parliamentary Network of Non-Aligned Movement di Manama, Bahrain	13 Maret 2023	Ketua BSKAP Fadli Zon menekankan perlunya PN-NAM (Konferensi Jaringan Parlemen GNB) untuk mengambil sikap politik yang tegas mengenai nasib Palestina. Diharapkan dukungan PN-NAM terhadap kemerdekaan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Palestina dapat memperkuat posisi tawar organisasi tersebut (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023a).
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Tri Tharyat	Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-49 OKI di Nouakchott, Mauritania	16-17 Maret 2023	Dirjen Tri Tharyat menyampaikan secara tegas bahwa pentingnya persatuan OKI dan perlunya mengambil langkah nyata untuk mendukung Palestina, termasuk memberikan dukungan untuk <i>advisory opinion</i> dari ICJ (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023c).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon	Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Negara-negara OKI (Executive Committee of Parliamentary Union of the OIC Member States) di Abidjan, Pantai Gading	17 Juli 2023	Ketua BKSAP Fadli Zon mendesak PUIC untuk segera mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan yang berulang. Ia juga mengajak rekan-rekan parlemen OKI untuk mendorong pemerintah

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			mereka masing-masing agar memberikan dukungan penuh bagi Palestina dalam usaha mencapai status keanggotaan penuh di PBB (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Koordinasi Tahunan Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di New York	21 September 2023	Pembahasan mengenai Palestina diawali Menlu Retno dengan pertanyaan “apakah yang kita lakukan untuk Palestina sudah cukup?”. Menlu berharap bahwa kita (negara OKI) tidak lupa untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023e).
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	Parliamentary Forum on LiFE (Lifestyle for Environment), Agenda 9th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di New Delhi, India	13 Oktober 2023	Ketua BKSAP Fadli Zon mengkritik tanggapan global yang tidak objektif terhadap situasi di Gaza. Ia menyesalkan bahwa yang terjadi di Gaza merupakan akibat

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			dari sikap diam komunitas internasional dan PBB. Ia menyerukan kepada dunia untuk mendesak Israel agar mengakhiri tindakannya (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah	18 Oktober 2023	Indonesia menegaskan bahwa OKI harus mengirimkan pesan yang kuat serta memobilisasi dukungan internasional untuk menangani situasi di Gaza, dengan tiga fokus utama. Indonesia kembali mengingatkan bahwa OKI dibentuk dengan tujuan membebaskan Palestina (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Kerajaan Arab Saudi, 2023).
Presiden RI Joko Widodo	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN – Gulf Cooperation Council (GCC)	20 Oktober 2023	Presiden kembali menekankan bahwa kekerasan di Gaza harus dihentikan, dan isu kemanusiaan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			harus menjadi fokus utama. Ia mengajak ASEAN dan GCC untuk bersatu mencegah situasi agar tidak semakin memburuk (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023i).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Sambutan Menlu RI pada Peringatan UN Day	24 Oktober 2023	Peringatan <i>UN Day</i> tahun itu berlangsung ditengah situasi global yang tidak baik-baik saja. Menlu Retno menyampaikan bahwa situasi di Gaza dan respon lambat dari PBB menjadi pengingat tentang pentingnya reformasi menyeluruh agar memberikan manfaat nyata bagi permasalahan dunia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023f).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	High-Level Open Debate UN Security Council on the Situation in	24 Oktober 2023	Menlu Retno mempertanyakan tanggung jawab dan kapan Dewan akan menghentikan perang di Gaza.

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	the Middle East Including the Palestinian Question di New York		Ia secara tegas meminta untuk menghentikan pendudukan ilegal Israel. Ia juga menyerukan tiga hal kepada Dewan, dan mengatakan bahwa DK PBB memiliki kekuatan yang besar, membuat tanggung jawab yang besar pula untuk menangani situasi di Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023g).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	The 147th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Sesi General Debate di Luanda, Angola	24 Oktober 2023	Ketua BKSAP Fadli mengajak semua negara terutama negara Barat untuk melihat situasi di Gaza secara objektif dan tidak menerapkan standar ganda. Ia juga mendesak semua pihak agar menekankan Israel untuk menghentikan serangan, dan meminta negara-negara Barat untuk berhenti mendukung Israel (Badan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023c).
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Sukamta	The 147th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Sesi Standing Committee on Peace and International Security di Luanda, Angola	26 Oktober 2023	Wakil BKSAP menyinggung tentang penjajahan Israel ke Palestina, yang mana tindakan Israel tersebut melanggar hukum internasional, dimana hal tersebut justru didukung oleh negara-negara Barat (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023c).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	The 147th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Sesi Standing Committee on Democracy and Human Rights di Luanda, Angola	26 Oktober 2023	Ketua BKSAP menyatakan keprihatinnya terkait pelanggaran HAM terhadap anak-anak di Gaza, lebih dari 2.000 anak tewas pada 23 Oktober. Ia menekankan perlunya memperkuat upaya menghentikan serangan Israel demi melindungi anak-anak di Palestina yang menderita (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023c).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana	The 147th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Sesi Asian Parliamentary Assembly (APA) Group Meeting di Luanda, Angola	26 Oktober 2023	Pertemuan ini dibahas dua hal dan salah satunya adalah situasi di Gaza. Ia mengajak parlemen APA untuk menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina. Forum APA ini sepakat untuk mendorong dialog untuk menciptakan perdamaian di Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023c).
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana	The 147th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Sesi ASEAN+3 Group Meeting di Luanda, Angola	26 Oktober 2023	Dalam kesempatan ini, Wakil BKSAP menyampaikan rencana Indonesia yang akan mengajukan <i>emergency item</i> terkait dengan situasi terkini di Palestina (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023c).
Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)	The 147th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Sesi Parliamentary Union of the OIC	26 Oktober 2023	Ibu Ratih menyampaikan Indonesia yang akan menyampaikan proposal <i>emergency item</i> dengan judul

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
DPR RI Ratih Megasari Singkarru	Member States (PUIC) Meeting di Luanda, Angola		<i>'Ending Aggression and Forging Solidarity to Alleviate Humanitarian Crises In Gaza'</i> yang disambut baik oleh seluruh anggota PUIC (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023c).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	The 147th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU): Sesi Assembly: Special Session on Emergency Item di Luanda, Angola	26 Oktober 2023	Indonesia bersama beberapa negara lain mengajukan <i>emergency item</i> berjudul <i>'Stopping War and Violations of Human Rights In Gaza'</i> yang seiringan dengan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap warga Palestina selama puluhan tahun (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Resumed 10th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly New York	26 Oktober 2023	Menlu Retno memohon untuk menghentikan pembunuhan, melindungi warga sipil, dan membiarkan bantuan kemanusiaan masuk. Ia juga menyampaikan tiga

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			langkah konkrit yang harus dijalani. Sebagai penutup, Menlu mengatakan “jika anda peduli terhadap kemanusiaan, gunakan hati anda untuk memilih ‘ya’ pada resolusi tersebut” (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023h).
Duta Besar RI untuk Rumania Merangkap Republik Moldova Meidyatama Suryodiningrat	Pertemuan Kepala Perwakilan Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan Senat Rumania di Bucharest, Rumania	31 Oktober 2023	Dubes RI menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga Palestina, dan para Dubes juga mendorong pemerintah Rumania untuk mendukung percepatan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Kegiatan ini merupakan langkah diplomasi bersama untuk mendorong Rumania untuk turut mempengaruhi kebijakan Eropa terkait isu Palestina (Kementerian

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Luar Negeri Republik Indonesia, 2023j).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	International Conference on Woman in Islam, Status and Empowerment di Jeddah, Arab Saudi	7 November 2023	Dalam pidatonya, Menlu mendedikasikan pidatonya untuk para wanita dimanapun terutama di Palestina. Ia menyinggung tentang Palestina dan menyampaikan bahwa kita tidak akan tinggal diam (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023a).
Presiden RI Joko Widodo	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi	11 November 2023	Dalam pernyataannya, presiden menyampaikan secara tegas bahwa OKI harus bersatu dan memimpin dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza, menggunakan semua cara damai, pengaruh, dan upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023n).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	APEC Ministerial Meeting di San Francisco	14 November 2023	Menlu memulai pernyataannya dengan menyebutkan situasi kemanusiaan di Gaza, dan menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas adalah syarat terciptanya kemakmuran (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023b).
Presiden RI Joko Widodo	Joint Statement Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia di KTT APEC/30th APEC AELM di San Francisco	17 November 2023	Ketiga negara menyerukan segera gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan dan mengarah pada perdamaian di Gaza. Mereka juga menegaskan kembali bahwa solusi yang adil untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan cara-cara damai (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023o).
Presiden RI Joko Widodo	Sesi KTT APEC: APEC Economic Leaders' Retreat Session	17 November 2023	Pada sesi ini Presiden membuka pernyataannya dengan mengajak

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			para pemimpin APEC untuk memikirkan sejenak kondisi masyarakat di Gaza, kemudian Presiden mendesak para pemimpin APEC untuk segera bertindak untuk isu Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023p).
Ketua DPR RI Puan Maharani	Pertemuan MIKTA Speakers' Consultation ke-9 di Jakarta	19-20 November 2023	Sebagai pimpinan forum, Puan menyampaikan keprihatinannya serta menekankan pentingnya penyelesaian damai dan gencatan senjata. MIKTA pun mendukung segala upaya komunitas internasional untuk mencapai perdamaian dan mewujudkan <i>two-state solution</i> (EMedia DPR RI, 2023).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Menggalang Dukungan Bersama Beberapa Menlu OKI di Beijing	20 November 2023	Menlu Retno bersama beberapa Menlu OKI melakukan pertemuan dengan RRT terkait situasi di Gaza.

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Para Menlu OKI berharap agar RRT dapat mendukung upaya Menlu OKI dalam menggalang dukungan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023q).
Presiden RI Joko Widodo	Presiden Joko Widodo Menerima Sejumlah Delegasi MIKTA Speakers' Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta	20 November 2023	Pertemuan tersebut Presiden menekankan upaya setiap pihak untuk memastikan bantuan untuk Gaza sesuai. Kemudian dibahas juga bagaimana bisa dimulai proses politik untuk mencapai solusi bagi Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov Bersama Beberapa Menlu OKI di Moscow	21 November 2023	Menlu Retno bersama beberapa Menlu OKI menyampaikan pentingnya semua negara untuk melihat situasi di Gaza secara objektif dan mengambil sikap yang

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			adil. Diperlukan banyak dukungan dari banyak negara terutama anggota tetap DK PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023r).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Foreign Secretary David Cameron Bersama Beberapa Menlu OKI di London	22 November 2023	Menlu bersama Menlu OKI menekankan bahwa kekejaman harus segera dihentikan dan memerlukan gencatan senjata. Indonesia mendesak DK PBB untuk menunjukkan tanggung jawabnya, dan berharap Inggris akan berpihak pada keadilan dan kemanusiaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023s).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menlu Prancis Bersama Beberapa Menlu OKI di Paris	22 November 2023	Para Menlu mengharapkan agar Prancis menggunakan pengaruhnya kepada negara lain untuk tidak menerapkan standar ganda dalam kasus Palestina. OKI sangat

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			mengharapkan Prancis untuk adanya resolusi DK PBB dan terkait bantuan kemanusiaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023s).
Presiden RI Joko Widodo	R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta	27 November 2023	Presiden menuturkan situasi kemanusiaan di Gaza tidak dapat ditoleransi sedikit pun. Lebih lanjut ia mengatakan gencatan senjata harus segera dilakukan dan perundingan harus damai segera dimulai (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023e).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Sidang Majelis Umum PBB	28 November 2023	Menlu menyampaikan pernyataan nasionalnya mengenai Gaza dan upaya diplomasi Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa jika negara dunia ingin mendukung keadilan dan kemanusiaan, maka lakukan empat hal yang disampaikan oleh

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Menlu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023t).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Hari Solidaritas Internasional Palestina (International Day of Solidarity with the Palestinian People) di New York	29 November 2023	Semua Menlu OKI di New York hadir dalam peringatan Hari Solidaritas Internasional Palestina sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap Palestina. Presiden juga menyampaikan pesan tertulis dukungan Indonesia kepada Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023u).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Menlu RRT Bersama dengan Beberapa Menlu OKI	29 November 2023	Menlu OKI bertemu Menlu RRT untuk menekankan pentingnya ceasefire dan memulai proses perdamaian. DK PBB harus mengeluarkan pesan kuat untuk menghentikan kekerasan dan kekejaman (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023u).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Sekjen PBB Bersama dengan Beberapa Menlu OKI	29 November 2023	Menlu OKI menekankan perlunya resolusi DK PBB yang lebih tegas, mengangkat pentingnya gencatan senjata, dan perlunya percepatan dan akses baru pengiriman bantuan kemanusiaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023u).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	High-Level Debate on Gaza di DK PBB	29 November 2023	Menlu Retno menyampaikan bahwa ia tidak dapat memahami apabila DK PBB membiarkan pernyataan PM Netanyahu terlaksana. Ia meminta DK PBB untuk mencegah kekerasan berulang terjadi di Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023u).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Briefing dengan Duta Besar Negara Uni Eropa Terkait Joint Arab-OIC Ministerial Committee	7 Desember 2023	Menlu memberikan arahan kepada para duta besar negara Uni Eropa tentang pekerjaan Joint Arab-OIC Ministerial Committee dalam menangani krisis di Gaza (Akun

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023c).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Khusus Executive Board Special Session WHO di Jenewa, Swiss	10 Desember 2023	Menlu menyampaikan tiga hal penting: mempercepat bantuan kesehatan untuk Gaza, perlindungan terhadap seluruh pekerja dan fasilitas medis, meningkatkan mobilisasi dukungan untuk WHO (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023w).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss	11 Desember 2023	Menlu Retno menyampaikan empat komitmen nasional Indonesia dalam memajukan HAM, dan pada poin pertamanya, merujuk jelas ke Palestina, bahwa Indonesia akan mendukung Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023x).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Human Rights 75 Initiative Roundtable on Future of Human Rights and Peace & Security	12 Desember 2023	Menlu menekankan tiga hal yang perlu diperhatikan oleh komunitas internasional. Poin kedua mengajak negara-negara untuk tidak menerapkan standar ganda dalam isu Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023z).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	High-Level Ministerial Event on Human Rights Situation in Palestina	12 Desember 2023	Menlu menyampaikan tiga hal untuk didorong bersama. Ia mendorong juga Komisi Independen yang dibentuk oleh Dewan HAM agar diberikan akses yang luas sehingga dapat menjalankan mandatnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023z).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI dengan Presiden ICRC/Joint Arab- OIC Ministerial Committee Meeting	12 Desember 2023	Para Menlu OKI menekankan seberapa pentingnya gencatan senjata, pentingnya pengadaan akses yang terbuka untuk

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	with President of ICRC Mirjana Spoljaric		mengirimkan bantuan kemanusiaan tanpa terkendala. Dalam pertemuan juga terdapat beberapa isu yang menonjol yang disepakati (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023z).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI dengan Dirjen WHO/Joint Arab-OIC Ministerial Committee Meeting with Director General of WHO dr. Tedros	12 Desember 2023	Para Menlu OKI menekankan seberapa pentingnya gencatan senjata, pentingnya pengadaan akses yang terbuka untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan tanpa terkendala. Dalam pertemuan juga terdapat beberapa isu yang menonjol yang disepakati (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023z).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI dengan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM/Joint Arab-OIC Ministerial Committee Meeting with	12 Desember 2023	Para Menlu OKI menekankan seberapa pentingnya gencatan senjata, pentingnya pengadaan akses yang terbuka untuk

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	High Commissioner for Human Rights Volker Türk.		mengirimkan bantuan kemanusiaan tanpa terkendala. Dalam pertemuan juga terdapat beberapa isu yang menonjol yang disepakati (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023z).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Emergency Special Session ke-10 (ESS ke-10) Majelis Umum (MU) PBB, di New York	12 Desember 2023	Indonesia menggalang dukungan dari 11 negara di berbagai wilayah untuk menyampaikan surat bersama kepada Presiden MU PBB untuk segera mengadakan Emergency Special Session (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023y).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Global Refugee Forum 2023 di Jenewa, Swiss	13 Desember 2023	Menlu mengingatkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menghentikan perang, konflik, menghormati hukum internasional dalam isu Palestina (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023e).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan dengan Centre for Humanitarian Dialogue & Representatives of WHO, UNOCHA, ICRC	13 Desember 2023	Dalam pertemuan ini bertukar pikiran mengenai isu Gaza. Semua sepakat dengan pentingnya gencatan senjata dan mengapresiasi usaha diplomatik Menlu OKI (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2023e).
Presiden RI Joko Widodo	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang di Tokyo	17 Desember 2023	Presiden menyebutkan bahwa tragedi kemanusiaan di Palestina merupakan imbas dari hukum internasional yang tidak dipatuhi. Untuk itu perlu mematuhi hukum internasional untuk mencegah konflik (Laman Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023v).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	First Meeting Asian Parliamentary Assembly (APA) Committee on Palestina: General Debate di Teheran, Iran	10 Januari 2024	Fadli Zon menyampaikan pandangannya untuk fokus dalam mendukung perjuangan Palestina dan mengatakan bahwa Gaza seperti menuju kepunahan dan tidak

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			layak dihuni. Indonesia juga mengajukan empat program kerja untuk Komisi Palestina.(Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024b).
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat	First Meeting Asian Parliamentary Assembly (APA) Committee on Palestina: General Debate di Teheran, Iran	10 Januari 2024	Ia menyampaikan diantaranya bahwa Indonesia mendukung penuh Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ, pentingnya meningkatkan pengakuan Palestina menjadi anggota penuh PBB, mengecam standar ganda (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024b).
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury	Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-19 di Kampala, Uganda	20 Januari 2024	Indonesia melalui Wamenlu mendesak GNB untuk bersatu mendesak gencatan senjata, mendorong perdamaian, dan berupaya agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024f).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Open Debate DK PBB	23 Januari 2024	Menlu Retno mendesak DK PBB untuk segera menghentikan tindakan Israel terhadap Palestina. Ia juga menekankan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk menghormati hukum humaniter internasional tanpa terkecuali (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024g).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	AMM Retreat Menlu ASEAN di Luang Prabang, Laos	29 Januari 2024	Menlu Retno menyampaikan pandangan Indonesia mengenai Gaza secara sangat terbuka. Ia menekankan bahwa ASEAN memiliki kesatuan dalam mengambil sikap termasuk dalam menanggapi situasi di Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024h).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Duta Besar Febrian Ruddyard, sebagai Presiden TDB	Pertemuan TDB UNCTAD Pertama di Tahun 2024	30 Januari 2024	Indonesia melalui strategi diplomasi yang efektif telah memainkan peran kunci dalam memajukan multilateralisme, termasuk memimpin diskusi internasional terkait isu Palestina, yang telah mengeluarkan laporan khusus mengenai Palestina (Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the UN WTO and Other International Organizations in Geneva Switzerland, 2024).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	EU Indo-Pacific Ministerial Forum ke-3: Plenary Opening Session di Brussel, Belgia	2 Februari 2024	Menlu menyerukan kepada UE untuk menggunakan nuraninya dalam menghentikan kekejaman di Palestina. UE harus tetap konsisten dalam menangani isu Palestina, karena keselarasan antara nilai dan tindakan mencerminkan moralitas

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			yang sesungguhnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024j).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	EU Indo-Pacific Ministerial Forum ke-3: Roundtable I di Brussel, Belgia	2 Februari 2024	Menlu menyampaikan bahwa penghormatan terhadap hukum internasional harus diterapkan dalam semua isu, termasuk isu Palestina dan Gaza. Menlu juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024j).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-24 di Brussel, Belgia	2 Februari 2024	Menlu menekankan bahwa setiap individu, termasuk Palestina memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi, dan mereka pun berhak untuk hidup dan memiliki negara sendiri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024j).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Rio de Janeiro, Brazil	21 Februari 2024	Menlu mengangkat isu Palestina, dan menegaskan tiga poin peran kolektif yang perlu dilakukan. Ia juga menyampaikan bahwa negara G20 bertanggung jawab untuk berkontribusi bagi perdamaian (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri MIKTA	21 Februari 2024	Menlu mengangkat situasi di Palestina, dan menyampaikan agar MIKTA memastikan suara MIKTA didengar sebagai <i>middle powers</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Advisory Opinion Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda	23 Februari 2024	Menlu menyampaikan <i>advisory opinion</i> di depan Mahkamah Internasional sebagai bentuk dukungan untuk Palestina, dengan memaparkan sejumlah argumen sebagai masukan untuk

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			memperkuat fatwa hukum Mahkamah Internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024m).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	High Level Segment Conference on Disarmament	26 Februari 2024	Menlu menyampaikan kecamannya atas wacana Israel menggunakan nuklik untuk mengancam warga Gaza. Ia juga mendesak untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel guna menghindari korban bertambah (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024o).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB ke-55 / High-Level Segment of the 55th Human Rights Council	26 Februari 2024	Menlu menyatakan bahwa Dewan HAM harus menjalankan kewajibannya dalam menanggapi pelanggaran berat HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024o).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Arab Group-OIC Joint Ministerial Committee dengan Sekjen PBB	26 Februari 2024	Para Menlu OKI menekankan <i>double standard</i> terhadap isu Palestina yang terlihat jelas diterapkan oleh beberapa negara, perlunya menyelamatkan UNRWA karena UNRWA berperan penting untuk para pengungsi Palestina, dan yang terakhir adalah menyampaikan satu-satunya solusi yaitu <i>two state solution</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024o).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	High-Level Side Event terkait Palestina yang diadakan oleh Menlu Palestina	26 Februari 2024	Indonesia melalui Menlu Retno menyampaikan bahwa saat ini kita berperang diantaranya melawan pelanggaran berat HAM Israel di Gaza, serta melawan ketidakadilan terhadap Palestina. Ia juga menyampaikan pertanyaan apakah kita akan tinggal diam melihat

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			situasi yang terjadi di Palestina, dan jawabannya seharusnya adalah tidak (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024o).
Presiden RI Joko Widodo	KTT Khusus ASEAN-Australia/The ASEAN-Australia Summit di Melbourne, Australia	6 Maret 2024	Presiden mengajak ASEAN dan Australia mendorong gencatan senjata di Gaza, menekankan pentingnya dukungan terhadap UNRWA karena kita tidak boleh tinggal diam atas kekejaman yang dilakukan Israel (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2024b).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	3rd Summit for Democracy di Seoul, Korea Selatan	18 Maret 2024	Menlu Retno mengajak semua pihak untuk mendukung upaya gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan ke Gaza (Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi, 2024e).
Ketua Badan Kerjasama Antar	The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly: Sesi Asia Pacific	23 Maret 2024	Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan bahwa IPU sebagai

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	Group (APG) Meeting di Jenewa, Swiss		organisasi antar-parlemen global, harus menyampaikan pandangannya terkait situasi di Gaza. Ia mendesak IPU untuk segera merespon krisis di Gaza secepat merespon konflik lainnya (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. H. Sukamta	The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly: Sesi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Meeting di Jenewa, Swiss	23 Maret 2024	Indonesia mengajukan <i>draft</i> usulan bertema ‘Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine’. Wakil BKSAP Sukamta juga menyampaikan dalam menyikapi tindakan Israel, PUIC harus menunjukkan posisinya secara tegas (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Ketua Badan Kerjasama Antar	The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly: Sesi Asian	23 Maret 2024	Ketua BKSAP menyerukan negara-negara yang selama ini mendukung Israel dan memiliki hubungan

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	Parliamentary Assembly (APA) Meeting di Jenewa, Swiss		diplomati dengan Israel untuk berhenti menerapkan standar ganda (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Ketua DPR RI Puan Maharani	The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly: Sesi Forum of Women Parliamentarians di Jenewa, Swiss	23 Maret 2024	Ketua DPR Puan menyampaikan bahwa wanita dan anak-anak tetap menjadi kelompok yang paling terkena dampak dan rentan selama konflik seperti yang terjadi di Gaza (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon	The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly: Sesi General Debate di Jenewa, Swiss	24 Maret 2024	Ketua BKSAP Fadli menyampaikan bahwa IPU diam terhadap serangan Israel di Gaza padahal mengetahui bahwa serangan tersebut mengabaikan hukum internasional. Pada sesi ini, delegasi RI juga melakukan <i>walk out</i> saat delegasi Israel naik podium

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			(Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. H. Sukamta	The 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly: Sesi Middle East Question Committee di Jenewa, Swiss	24 Maret 2024	Wakil BKSAP Sukamta mengusulkan wacana kunjungan ke Palestina dan Israel untuk menggandeng PBB. Anggota Komite berargumen kunjungan harus segera dilakukan (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2024a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Kunjungan Para Duta Besar dan Perwakilan dari Kedutaan Besar Negara-Negara Arab untuk Indonesia di Kemenlu, Jakarta	2 April 2024	Menlu Retno menyampaikan pentingnya kesatuan posisi dalam mendukung Palestina. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara Arab perlu fokus pada tiga hal utama (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024q).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	KTT OKI ke-15/15th Session of The Islamic Summit Conference di Banjul, Gambia	4 Mei 2024	Dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menekankan bahwa dalam kondisi buruk seperti ini,

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			OKI harus bersatu dalam mendukung keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024t).
Ketua DPR RI Puan Maharani	10th MIKTA Speakers Consultation di Meksiko	6-7 Mei 2024	MIKTA membahas untuk mendorong berbagai hal, termasuk mendorong perdamaian untuj konflik negara-negara, yang salah satunya konflik di Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024u).
Kementerian Luar Negeri RI	Sidang Darurat Majelis Umum PBB (Emergency Special Session)	10 Mei 2024	Sesi PBB ini mengesahkan pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina, yang mana resolusi ini di co-sponsori oleh 77 negara, termasuk Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024v).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Ministerial Level Meeting the Follow-Up of the Riyadh Meeting Brussels	26 Mei 2024	Menlu meminta negara-negara Eropa untuk mendukung <i>two-state solution</i> , dan menekankan pentingnya peran DK PBB untuk negara anggota yang hadir (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024x).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Extraordinary Meeting of the D-8 Council of Foreign Ministers	8 Juni 2024	Menlu meminta untuk meningkatkan kontribusi pada UNRWA dengan tetap menyesuaikan kemampuan masing-masing negara, dan persatuan antara negara-negara anggota D-8 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ad).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Oslo Forum 2024	11 Juni 2024	Menlu menekankan pentingnya memperkuat sistem multilateral untuk menciptakan perdamaian. Dan sambil menunggu hasil mediasi, dapat melakukan banyak

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			hal untuk Palestina: memperlancar bantuan dan mengakui keanggotaan penuh di PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ae)
Duta Besar RI Tehran	ACD Senior Officials' Meeting	23 Juni 2024	Dubes menegaskan bahwa Palestina adalah saudara sekaligus anggota ACD, sehingga ACD seharusnya menunjukkan solidaritas yang kuat terkait situasi di Gaza (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ag).
Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Duta Besar Adam Mulawarman Tugio	Pertemuan Tingkat Menteri ACD ke-19/19th Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting di Tehran, Iran	24 Juni 2024	Indonesia secara konsisten menyerukan untuk menghentikan konflik kemanusiaan di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina dengan menerapkan <i>two-state solution</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ag).
Wakil Tetap RI	Kunjungan Delegasi Biro Komite Palestina PBB (Committee on the	3-5 Juli 2024	Indonesia terus menekankan agar segera tercapai gencatan senjata,

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) di Jakarta		keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan perdamaian berdasarkan <i>two-state solution</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024a).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy: “Multi-Faith Collaborations in an Inclusive Society”	10 Juli 2024	Menlu menyampaikan bahwa 37.000 orang terbunuh di Gaza, sehingga semua kekejaman harus dihentikan, manusia dan kemanusiaan harus dinomorsatukan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024a).
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Arrmanatha Nasir	UNRWA Pledging Conference di Markas PBB di New York	12 Juli 2024	Indonesia menegaskan komitmennya yang berupaya untuk mendanai UNRWA secara inovatif, dan melibatkan masyarakat Indonesia melalui eksplorasi kemitraan dengan lembaga pengelola zakat (Kementerian Luar

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Negeri Republik Indonesia, 2024an).
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri	Dialog Hak Asasi Manusia (HAM) ke-10 di Brussel, Belgia	15 Juli 2024	Indonesia menekankan pentingnya peran UE dalam mendorong akuntabilitas konflik di Gaza melalui dukungan berbagai mekanisme PBB. Indonesia juga berharap UE terus memberi dukungan politik dan finansial kepada UNRWA (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ao).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	ASEAN Foreign Ministers' Interface with ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Representatives di Vientiane, Laos	24 Juli 2024	Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN secara global harus memajukan HAM. Menlu Retno juga menyampaikan bahwa ASEAN tidak bisa hanya berdiam menyaksikan pelanggaran HAM yang kejam yang terjadi di Gaza

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024aq).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan ke-57 Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane, Laos	25 Juli 2024	Resolusi PBB mengenai isu Palestina masih belum ada implementasi nyata. Dengan itu, ASEAN bisa menunjukkan solidaritasnya dengan mengambil posisi yang tegas untuk mengakhiri kekejaman dan genosida di Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024as).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	57th ASEAN Foreign Ministers' Meeting (Retreat Session)	25 Juli 2024	Menlu mendorong ASEAN bersatu menyerukan penghentian genosida dan gencatan senjata permanen di Palestina. Ia juga menyampaikan bahwa ASEAN perlu menyuarakan pentingnya konsisten dalam menghormati hukum internasional termasuk dalam konteks Palestina

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ar).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	ASEAN-Russia Post Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Indonesia memandang bahwa sebagai anggota tetap DK PBB, Rusia harus bisa mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina, serta mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024aw).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Kanada di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Menlu mengapresiasi Kanada yang memulai kembali pendanaan untuk Palestina melalui UNRWA, dan mendorong Kanada untuk segera mengakui Palestina serta mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024av).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN-Australia di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Menlu mengapresiasi Australia yang memulai kembali pendanaan UNRWA dan dukungan Australia dalam keanggotaan Palestina di PBB. Menlu juga meminta Australia untuk segera mengakui Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ax).
Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemlu, Sidharto R. Suryodipuro	Pertemuan Para Menlu ASEAN dengan Menlu Inggris di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Dirjen mengatakan Inggris sebagai anggota tetap DK PBB memiliki peran penting untuk mengakui Palestina dan menjadikan Palestina anggota penuh PBB. Ia mendesak Inggris untuk segera melakukan gencatan senjata (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024at).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan ASEAN-Korea Selatan Post-Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Menlu secara khusus mengajak Korea Selatan untuk kembali menegaskan dukungannya terhadap

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			Palestina, mendorong gencatan senjata permanen, dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ba).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan India di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Menlu mendesak negara-negara untuk memperkuat komitmennya terhadap Palestina, dan menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata permanen, dan mengakui serta mendukung Palestina sebagai anggota di PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024au).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan ASEAN-Jepang Post-Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Menlu mengharapkan agar Jepang segera mengakui Palestina sebagai langkah penting dalam mendukung proses perdamaian <i>two-state solution</i> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ay).

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan para Menlu dan Uni Eropa di Vientiane, Laos	26 Juli 2024	Menlu menyampaikan bahwa setelah kunjungannya ke Brussel, negara-negara yang mengakui Palestina bertambah, dan Menlu mengharapkan agar negara UE lainnya akan mengikuti langkah ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024az).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	ASEAN Post Ministerial Conference with United States	27 Juli 2024	Menlu menyampaikan bahwa penghormatan hukum internasional harus diterapkan pada isu Palestina, kita tidak bisa terus menutup mata mengenai situasi yang mengerikan di Gaza. Ia mengajak masyarakat ASEAN-AS untuk bekerja sama dalam keadilan dan kemanusiaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024be).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan ke-31 Para Menlu ARF di Vientiane, Laos	27 Juli 2024	Menlu menyampaikan posisi Indonesia terhadap isu Palestina

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
			selalu sama, menghormati secara konsisten dan menekankan pentingnya revitalisasi ARF di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024bc).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Para Menlu ASEAN dan Amerika Serikat Bersama Menlu AS (ASEAN Post Ministerial Conference with the United States), Antony Blinken, di Vientiane, Laos	27 Juli 2024	Menlu menekan kemitraan ASEAN dan AS untuk mendukung terciptanya perdamaian di Palestina. Ia mengatakan bahwa gencatan senjata harus segera dilakukan, serta mengajak AS dan ASEAN untuk bersama-sama memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024bb).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi	Pertemuan Tingkat Menteri KTT Asia Timur ke-14/14th East Asia	27 Juli 2024	Menlu menyampaikan bahwa penting bagi semua negara untuk bersuara lebih tegas bahwa <i>two-</i>

Aktor	Kegiatan/Forum	Tanggal	Deskripsi
	Summit (EAS) Foreign Ministers' Meeting di Vientiane, Laos		<i>state solution</i> adalah satu-satunya solusi yang memungkinkan. Ia menyampaikan beberapa langkah penting untuk mewujudkan <i>two-state solution</i> , dan menekankan untuk berhenti melabeli UNRWA sebagai organisasi teroris (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024bd).

Selain melalui diplomasi publik dan diplomasi bilateral, Indonesia juga menggunakan cara diplomasi multilateral dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina dalam rentang tahun 2015-2024 melalui diplomasi multilateral. Dengan menghadiri berbagai forum, Indonesia memiliki banyak kesempatan dalam menyampaikan suaranya dan dukungannya untuk Palestina. Indonesia melalui para aktor yaitu Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno, serta anggota parlemen dan para duta besar menggunakan diplomasi multilateral dalam menyampaikan dukungan untuk Palestina. Para aktor mengajak para peserta pertemuan dan masyarakat internasional untuk mendukung gencatan senjata segera, mendorong pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB, hingga mengajak untuk mengimplementasikan *two-state solution* sebagai solusi yang adil.

Indonesia juga beberapa kali menjadi tuan rumah diselenggarakannya pertemuan forum internasional dan menghasilkan deklarasi mengenai Palestina. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia berada di belakang Palestina untuk mendukungnya. Indonesia juga tanpa ragu mengutuk Israel di berbagai penyampaian pidato, melakukan *walk-out* saat perwakilan dari Israel sedang berpidato, dan bahkan mengajak negara yang masih berhubungan dengan Israel untuk memutus hubungannya dengan Israel. *Joint statement* bersama negara lain juga salah satu cara multilateral Indonesia untuk menyuarakan dan menggalang dukungan dari negara lain.

3.2.4 Analisis Pola Diplomasi Indonesia

Indonesia dalam melakukan diplomasi dalam mendukung kemerdekaan Palestina cukup konsisten, terutama saat Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB. Saat terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Indonesia memiliki empat isu prioritas dan satu isu perhatian khusus, dimana satu isu perhatian khusus tersebut adalah isu Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a). Dalam menjalankan keanggotaan di DK PBB, Indonesia sendiri memang berprinsip pada Pancasila, UUD 1945, dan Dasasila Bandung, yang mana dalam UUD 1945, alinea pertamanya merupakan penegasan bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a). Indonesia berperan sebagai *penholdership*,

yaitu tanggung jawab untuk menyusun dokumen sidang DK PBB seperti rancangan resolusi dan *press statement* untuk sejumlah isu, salah satunya isu Palestina dengan AS dan Kuwait (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a).

Dalam DK PBB, terdapat beberapa tipe pertemuan, salah satunya adalah pertemuan ‘Arria Formula’, yaitu pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan isu-isu yang belum memiliki kejelasan atau kesamaan di antara negara-negara anggota DK (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a). Indonesia saat menjabat presidensi di DK PBB, pernah menyelenggarakan pertemuan Arria Formula pada 9 Mei 2019 untuk membahas mengenai Palestina, yang menunjukkan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia terhadap masalah Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019c).

Sedangkan saat menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia memulai dengan mengangkat isu keadilan untuk rakyat Palestina pada Sidang Dewan HAM PBB ke-55. Menlu menyuarakan mengenai isu Palestina yang terkesan standar ganda oleh dunia, sehingga Menlu mengatakan agar Dewan HAM PBB menjalankan kewajibannya untuk mengatasi pelanggaran HAM berat termasuk di Palestina. Menlu menyampaikan usulannya terhadap Dewan HAM PBB untuk isu Palestina, dan menutup pidatonya dengan mengajak negara untuk menegakkan HAM tanpa bersikap selektif (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024p).

Dalam berbagai upaya diplomasi, Indonesia kerap menegaskan posisi Indonesia yang konsisten, mengutuk tindakan Israel, dan mengajak negara-negara untuk mengakui Palestina sebagai negara. Satu hal lain lagi yang sering dikonstruksikan oleh para aktor adalah *two-state solution*. Dalam berbagai kesempatan terutama kepada OKI dan GNB, Indonesia sering kali mengatakan bahwa ‘kita berhutang pada kemerdekaan Palestina’. Sesuai dengan tujuan Indonesia yang ingin Palestina merdeka sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menekankan pentingnya *two-state solution*.

Di berbagai kesempatan dengan negara-negara maupun di forum internasional, *two-state solution* menjadi dasar dari keinginan Indonesia untuk mewujudkan Palestina yang merdeka. Hingga saat ini, dunia internasional terus mendukung tercapainya solusi damai antara Palestina dan Israel yang berlandaskan pada konsep *two-state solution*, sesuai dengan prinsip yang telah diakui oleh komunitas internasional dan diamanatkan melalui berbagai resolusi Majelis Umum serta Dewan Keamanan PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ap). Indonesia secara konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong pembentukan negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan sejahtera, yang dapat hidup berdampingan dengan Israel secara damai berdasarkan prinsip *two-state solution*, terutama selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ap). Isu Palestina menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan Indonesia terus memperkuat dukungannya terhadap Palestina sebagai negara berdaulat dan konsisten menyerukan penerapan *two-state solution* di berbagai forum internasional sebagai upaya penyelesaian konflik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024ap).

Indonesia tentunya menargetkan aktor dunia internasional, yaitu negara untuk mewujudkan dan mensukseskan upaya diplomasinya untuk Palestina yang merdeka. Melalui perwakilan negara yang ditemui disetiap kegiatan, aktor Indonesia berharap bahwa pembahasan mengenai isu Palestina tersampaikan dengan baik. Selama tahun 2015 hingga 2024, Indonesia, terutama melalui aktor Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia konsisten bersuara, walaupun hanya menyelipkan dan menyinggung sedikit mengenai isu Palestina, yang juga merupakan bagian dari upaya diplomasi.

BAB IV

PENUTUP

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa saja diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia dan Palestina merupakan dua negara yang berhubungan baik, diawali dengan kedua negara yang saling mendukung kemerdekaan satu sama lain. Pada saat Palestina berkonflik dengan Israel yang mana merupakan konflik perebutan wilayah, Indonesia selalu mendukung dan membela Palestina atas dasar Indonesia yang menentang penjajahan sesuai dengan konstitusi pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Tindakan Israel selama bertahun-tahun yang berusaha merebut wilayah Palestina dengan melakukan tindak kekejaman termasuk pengusiran paksa warga Palestina merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, hukum internasional, dan hukum humaniter internasional.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan indikator *soft diplomacy* oleh Joseph S. Nye, dimana ia mengklasifikasikan tiga tipe *power* (kekuatan), yang salah satunya adalah soft power dengan indikator *public diplomacy*, *bilateral diplomacy*, dan *multilateral diplomacy*. Hasil pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dengan metode *library research* (studi kepustakaan), sesuai dengan batasan penelitian ini, sejak tahun 2015 hingga 2024, Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina melalui tiga cara diplomasi diatas. Dalam melakukan *public diplomacy*, Indonesia melalui Presiden Jokowi maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap kali melakukan konferensi pers dalam mempertegas posisi Indonesia yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina.

Sedangkan dalam *bilateral diplomacy*, aktor utama Presiden Jokowi maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta aktor lainnya sering kali membahas mengenai Palestina di berbagai pertemuan bilateral dengan perwakilan negara lain maupun perwakilan organisasi internasional. Indonesia selalu menyampaikan secara tegas posisi dan konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina, serta mengajak negara-negara lain untuk mencari solusi untuk konflik kedua negara ini, mengajak negara lain untuk segera mengakui Palestina sebagai anggota penuh di PBB maupun

sebagai negara merdeka. Indonesia juga mengajak negara-negara untuk segera mendesak dilakukannya gencatan senjata dan penerapan *two-state solution* sebagai solusi yang adil.

Dalam *multilateral diplomacy*, Indonesia dan parlemen Indonesia aktif dalam menghadiri berbagai konferensi, sidang, forum yang diadakan oleh organisasi internasional. Indonesia sendiri merupakan anggota dari banyak organisasi internasional di dunia. Sehingga, kesempatan Indonesia dalam menyuarakan mengenai Palestina di kancah dunia semakin luas. Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, parlemen Indonesia, duta besar Indonesia sering menyuarakan mengenai Palestina di berbagai pertemuan internasional. Para aktor mengajak organisasi dan masyarakat internasional untuk bertanggung jawab atas tindakan Israel yang sering melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina dan melanggar hukum internasional serta hukum humaniter internasional. Indonesia juga kerap mengutuk Israel di berbagai penyampaian pidato pertemuan, mengajak menghentikan perang melalui gencatan senjata dan *two-state solution*.

Selain mendukung Palestina melalui diplomasi, Indonesia juga kerap mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina atas dasar keprihatinan Indonesia mengenai situasi di Palestina yang kacau, tidak adanya tempat dan kebutuhan yang layak untuk rakyat Palestina. Palestina pun selalu mengapresiasi dan menyampaikan terima kasihnya kepada Indonesia yang selalu berada di belakang Palestina dengan membantu melalui jalur diplomasi, maupun pengiriman bantuan kemanusiaan.

Analisis data dan literatur menunjukkan bahwa Indonesia telah secara konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui berbagai jalur diplomasi publik, diplomasi bilateral, dan diplomasi multilateral. Hasil penelitian ini juga menyoroti kontribusi positif Indonesia dalam memperkuat kesatuan dunia Muslim dalam mendukung Palestina. Meskipun pastinya terdapat beberapa tantangan Indonesia untuk benar-benar mewujudkan upaya diplomasinya, diplomasi Indonesia tetap telah memainkan peran yang signifikan dalam menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina di arena internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2019, December 17). *ASEM FMM (Asia Europe Meeting- Foreign Ministers Meeting)*.
<https://www.instagram.com/p/B6Kd-Y6gbsp/?igsh=MWlsYWVzcnhiZ3FvbA%3D%3D>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2020, June 26). *UNSC VTC Meeting on the Palestinian Question (25/06)*.
<https://www.instagram.com/p/CB4scwMAsJ-/?igsh=MWNxb29pZnQyYjVsOA%3D%3D>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2021, May 22). *Hello New York*.
<https://www.instagram.com/p/CPLdV6mAd2s/?igsh=NTd1NDVmMXA0NTFh>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2023a, November 8). *Jeddah (07/11)*.
<https://www.instagram.com/reel/CzYSq6SMdDO/?igsh=MTF4dHZnOWpqaGp4>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2023b, November 16). *San Francisco (14/11)*.
<https://www.instagram.com/reel/CztY7m0LtQ2/?igsh=MWQ5aXE1MXZxMnQ0Nw%3D%3D>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2023c, December 8). *Jakarta (7/12)*.
<https://www.instagram.com/reel/C0kjECwSgS4/?igsh=MXMyc2ljNTRwcXVsYw%3D%3D>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2023d, December 9). *Jakarta (8/12)*.
<https://www.instagram.com/reel/C0nMM11SooC/?igsh=cnU4M2ZsYzU5OHRk>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2023e, December 14). *Geneva (13/12)*.
<https://www.instagram.com/reel/C00jSzQoqU6/?igsh=MXJ2M3BkdmV6OWV0Yw%3D%3D>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2024a, February 29). *Jakarta (29/2)*.
<https://www.instagram.com/reel/C37fBEpvcIs/?igsh=bncyNXV0dTZqNjgy>

- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2024b, March 6). *Melbourne* (6/3).
<https://www.instagram.com/reel/C4LCS70yeJ2/?igsh=cXdxbnNmMDdyZmV5>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2024c, March 14). *Jakarta* (14/3). <https://www.instagram.com/reel/C4fp-L2yVSo/?igsh=MWhianhleDRpZmIxYQ%3D%3D>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2024d, March 15). *Jakarta* (14/3).
<https://www.instagram.com/reel/C4hMIVXyAcG/?igsh=aDl1aXk1bzh5dTcz>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2024e, March 19). *Seoul* (18/3).
<https://www.instagram.com/reel/C4rQ8DYydwH/?igsh=ZnF6ZHE1em1haTlp>
- Akun Instagram Menlu RI Retno Marsudi. (2024f, March 26). *Jakarta* (26/3). <https://www.instagram.com/reel/C4-TaFTyqql/?igsh=MWlZcnZrY29ka3Rscw%3D%3D>
- Al Jazeera. (2023a, October 14). *On October 7, Gaza broke out of prison.*
<https://www.aljazeera.com/opinions/2023/10/14/on-october-7-gaza-broke-out-of-prison>
- Al Jazeera. (2023b, November 20). *Israeli tanks besiege Gaza's Indonesian Hospital.*
<https://www.aljazeera.com/news/2023/11/20/israeli-tanks-surround-gazas-indonesian-hospital-after-killing-12-people>
- Alexandra, F., & Mujiono, D. I. K. (2019). Pengantar Diplomasi: Sejarah, Teori dan Studi Kasus. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 1, Issue April). Mulawarman University Press.
- Amri, M. (2018). *Sejarah, Teologi, dan Kebudayaan Yahudi*. Penerbit Glosaria Media.
- Anadolu Ajansı. (2024, May 8). *Erdogan: Krisis di Gaza jelas bukan perang, melainkan upaya genosida.*
<https://www.aa.com.tr/id/dunia/erdogan-krisis-di-gaza-jelas-bukan-perang-melainkan-upaya-genosida/3153393>
- Anrian, A. (2023). Relasi Indonesia-Palestina pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 9(1), 125–143. <https://doi.org/10.33172/jdp.v9i2.10825>

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2023). *Majalah ARSIP: Geopolitik Indonesia dalam Arsip. Edisi 83*.
https://anri.go.id/storage/files/majalah_arsip_edisi_83_tahun_2023_1704425991.pdf
- ASEAN Main Portal. (n.d.). *About ASEAN*. Retrieved August 2, 2024, from <https://asean.org/about-asean>
- Ashari, K. (2020). *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aslamiah, S. (2015). Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau di PBB Tahun 2012. *Jom FISIP*, 2(2), 1–21. <https://media.neliti.com/media/publications/32782-ID-diplomasi-indonesia-dalam-mendukung-palestina-menjadi-negara-peninjau-di-pbb-tah.pdf>
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2023a). *Laporan Delegasi DPR RI: The 146 Assembly of the Inter-Parliamentary Union*.
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2023b). *Laporan Delegasi DPR RI Menghadiri Ninth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)*.
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2023c). *Laporan Delegasi DPR RI Menghadiri The 147th Assembly of Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings*.
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2023d). *Laporan Delegasi DPR RI Menghadiri The 17th Session of the PUIC Conference and Other Related Meetings*.
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2024a). *Laporan Delegasi DPR RI: 148th Inter-Parliamentary Union Assembly and Related Meetings*.
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2024b). *Laporan Delegasi DPR RI Dalam Rangka Menghadiri First Meeting Asian Parliamentary Assembly (APA) Committee on Palestine*.
- Badjojah, A. F., Husen, M., & Ahmad, S. (2021). Dinamika Konflik dan Upaya Konsensus Palestina-Israel (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 409–420.
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619>
- BBC News. (2023, December 30). *South Africa files ICJ case accusing Israel of "genocidal acts."* <https://www.bbc.com/news/world-africa-67844551>

- BBC News. (2024, January 30). *What is South Africa's genocide case against Israel at the ICJ?* <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67922346>
- BBC News Indonesia. (2023a, October 14). *Indonesia akan angkat perhatian soal Palestina di Dewan HAM PBB.* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clw79lwr894o>
- BBC News Indonesia. (2023b, November 22). *Israel serang Rumah Sakit Indonesia di Gaza, apa yang bisa dilakukan RI selanjutnya?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5p7nn5lnoy>
- Catherwood, C. (2006). *A Brief History of the Middle East: From Abraham to Arafat*. Carroll & Graf Publishers.
- Clausewitz, C. Von. (1976). *On War* (M. Howard & P. Paret (eds.)). Princeton University Press.
- CNBC Indonesia. (2023, November 21). *Sejarah RS Indonesia di Gaza, Mengapa Diserang Israel?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231121095959-4-490661/sejarah-rs-indonesia-di-gaza-mengapa-diserang-israel>
- CNBC Indonesia. (2024, January 20). *Menlu Retno Kumpulkan Pakar Hukum, Siapkan Upaya Gugat Israel?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240120132824-4-507479/menlu-retno-kumpulkan-pakar-hukum-siapkan-upaya-gugat-israel>
- CNN Indonesia. (2023, November 1). *Gagal Cegah Genosida di Palestina, Direktur HAM PBB Mundur.* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231101132829-134-1018613/gagal-cegah-genosida-di-palestina-direktur-ham-pbb-mundur>
- CNN Indonesia. (2024, January 18). *Kenapa Afrika Selatan Menggugat Israel ke ICJ?* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240118105006-120-1051122/kenapa-afrika-selatan-menggugat-israel-ke-icj>
- Databoks. (2023, December 21). *Survei Kurious: Banyak Orang Nilai PBB Tak Efektif Tangani Konflik Israel-Palestina.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/21/survei-kurios-banyak-orang-nilai-pbb-tak-efektif-tangani-konflik-israel-palestina>
- Databoks. (2024, March 28). *Hampir 6 Bulan Diserang Israel, 32 Ribu Orang Palestina Tewas.*

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/28/hampir-6-bulan-diserang-israel-32-ribu-orang-palestina-tewas>
- Dawisha, A. (2016). *Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to Despair*. Princeton University Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020, June 30). *Komisi I Menentang Upaya Aneksasi Tepi Barat oleh Israel*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29215/t/Komisi+I+Menentang+Upaya+Aneksasi+Tepi+Barat+oleh+Israel>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021, December 19). *Hadiri Pertemuan Parlemen OKI, DPR RI Soroti Ragam Masalah Dunia Islam*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36580/t/javascript;>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022, May 31). *Tegaskan Hubungan Indonesia-Palestina, GKSB Palestina Suarakan Kontribusi dan Rekonsiliasi Kepada Dunia*.
[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39052/t/Tegaskan Hubungan Indonesia-Palestina, GKSB Palestina Suarakan Kontribusi dan Rekonsiliasi Kepada Dunia](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39052/t/Tegaskan+Hubungan+Indonesia-Palestina,+GKSB+Palestina+Suarakan+Kontribusi+dan+Rekonsiliasi+Kepada+Dunia)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023, July 18). *Fadli Zon Didaulat Jadi Wakil Presiden Sidang Parlemen OKI: Tekankan Masalah Palestina Hingga Islamofobia*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45579/t/javascript;>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024a, January 17). *BKSAP DPR RI Dukung Gugatan Afsel terhadap Israel di Mahkamah Internasional PBB*.
[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48295/t/BKSAP DPR RI Dukung Gugatan Afsel terhadap Israel di Mahkamah Internasional PBB](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48295/t/BKSAP+DPR+RI+Dukung+Gugatan+Afsel+terhadap+Israel+di+Mahkamah+Internasional+PBB)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024b, January 28). *BKSAP Dukung Aksi 'Walk Out' Menlu Retno Menentang Israel di DK PBB*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48414/t/BKSAP+Dukung+Aksi+'Walk+Out'+Menlu+Retno+Menentang+Israel+di+DK+PBB>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024c, March 28). *UNRWA Apresiasi Komitmen DPR RI Dukung Misi Kemanusiaan di Palestina*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49044/t/UNRWA+Apresiasi+Komitmen+DPR+RI+Dukung+Misi+Kemanusiaan+di+Palestina>

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024d, May 28). *Parlemen Indonesia-RRT Sepakat Adanya Gencatan Senjata Permanen di Gaza dan Solusi Dua Negara*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49709/t/Parlemen-Indonesia-RRT-Sepakat-Adanya-Gencatan-Senjata-Permanen-di-Gaza-dan-Solusi-Dua-Negara>
- Dinnie, K. (2008). *Nation Branding: Concepts, Issues, Practice*. Elsevier.
- Diskominfo Kota Bandung. (2024, June 30). *Sejarah Konferensi Asia-Afrika, Peran Indonesia Hentikan Penjajahan*.
<https://jabarprov.go.id/berita/sejarah-konferensi-asia-afrika-peran-indonesia-hentikan-penjajahan-14185>
- Effendi, T. D. (2013). Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1), 47–61.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/540>
- EMedia DPR RI. (2023, November 20). *Sidang 'MIKTA Speakers Consultation' Ke-9 telah Usai, Hasilkan Berbagai Kesepakatan untuk Dunia yang Damai*.
<https://emedia.dpr.go.id/2023/11/20/sidang-mikta-speakers-consultation-ke-9-telah-usai-hasilkan-berbagai-kesepakatan-untuk-dunia-yang-damai/>
- Encyclopedia Britannica. (2021). *Mandate (League of Nations)*.
<https://www.britannica.com/topic/mandate-League-of-Nations>
- Encyclopedia Britannica. (2024a, March 15). *Camp David Accords*.
<https://www.britannica.com/event/Camp-David-Accords>
- Encyclopedia Britannica. (2024b, June 13). *Organization of the Islamic Cooperation*. <https://www.britannica.com/topic/Organization-of-the-Islamic-Cooperation>
- Encyclopedia Britannica. (2024c, June 21). *United Nations Resolution 181*. <https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Resolution-181>
- Erbas, I. (2022). Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 5087–5096.
<https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/2720>
- Fisipol UGM. (2024, June 3). *Retno Marsudi: Indonesia Berada pada Garis Terdepan Bela Palestina*. Fisipol UGM.

- <https://fisipol.ugm.ac.id/retno-marsudi-indonesia-berada-pada-garis-terdepan-bela-palestina/>
- Fudia, S. L., Fajrin, A. A., Chasanah, A. U., & Rizqi, A. B. Y. (2022). Konflik Kawasan: Studi kasus Sengketa Masjidil Al Aqsa. *Journal of Integrative International Relations*, 7(2), 133–147. <https://doi.org/10.15642/jiir.2022.7.2.133-147>
- Fuhaidah, U. (2012). Analisis Peluang Kedaulatan Negara Palestina. *Jurnal Review Politik*, 02(01), 114–134. <https://doi.org/10.15642/jrp.2012.2.1.114-134>
- Gandhi, T. W. (2009). *Akar Konflik Israel-Palestina: Tinjauan Demografi, Sejarah, Geopolitik dan Agama*. Ramadhan Press.
- George, D. L. (1938). *War Memoirs of David Lloyd George Volume I*. Odhams Press Limited London.
- Golan, G. J., & Yang, S.-U. (2015). Introduction: The Integrated Public Diplomacy Perspective. In G. J. Golan, S.-U. Yang, & D. F. Kinsey (Eds.), *International Public Relations and Public Diplomacy: Communication and Engagement*. Peter Lang Publishing.
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). *International Relations: 2013-2014 Update* (Tenth Ed.). Pearson Education.
- Hamas Media Office. (2024). *Our Narrative — Operation Al-Aqsa Flood*. https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/Our Narrative-Operation Al-Aqsa Flood-Web_compressed %281%29.pdf
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 4(2), 17–27. <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id/google-doc/1135834/prinsip-bebas-aktif-dalam-kebijakan-luar-negeri-indonesia-perspektif-teori-peran>
- Heywood, A. (2016). *Politik Global* (Ed. Kedua). Pustaka Pelajar.
- Hindun, H. (2018). Deklarasi Balfour: Tragedi Bagi Bangsa Palestina Dalam Puisi-Puisi Arab Tahun 1920-1948. *Jurnal CMES (Centre of Middle Eastern Studies)*, 11(2), 127–143. <https://doi.org/10.20961/cmcs.11.2.26990>
- Indonesiadefense.com. (2024, May 7). *Israel Tutup dan Ambil Alih Pintu Penyebrangan Rafah dari Gaza*. <https://indonesiadefense.com/israel-tutup-dan-ambil-alih-pintu-penyebrangan-rafah-dari-gaza/>

- Inter-Parliamentary Union. (n.d.). *About Us / Inter-Parliamentary Union*. Retrieved August 17, 2024, from <https://www.ipu.org/about-us>
- International Court of Justice. (2024). *Pending cases / INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*. <https://www.icj-cij.org/pending-cases>
- Ismail, M. (2011). Pemetaan dan Resolusi Konflik (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo). *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1), 71–94. <https://doi.org/10.15642/jsi.2011.1.1.1.%25p>
- Israel State Archives. (n.d.). *The Cairo Agreement: Israel's negotiations with the PLO, October 1993-May 1994*. Retrieved April 3, 2024, from <https://catalog.archives.gov.il/en/chapter/chapter-4-signing-the-cairo-agreement/>
- Jewish Virtual Library. (n.d.-a). *Balfour Declaration: Text of the Declaration (November 2, 1917)*. Retrieved July 24, 2024, from <https://www.jewishvirtuallibrary.org/text-of-the-balfour-declaration>
- Jewish Virtual Library. (n.d.-b). *British Palestine Mandate: The Peel Commission (July 1937)*. Retrieved March 30, 2024, from <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-peel-commission>
- Kaslam. (2021). Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik). *Review of International Relations*, 3(2), 113–128. <https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.23527>
- Kastrati, S. S. (2023). Ethics in Bilateral and Multilateral Diplomacy. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(2), 370–380. <https://ijssrr.com/journal/article/view/1008>
- Kaufman, J. P. (2022). *Introduction to International Relations: Theory and Practice* (Third Ed.). Rowman & Littlefield.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina. (n.d.-a). *Indonesia-Palestine*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Retrieved March 21, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/amman/id/pages/indonesia-palestine/2415/etc-menu>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina. (n.d.-b). *Sekilas Palestina*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Retrieved March 11, 2024, from https://www.kemlu.go.id/amman/id/pages/sekilas_palestine/2412/etc-menu

- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina. (2019, July 7). *Indonesia Hadiri Pertemuan CEAPAD Pertama di Tanah Palestina*. <https://kemlu.go.id/amman/id/news/1271/indonesia-hadiripertemuan-ceapad-pertama-di-tanah-palestina>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017, December 15). *Kenapa Indonesia Selalu Membela Palestina, Ini Penjelasan Menag*. <https://kemenag.go.id/nasional/kenapa-indonesia-selalu-membela-palestina-ini-penjelasan-menag-40xrfj>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023, November 12). *Desak Gencatan Senjata, Ini Empat Pesan Presiden Jokowi soal Palesina saat KTT OKI di Saudi*. <https://kemenag.go.id/internasional/desak-gencatan-senjata-ini-empat-pesan-presiden-jokowi-soal-palesina-saat-ktt-ok-di-saudi-ueo5F>
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (n.d.). *Pengertian Konflik*. Retrieved March 12, 2024, from https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/pengertian_konflik.html
- Kementerian Luar Negeri Republik. (2023, November 14). *Transkripsi Press Briefing Menlu RI Kunjungan Resmi Presiden RI ke Washington DC, Amerika Serikat 13 November 2023*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5500/siaran_pers/transkripsi-press-briefing-menlu-ri-kunjungan-resmi-presiden-ri-ke-washington-dc-amerika-serikat-13-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019a, April 8). *Keanggotaan Indonesia pada DK PBB*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019b, April 8). *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019c, November 3). *Menjaga Asa untuk Perdamaian di Rakhine State dan Palestina*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/751/berita/menjaga-asa-untuk-perdamaian-di-rakhine-state-dan-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, June 24). *Statement of The Minister For Foreign Affairs of The Republic of Indonesia*

- 21st Asean Political – Security Community (APSC) Meeting Jakarta, 24 June 2020.*
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1453/pidato/statement-of-the-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-21st-asean-political-security-community-apscc-meeting-jakarta-24-june-2020>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021a, May 20). *Pernyataan Y.M. Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 20 Mei 2021.*
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2493/berita/ Pernyataan-ym-retno-lp-marsudi-menteri-luar-negeri-republik-indonesia-20-mei-2021>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021b, July 14). *Menlu RI Serukan Dukungan terhadap Perjuangan Palestina di KTM GNB.* <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2704/berita/menlu-ri-serukan-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina-di-ktm-gnb>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022a, April 26). *Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina Melalui Pertemuan Luar Biasa OKI.*
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3556/berita/indonesia-galang-dukungan-untuk-palestina-melalui-pertemuan-luar-biasa-oki>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022b, September 23). *Indonesia Tetap Komitmen Bantu Pengungsi Palestina.*
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/4012/berita/indonesia-tetap-komitmen-bantu-pengungsi-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022c, September 26). *Hadiri Pertemuan GNB terkait Palestina di PBB, Menlu Retno sampaikan: “Hutang GNB atas Kemerdekaan Palestina.”*
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/4015/berita/hadiri-pertemuan-gnb-terkait-palestina-di-pbb-menlu-retno-sampaikan-hutang-gnb-atas-kemerdekaan-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022d, December 9). *Inter-Parliamentary Union (IPU).*
https://kemlu.go.id/portal/id/read/4257/halaman_list_lainnya/inter-parliamentary-union-ipu
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022e, December 9). *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).*
https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023a, January 19). *Di DK PBB, Menlu Retno Ajak Dunia Cari Solusi Damai bagi Palestina*. <https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/4371/berita/di-dk-pbb-menlu-retno-ajak-dunia-cari-solusi-damai-bagi-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023b, March 2). *Menlu Retno Serukan G20 Jadi Garda Terdepan untuk Bantuan Kemanusiaan*. <https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/4508/berita/menlu-retno-serukan-g20-jadi-garda-terdepan-untuk-bantuan-kemanusiaan>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023c, March 20). *Indonesia Dorong Pemajuan Hak-Hak Perempuan dalam Konferensi Tingkat Menteri OKI*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4552/view/indonesia-dorong-pemajuan-hak-hak-perempuan-dalam-konferensi-tingkat-menteri-oki>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023d, July 15). *Press Statement H.E. Retno L. P. Marsudi Minister For Foreign Affairs of The Republic of Indonesia on The Occasion of The Bilateral Meeting With H.E. Dr. Hakan Fidan Minister for Foreign Affairs of The Republic Of Türkiye*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/4980/siaran_pers/press-statement-he-retno-l-p-marsudi-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-on-the-occasion-of-the-bilateral-meeting-with-he-dr-hakan-fidan-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-trkiye
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023e, September 21). *Indonesia Dorong Peran OKI dalam Isu Hak Perempuan dan Masa Depan Palestina*. <https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/5283/berita/indonesia-dorong-peran-oki-dalam-isu-hak-perempuan-dan-masa-depan-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023f, October 25). *Sambutan Menlu RI Pada Peringatan UN Day, 24 Oktober 2024*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5424/siaran_pers/sambutan-menlu-ri-pada-peringatan-un-day-24-oktober-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023g, October 25). *Transcript Statement H.E. Retno L.P. Marsudi Minister For Foreign Affairs Republic Of Indonesia At the High-Level Open*

- Debate UN Security Council on the Situation In The Middle East Including the Palestinian Question New York, 24 October 2023.*
https://kemlu.go.id/portal/en/read/5421/siaran_pers/transcript-statement-he-retno-lp-marsudi-minister-for-foreign-affairs-republic-of-indonesia-at-the-high-level-open-debate-un-security-council-on-the-situation-in-the-middle-east-including-the-palestinian-question-new-york-24-october-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023h, October 27).
Statement By H.E. Retno L.P. Marsudi Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia At the Resumed 10th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly New York, 26 October 2023.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5430/pidato/statement-by-he-retno-lp-marsudi-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-at-the-resumed-10th-emergency-special-session-of-the-united-nations-general-assembly-new-york-26-october-2023>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023i, October 30).
Statement H.E. Retno L.P. Marsudi Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia on the Occasion of the Working Visit of H.E. Gabrielius Landsbergis Minister of Foreign Affairs Republic of Lithuania Jakarta, 30 October 2023.
https://kemlu.go.id/portal/en/read/5440/siaran_pers/statement-he-retno-lp-marsudi-minister-for-foreign-affairs-republic-of-indonesia-on-the-occasion-of-the-working-visit-of-he-gabrielius-landsbergis-minister-of-foreign-affairs-republic-of-lithuania-jakarta-30-october-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023j, October 31).
Dubes RI jadi Juru Bicara Duta Besar Negara OKI pada Pertemuan Di Senat Rumania Bahas Kondisi Palestina.
<https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/5451/berita/dubes-ri-jadi-juru-bicara-duta-besar-negara-oki-pada-pertemuan-di-senat-rumania-bahas-kondisi-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023k, October 31).
Press Statement H. E. Retno L. P. Marsudi Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on the Occasion of the Working Visit of H. E. Hanke Bruins Slot Minister for Foreign Affairs Kingdom of the Netherlands, Jakarta 31 October 2023.
https://kemlu.go.id/portal/en/read/5446/siaran_pers/press-

statement-h-e-retno-l-p-marsudi-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-on-the-occasion-of-the-working-visit-of-h-e-hanke-bruins-slot-minister-for-foreign-affairs-kingdom-of-the-netherlands-jakarta-31-october-2023

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023l, November 1). *Press Briefing Menlu RI terkait Palestina 1 November 2023*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5452/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-terkait-palestina-1-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023m, November 12). *Press Briefing Menlu RI KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Riyadh, 11 November 2023*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5481/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-ktt-luar-biasa-organisasi-kerja-sama-islam-ok-riyadh-11-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023n, November 14). *Joint Statement of the Leaders of the United States and the Republic of Indonesia: Elevating Relations to a Comprehensive Strategic Partnership*.
https://kemlu.go.id/portal/en/read/5499/siaran_pers/joint-statement-of-the-leaders-of-the-united-states-and-the-republic-of-indonesia-elevating-relations-to-a-comprehensive-strategic-partnership
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023o, November 18). *Joint Statement of Brunei Darussalam, Indonesia, and Malaysia on the Occasion of 30th APEC Economic Leaders' Meeting (AELM), San Francisco, United States of America 16-17 November 2023*.
https://www.kemlu.go.id/portal/en/read/5513/siaran_pers/joint-statement-of-brunei-darussalam-indonesia-and-malaysia-on-the-occasion-of-the-30th-apec-economic-leaders-meeting-aelm-san-francisco-united-states-of-america-16-17-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023p, November 18). *Press Briefing Menlu RI Kunjungan Presiden RI ke San Fransisco 17 November 2023*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5514/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-kunjungan-presiden-ri-ke-san-fransisco-17-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023q, November 20). *Transkripsi Press Briefing Menlu RI di Beijing, 20 November 2023*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5530/siaran_pers/transkripsi-

- press-briefing-menlu-ri-di-beijing-20-november-2023
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023r, November 21).
Transkripsi Press Briefing Menteri Luar Negeri RI Kunjungan Perwakilan OKI ke Moskow, 21 November 2023.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5536/siaran_pers/transkripsi-press-briefing-menteri-luar-negeri-ri-kunjungan-perwakilan-okike-moskow-21-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023s, November 23).
Transkrip Press Briefing Menlu RI Kunjungan ke London dan Paris 22 November 2023.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5543/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-kunjungan-ke-london-dan-paris-22-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023t, November 29).
Transkrip Press Briefing Menlu RI SMU PBB, New York, 28 November 2023.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5552/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-smu-pbb-new-york-28-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023u, November 30).
Transkripsi Press Briefing Menlu RI, New York, 29 November 2023.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5560/siaran_pers/transkripsi-press-briefing-menlu-ri-new-york-29-november-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023v, December 2).
Presiden Jokowi dan Sekjen PBB Bahas Aksi Iklim hingga Situasi di Gaza. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5573/berita/presiden-jokowi-dan-sekjen-pbb-bahas-aksi-iklim-hingga-situasi-di-gaza>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023w, December 10).
Transkrip Press Briefing Menteri Luar Negeri RI Pertemuan Khusus Executive Board WHO Jenewa, 10 Desember 2023.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5593/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menteri-luar-negeri-ri-pertemuan-khusus-executive-board-who-jenewa-10-desember-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023x, December 12).
Indonesia Tegaskan Dukungan terhadap Palestina pada Peringatan 75 Tahun Deklarasi HAM.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5595/berita/indonesia-tegaskan-dukungan-terhadap-palestina-pada-peringatan-75-tahun-deklarasi>

ham

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023y, December 13). *Indonesia Bantu Mobilisasi Negara Kawasan untuk Dukung Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Melalui Majelis Umum PBB*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5605/view/indonesia-bantu-mobilisasi-negara-kawasan-untuk-dukung-resolusi-gencatan-senjata-di-gaza-melalui-majelis-umum-pbb>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023z, December 13). *Transkrip Press Briefing Menteri Luar Negeri RI Peringatan 75 Tahun Universal Declaration Of Human Rights 11-12 Desember 2023*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5599/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menteri-luar-negeri-ri-peringatan-75-tahun-universal-declaration-of-human-rights-11-12-desember-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023aa, December 21). *Transkripsi Press Briefing Kunjungan Kerja Menlu RI ke Aljazair, 20 Desember 2023*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5638/siaran_pers/transkripsi-press-briefing-kunjungan-kerja-menlu-ri-ke-aljazair-20-desember-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023ab, December 22). *Transkrip Press Briefing Kunjungan Kerja Menlu RI ke Tunisia 21 Desember 2023*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5640/siaran_pers/transkrip-press-briefing-kunjungan-kerja-menlu-ri-ke-tunisia-21-desember-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023ac, December 22). *Transkrip Press Briefing Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri Ke Maroko, 22 Desember 2023*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5642/siaran_pers/transkrip-press-briefing-kunjungan-kerja-menteri-luar-negeri-ke-maroko-22-desember-2023
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024a, January 6). *Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2024*. <https://www.kemlu.go.id/hanoi/id/news/27621/pernyataan-pers-tahunan-menlu-pptm-2024>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024b, January 8). *Indonesia Konsisten Perjuangkan Hak dan Kemerdekaan Bangsa Palestina*. <https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/5661/berita/indonesia->

- konsisten-perjuangkan-hak-dan-kemerdekaan-bangsa-palestina
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024c, January 8). *Pidato Menlu Pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2024*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5658/pidato/pidato-menlu-pada-pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2024>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024d, January 10). *Transkrip Press Briefing Menlu RI Kunjungan Presiden Ke Manila, Filipina 10 Januari 2024*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5671/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-kunjungan-presiden-ke-manila-filipina-10-januari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024e, January 16). *Menlu Jaring Masukan Pakar Jelang Pernyataan di Mahkamah Internasional terkait Palestina*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5689/berita/menlu-jaring-masukan-pakar-jelang-pernyataan-di-mahkamah-internasional-terkait-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024f, January 20). *KTT GNB ke-19: Indonesia Dorong Keanggotaan Penuh Palestina di PBB*. <https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/5696/berita/ktt-gnb-ke-19-indonesia-dorong-keanggotaan-penuh-palestina-di-pbb>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024g, January 24). *Transkrip Press Briefing Menlu RI Open Debate DK PBB Mengenai Palestina 23 Januari 2024*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5701/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-open-debate-dk-pbb-mengenai-palestina-23-januari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024h, January 29). *Press Briefing Menlu RI AMM Retreat Luang Prabang, 29 Januari 2024*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5715/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-amm-retreat-luang-prabang-29-januari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024i, January 31). *Press Briefing Menlu RI Den Haag Belanda, 31 Januari 2024*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5724/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-den-haag-belanda-31-januari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024j, February 3). *Press Briefing Menlu RI Brussel, Belgia 2 Februari 2024*.

- https://kemlu.go.id/portal/id/read/5729/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-brussel-belgia-2-februari-2024
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024k, February 19).
Transkrip Press Briefing Menlu RI Doha, 19 Februari 2024.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5752/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-doha-19-februari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024l, February 22).
Press Briefing Kunjungan Menteri Luar Negeri Rangkaian G20 Foreign Ministers' Meeting dan MIKTA Rio De Janeiro, 21 Februari 2024.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5758/siaran_pers/press-briefing-kunjungan-menteri-luar-negeri-rangkaian-g20-foreign-ministers-meeting-dan-mikta-rio-de-janeiro-21-februari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024m, February 23).
Indonesia Sampaikan Pernyataan Lisan dukung Palestina di Mahkamah Internasional.
<https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/5771/berita/indonesia-sampaikan-pernyataan-lisan-dukung-palestina-di-mahkamah-internasional>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024n, February 23).
Press Briefing Menlu RI Den Haag, 23 Februari 2024.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5772/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-den-haag-23-februari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024o, February 27).
Press Briefing Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri ke Jenewa, 26 Februari 2024.
https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5777/siaran_pers/press-briefing-kunjungan-kerja-menteri-luar-negeri-ke-jenewa-26-februari-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024p, February 29).
Menlu RI Perjuangkan Hak Rakyat Palestina pada Sidang Dewan HAM PBB ke -55 di Jenewa.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5782/berita/menlu-ri-perjuangkan-hak-rakyat-palestina-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke-55-di-jenewa>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024q, April 2). *Menlu RI Terima Penghargaan dari Negara-Negara Arab atas Konsistensi Dukung Palestina.*

- <https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/5843/berita/menlu-ri-terima-penghargaan-dari-negara-negara-arab-atas-konsistensi-dukung-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024r, April 18). *Pernyataan Pers Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT)*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5862/siaran_pers/pernyataan-pers-pertemuan-bilateral-menteri-luar-negeri-republik-indonesia-dengan-menteri-luar-negeri-republik-rakyat-tiongkok-rrt
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024s, May 5). *Press Briefing Kunjungan Menteri Luar Negeri the 15th Session of the Islamic Summit Conference Banjul, 4-5 Mei 2024*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5901/siaran_pers/press-briefing-kunjungan-menteri-luar-negeri-the-15th-session-of-the-islamic-summit-conference-banjul-4-5-mei-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024t, May 6). *Menlu RI: OKI Harus Bersatu Bela Keadilan dan Kemanusiaan untuk Palestina*.
<https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/5905/berita/menlu-ri-oki-harus-bersatu-bela-keadilan-dan-kemanusiaan-untuk-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024u, May 9). *Ketua DPR RI Pimpin Delegasi Indonesia dalam Pertemuan MIKTA ke-10 di Meksiko: Diskusi Perdamaian Dunia, Kesetaraan Gender, dan Ekonomi Berkelanjutan*.
<https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/5916/berita/ketua-dpr-ri-pimpin-delegasi-indonesia-dalam-pertemuan-mikta-ke-10-di-meksiko-diskusi-perdamaian-dunia-kesetaraan-gender-dan-ekonomi-berkelanjutan>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024v, May 11). *Indonesia Mendorong Terobosan Pemberian Hak Istimewa Kepada Palestina Pada Sidang Darurat Majelis Umum PBB*.
<https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/5911/berita/indonesia-mendorong-terobosan-pemberian-hak-istimewa-kepada-palestina-pada-sidang-darurat-majelis-umum-pbb>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024w, May 19). *Menlu RI Bertemu Presiden SMU PBB Bahas Isu Palestina & Perubahan Iklim*. <https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/5929/berita/menlu-ri>

- bertemu-presiden-smu-pbb-bahas-isu-palestina-perubahan-iklim
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024x, May 28). *Menlu RI Desak Negara-negara Eropa untuk Dorong Implementasi Two State Solution*.
<https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/5944/berita/menlu-ri-desak-negara-negara-eropa-untuk-dorong-implementasi-two-state-solution>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024y, May 28). *Press Briefing Kunjungan Menteri Luar Negeri Ministerial Level Meeting the Follow-Up of the Riyadh Meeting Brussels*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5943/siaran_pers/press-briefing-kunjungan-menteri-luar-negeri-ministerial-level-meeting-the-follow-up-of-the-riyadh-meeting-brussels
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024z, June 3). *Kuliah Umum Menteri Luar Negeri RI Diplomasi Indonesia Untuk Palestina “All Eyes On Rafah” di Universitas Gadjah Mada, 3 Juni 2024*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5952/pidato/kuliah-umum-menteri-luar-negeri-ri-diplomasi-indonesia-untuk-palestina-all-eyes-on-rafaq-di-universitas-gadjah-mada-3-juni-2024>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024aa, June 3). *Menlu Jabarkan Diplomasi Indonesia untuk Palestina “All Eyes on Rafah” di UGM Yogyakarta*.
<https://hanoi.kemlu.go.id/portal/id/read/5951/berita/menlu-jabarkan-diplomasi-indonesia-untuk-palestina-all-eyes-on-rafaq-di-ugm-yogyakarta>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ab, June 6). *Kemlu Selenggarakan Road to Platinum Jubilee Jelang Peringatan 70 Tahun KAA*.
<https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/5961/berita/kemlu-selenggarakan-road-to-platinum-jubilee-jelang-peringatan-70-tahun-kaa>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ac, June 6). *Menlu RI - Rwanda Bertemu di Jakarta Bahas Kerja Sama Bilateral & Isu Global*. <https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/5967/berita/menlu-ri-rwanda-bertemu-di-jakarta-bahas-kerja-sama-bilateral-isu-global>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ad, June 9). *Press Briefing Kunjungan Menteri Luar Negeri Extraordinary Meeting of the D-8 Council of Foreign Ministers to Discuss the Situation in*

- Gaza Istanbul, 8 Juni 2024.*
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5968/siaran_pers/press-briefing-kunjungan-menteri-luar-negeri-extraordinary-meeting-of-the-d-8-council-of-foreign-ministers-to-discuss-the-situation-in-gaza-istanbul-8-juni-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ae, June 12). *Press Briefing Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri ke Oslo 11 Juni 2024.* https://kemlu.go.id/portal/id/read/5972/siaran_pers/press-briefing-kunjungan-kerja-menteri-luar-negeri-ke-oslo-11-juni-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024af, June 14). *Transkrip Press Briefing Menlu RI Kunjungan Kerja ke Helsinki 13 Juni 2024.*
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5980/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-kunjungan-kerja-ke-helsinki-13-juni-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ag, June 24). *Indonesia Konsisten Dukung Palestina pada PTM ACD ke-19.*
<https://kemlu.go.id/portal/idakun/read/5997/berita/indonesia-konsisten-dukung-palestina-pada-ptm-acd-ke-19>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ah, June 26). *Pertemuan Bilateral Menlu RI – Austria, Indonesia Ajak Austria Akui Palestina.*
<https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/6005/berita/pertemuan-bilateral-menlu-ri-austria-indonesia-ajak-austria-akui-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ai, June 27). *Pertemuan Bilateral RI - Slovenia, Menlu RI Apresiasi Pengakuan Slovenia untuk Palestina.*
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/6007/view/pertemuan-bilateral-ri-slovenia-menlu-ri-apresiasi-pengakuan-slovenia-untuk-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024aj, July 1). *Kunjungan Menteri Luar Negeri The 3rd Meeting of Special Envoys on Afghanistan, Doha, 1 Juli 2024.*
https://kemlu.go.id/portal/id/read/6015/siaran_pers/kunjungan-menteri-luar-negeri-the-3rd-meeting-of-special-envoys-on-afghanistan-doha-1-juli-2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ak, July 3). *Transkrip Press Briefing Kunjungan Kerja Menlu RI ke Kuala Lumpur & Putrajaya, 3 Juli 2024.*
https://kemlu.go.id/portal/id/read/6023/siaran_pers/transkrip-press-

- briefing-kunjungan-kerja-menlu-ri-ke-kuala-lumpur-putrajaya-3-juli-2024
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024al, July 4). *Indonesia telah menjadi Tuan Rumah Kunjungan Delegasi Biro Komite Palestina PBB*.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/6026/berita/indonesia-telah-menjadi-tuan-rumah-kunjungan-delegasi-biro-komite-palestina-pbb>
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024am, July 10). *Keynote Address H. E. Retno L. P. Marsudi Minister for Foreign Affairs the Republic of Indonesia at the International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy: “Multi-Faith Collaborations in an Inclusive Society.”*
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/6036/pidato/keynote-address-h-e-retno-l-p-marsudi-minister-for-foreign-affairs-the-republic-of-indonesia-at-the-international-conference-on-cross-cultural-religious-literacy-multi-faith-collaborations-in-an-inclusive-society>
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024an, July 14). *Melalui UNRWA, Indonesia Tingkatkan Kontribusi Bagi Pengungsi Palestina*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/6041/view/melalui-unrwa-indonesia-tingkatkan-kontribusi-bagi-pengungsi-palestina>
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ao, July 17). *Indonesia dan Uni Eropa Sepakat Jajaki Kerja Sama Pemajuan dan Perlindungan HAM*.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/6053/berita/indonesia-dan-uni-eropa-sepakat-jajaki-kerja-sama-pemajuan-dan-perlindungan-ham>
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ap, July 24). *Isu Palestina*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024aq, July 24). *Menlu RI: Pemajuan HAM Kawasan, Kunci Masa Depan ASEAN yang Gemilang*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6083/berita/menlu-ri-pemajuan-ham-kawasan-kunci-masa-depan-asean-yang-gemilang
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ar, July 25). *Menlu RI: ASEAN Bukan Proksi Siapapun*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6090/berita/menlu

- ri-asean-bukan-proksi-siapapun
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024as, July 25). *Menlu RI : Visi Komunitas ASEAN Harus Berorientasi ke Depan*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6091/berita/menlu-ri-visi-komunitas-asean-harus-berorientasi-ke-depan
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024at, July 26).
Indonesia Ajak Inggris Dukung AOIP.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6102/berita/indonesia-ajak-inggris-dukung-aoip
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024au, July 26).
Indonesia Dorong ASEAN-INDIA Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan & Maritim.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6095/berita/indonesia-dorong-asean-india-perkuat-kerja-sama-ketahanan-pangan-maritim
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024av, July 26).
Indonesia Dorong ASEAN - Kanada Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6101/berita/indonesia-dorong-asean-kanada-perkuat-kerja-sama-ketahanan-pangan
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024aw, July 26). *Menlu Dorong ASEAN – Rusia untuk Perkuat Ketahanan Pangan*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6099/berita/menlu-dorong-asean-rusia-untuk-perkuat-ketahanan-pangan
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ax, July 26). *Menlu Jabarkan Prioritas RI Sebagai Koordinator Kemitraan ASEAN-Australia*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6100/berita/menlu-jabarkan-prioritas-ri-sebagai-koordinator-kemitraan-asean-australia
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ay, July 26). *Menlu RI : Kemitraan ASEAN-Jepang Harus Berorientasi Masa Depan*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6097/berita/menlu-ri-kemitraan-asean-jepang-harus-berorientasi-masa-depan
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024az, July 26). *Menlu RI: Penghormatan terhadap Hukum Internasional Berlaku Untuk Semua*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6096/berita/menlu

- ri-penghormatan-terhadap-hukum-internasional-berlaku-untuk-semua
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024ba, July 26). *Menlu RI Dorong Korea Selatan Kembangkan Ekosistem EV di Kawasan*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6098/berita/menlu-ri-dorong-korea-selatan-kembangkan-ekosistem-ev-di-kawasan
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024bb, July 27). *Indonesia Minta AS Hormati Hukum Internasional secara Konsisten*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6106/berita/indonesia-minta-as-hormati-hukum-internasional-secara-konsisten
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024bc, July 27). *Menlu RI : Revitalisasi ASEAN Regional Forum Penting di tengah Tantangan Dunia yang Semakin Kompleks*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6107/berita/menlu-ri-revitalisasi-asean-regional-forum-penting-di-tengah-tantangan-dunia-yang-semakin-kompleks
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024bd, July 27). *Menlu RI: Hukum Internasional Harus Diterapkan Secara Konsisten*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6104/berita/menlu-ri-hukum-internasional-harus-diterapkan-secara-konsisten
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024be, July 27). *Transcript Opening Remarks by Minister of Foreign Affairs of Republic of Indonesia ASEAN Post Ministerial Conference with United States 27 July 2024*.
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/6105/pidato/transcript-opening-remarks-by-minister-of-foreign-affairs-of-republic-of-indonesia-asean-post-ministerial-conference-with-united-states-27-july-2024>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024bf, July 30). *Selandia Baru Tegaskan Dukung Kedaulatan dan Engagement Indonesia di Pasifik*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6114/berita/selandia-baru-tegaskan-dukung-kedaulatan-dan-engagement-indonesia-di-pasifik
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024bg, July 31). *Indonesia-GCC Tegaskan Komitmen Kerja Sama di Berbagai Bidang*.
https://kemlu.go.id/portal/idfoto_dan_video/read/6119/berita/indonesia-gcc-tegaskan-komitmen-kerja-sama-di-berbagai-bidang

- esia-gcc-tegaskan-komitmen-kerja-sama-di-berbagai-bidang
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022, October 24).
Mendag Dampingi Presiden RI Menerima Kunjungan Perdana Menteri Palestina.
<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-dampingi-presiden-ri-menerima-kunjungan-perdana-menteri-palestina>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2015, January 8).
Bantah Tarik Diri Dari Internasional, Menlu: Indonesia Terus Mainkan Peran Middle Power.
https://www.setneg.go.id/baca/index/bantah_tarik_diri_dari_internasional_menlu_indonesia_terus_mainkan_peran_middle_power
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016a, March 2).
Gerakan Perdamaian untuk Palestina Melalui KTT LB ke-5 OKI.
https://www.setneg.go.id/baca/index/gerakan_perdamaian_untuk_palestina_melalui_ktt_lb_ke-5_oki
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016b, March 6).
Bertemu di KTT LB OKI, Indonesia-Mauritania Tingkatkan Hubungan Bilateral.
https://setneg.go.id/baca/index/bertemu_di_ktt_lb_oki_indonesia-mauritania_tingkatkan_hubungan_bilateral
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016c, March 6).
Dari Perdangangan Hingga Misi Perdamaian Indonesia dan Siera Leone.
https://www.setneg.go.id/baca/index/dari_perdangangan_hingga_misi_perdamaian_indonesia_dan_siera_leone
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016d, March 6).
Mulai Isu Palestina Hingga Hubungan Bilateral Indonesia-Gambia.
https://www.setneg.go.id/baca/index/mulai_isu_palestina_hingga_hubungan_bilateral_indonesia-gambia
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016e, March 6).
Pertemuan Bilateral Menlu RI-Menlu Tajikistan pada KTT LB OKI Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
https://www.setneg.go.id/baca/index/pertemuan_bilateral_menlu_ri-menlu_tajikistan_pada_ktt_lb_oki_palestina_dan_al-quds_al-sharif
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016f, March 6).
Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan Menlu Republik Arab Mesir

- pada KTT LB OKI ke-5.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/pertemuan_bilateral_menlu_ri_dengan_menlu_republik_arab_mesir_pada_ktt_lb_oki_ke-5
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016g, March 6). *Pertemuan Bilateral Menlu RI Menlu Afghanistan pada KTT LB ke-5 OKI.*
- https://www.setneg.go.id/baca/index/pertemuan_bilateral_menlu_ri_hatmenlu_afghanistan_pada_ktt_lb_ke-5_oki_ha
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016h, March 7). *RI dan Sudan Sepakat Dukung Palestina.*
- https://www.setneg.go.id/baca/index/ri_dan_sudan_sepakat_dukung_palestina
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016i, May 20). *Pidato Presiden RI - Sidang Pleno KTT Asean-Rusia ke-20, Rusia, 20 Mei 2016.*
- https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_ri_-_sidang_pleno_ktt_asean-rusia_ke-20_rusia_20_mei_2016
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018a, May 2). *Perjanjian Kerjasama Indonesia Dan Palestina.*
- https://setneg.go.id/baca/index/perjanjian_kerjasama_indonesia_dan_palestina
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018b, May 11). *Presiden Jokowi: Palestina Selalu Ada dalam Helaan Napas Diplomasi Indonesia.*
- https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_palestina_selalu_ada_dalam_helaan_napas_diplomasi_indonesia
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018c, September 3). *Indonesia-Australia Sepakat Tingkatkan Hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif.*
- https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_australia_sepakat_tingkatkan_hubungan_menjadi_kemitraan_strategis_komprehensif
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018d, November 15). *Indonesia Angkat Isu Penanggulangan Sampah Plastik di Lautan.*
- https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_angkat_isu_penanggulangan_sampah_plastik_di_lautan
 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018e, November 15). *Indonesia Dorong ASEAN dan Rusia Perkuat Kerja Sama*

- Berbagai Bidang.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_dorong_asean_dan_rusia_perkuat_kerja_sama_berbagai_bidang
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018f, November 15). *Indonesia Tegaskan “Two State Solution” sebagai Solusi Perdamaian Palestina-Israel.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_tegaskan_two_state_solution_sebagai_solusi_perdamaian_palestina_israel
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022, October 24). *Keterangan Pers Bersama usai Pertemuan Bilateral Indonesia – Palestina.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan_pers_bersama_usa_i_pertemuan_bilateral_indonesia_palestina
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023a, November 11). *Indonesia-Turki akan Terus Kerja Sama Bantu Palestina.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_turki_akan_terus_kerja_sama_bantu_palestina
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023b, November 22). *Bahas Perdamaian Dunia, Indonesia dan Yunani Sepakat Dukung Penyelesaian Konflik Israel-Palestina.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/bahas_perdamaian_dunia_indonesia_dan_yunani_sepakat_dukung_penyelesaian_konflik_israel_palestina
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023c, November 23). *Bertemu Uskup Agung Athena, Wapres Sampaikan Konsep Bhinneka Tunggal Ika dan Ajakan Redam Eskalasi Konflik di Jalur Gaza.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/bertemu_uskup_agung_athena_wapres_sampaikan_konsep_bhinneka_tunggal_ika_dan_ajakan_redam_eskalasi_konflik_di_jalur_gaza
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023d, November 27). *Bertemu Presiden Slovakia, Wapres Soroti Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Semua Sektor.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/bertemu_presiden_slovakia_wapres_soroti_pentingnya_pemberdayaan_perempuan_di_semua_sektor
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023e, November 27). *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peresmian Pembukaan*

- R20 International Summit of Religious Authorities.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_joko_widodo_pada_peresmian_pembukaan_r20_international_summit_of_religious_authorities
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023f, November 28). *Kepada PM Malaysia, Wapres Minta Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditingkatkan.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/kepada_pm_malaysia_wapres_minta_perlindungan_terhadap_pekerja_migran_indonesia_ditingkatkan
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024a, January 27). *Menlu Walk Out saat Dubes Israel Berpidato di PBB, Wapres: Itu Sikap Kita!*
https://www.setneg.go.id/baca/index/menlu_walk_out_saar_dubes_israel_berpidato_di_pbb_wapres_itu_sikap_kita
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024b, February 28). *Indonesia dan Selandia Baru Sepakat Dukung Gencatan Senjata di Palestina.*
https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_dan_selandia_baru_sepakat_dukung_gencatan_senjata_di_palestina
- Kimmerling, B., & Migdal, J. S. (2003). *The Palestinian People: A History* (Issue 112). Harvard University Press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Pernyataan Komnas HAM Terkait Gugatan Afrika Selatan Terhadap Israel Atas Dugaan Genosida di Gaza Palestina.*
[https://www.komnasham.go.id/files/20240109-keterangan-pers-nomor-04-hm-00-\\$W8DMZZ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20240109-keterangan-pers-nomor-04-hm-00-$W8DMZZ.pdf)
- Kompas.com. (2022, September 26). *Menlu Retno: Membebaskan Palestina dari Penjajahan adalah Utang Kita Bersama.*
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/26/10565321/menlu-retno-membebankan-palestina-dari-penjajahan-adalah-utang-kita-bersama>
- Kompas.com. (2023, May 11). *ASEAN Desak Israel-Palestina Negosiasi Capai Perdamaian Abadi.*
<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/11/19525311/asean-desak-israel-palestina-negosiasi-capai-perdamaian-abadi>
- Kompas.com. (2024, January 25). *Menlu Retno "Walk Out" Saat Israel Sampaikan Pernyataan di DK PBB, Ini Alasannya...*

- <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/25/143000665/menlu-retno-walk-out-saat-israel-sampaikan-pernyataan-di-dk-pbb-ini?page=all>
- Kompas.tv. (2024, January 23). *Hamis Terbitkan Laporan Resmi tentang Alasan Serang Israel dalam Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober*. <https://www.kompas.tv/internasional/479137/hamas-terbitkan-laporan-resmi-tentang-alasan-serang-israel-dalam-operasi-banjir-al-aqsa-7-oktober>
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Kerajaan Arab Saudi. (2023, October 18). *Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri OKI untuk Membahas Situasi yang Semakin Memburuk di Gaza*. <https://kemlu.go.id/jeddah/id/news/26767/pertemuan-luar-biasa-tingkat-menteri-luar-negeri-oki-untuk-membahas-situasi-yang-semakin-memburuk-di-gaza>
- Kristiana, C., & Benito, R. (2023). Implementasi Diplomasi Pendidikan dan Diplomasi Budaya melalui Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). *Indonesian Perspective*, 8(1), 121–153. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56382>
- Kristiyanto, H. (2023). *Geopolitik Bung Karno: Progressive Geopolitical Coexistence* (Vol. 1). Unhan RI Press.
- Kusman, A. P. (2022). Politik Sosio-Nasionalisme Sukarno dan Kebangsaan Progresif. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 65–79. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/79636>
- Kusno, M. (2014). Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v3i1.65>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2019). *Menjaga Asa untuk Perdamaian di Rakhine State dan Palestina*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/menjaga-asa-untuk-perdamaian-di-rakhine-state-dan-palestina/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2020, September 23). *Pidato Presiden Republik Indonesia Pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-sesi-debat-umum-sidang-majelis-umum-ke-75-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2021a, May 10). *Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap*

- Warga Palestina*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-kecam-aksi-pengusiran-dan-kekerasan-israel-terhadap-warga-palestina/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2021b, May 12). *Menlu RI: Indonesia Kerahkan Upaya Maksimal Bantu Perjuangkan Hak-Hak Rakyat Palestina*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/menlu-ri-indonesia-kerahkan-upaya-maksimal-bantu-perjuangkan-hak-hak-rakyat-palestina/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2021c, May 15). *Presiden Jokowi Minta Agresi Israel ke Palestina Dihentikan*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-minta-agresi-israel-ke-palestina-dihentikan/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2021d, September 23). *Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Jokowi Sampaikan Pandangan Soal Pandemi hingga Perdamaian Dunia*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pidato-di-sidang-umum-pbb-president-jokowi-sampaikan-pandangan-soal-pandemi-hingga-perdamaian-dunia/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2022, October 24). *Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Resmi Perdana Menteri Palestina di Istana Bogor*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-sambut-kunjungan-resmi-perdana-menteri-palestina-di-istana-bogor/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023a, March 28). *Pernyataan Presiden RI terkait Penyelenggaraan Piala Dunia U-20*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/ Pernyataan-presiden-ri-terkait-penyelenggaraan-piala-dunia-u-20/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023b, May 23). *Indonesia-Iran Bahas Situasi Geopolitik Global dan Peningkatan Kerja Sama Sejumlah Bidang*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-iran-bahas-situasi-geopolitik-global-dan-peningkatan-kerja-sama-sejumlah-bidang/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023c, May 23). *Pernyataan Pers Presiden Republik Indonesia pada Pernyataan Pers Bersama Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Republik Islam Iran*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/ Pernyataan-pers-presiden-republik-indonesia-pada- Pernyataan-pers-bersama-presiden-republik-islam-iran/>

- republik-indonesia-dengan-presiden-republik-islam-iran/
 Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023d, August 7). *Bertemu Sekjen OKI, Presiden Jokowi Bahas Isu Pembakaran Al-Qur'an hingga Rohingya*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/bertemu-sekjen-oki-presiden-jokowi-bahas-isu-pembakaran-al-quran-hingga-rohingya/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023e, October 10). *Indonesia Desak Penghentian Tindak Kekerasan di Daerah Konflik Palestina-Israel*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-desak-penghentian-tindak-kekerasan-di-daerah-konflik-palestina-israel/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023f, October 10). *Pernyataan Presiden Republik Indonesia Terkait Situasi Terkini Konflik Palestina-Israel*. <https://www.presidenri.go.id/transkrip/ Pernyataan-presiden-republik-indonesia-terkait-situasi-terkini-konflik-palestina-israel/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023g, October 19). *Indonesia-Arab Saudi Sepakat Perkuat Kerja Sama Melalui Dewan Koordinasi Tertinggi*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-arab-saudi-sepakat-perkuat-kerja-sama-melalui-dewan-koordinasi-tertinggi/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023h, October 19). *Indonesia Kecam Tindak Kekerasan dan Serangan di Palestina*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-kecam-tindak-kekerasan-dan-serangan-di-palestina/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023i, October 20). *Opening Remarks Presiden Republik Indonesia sebagai Chair ASEAN pada Sidang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN – Gulf Cooperation Council (GCC)*. <https://www.presidenri.go.id/transkrip/opening-remarks-presiden-republik-indonesia-sebagai-chair-asean-pada-sidang-konferensi-tingkat-tinggi-ktt-asean-gulf-cooperation-council-gcc/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023j, October 30). *Indonesia Kutuk Keras Serangan Israel pada Masyarakat Sipil di Gaza*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-kutuk-keras-serangan-israel-pada-masyarakat-sipil-di-gaza/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023k, November 5). *Sampaikan Simpati untuk Palestina, Ibu Iriana: Hentikan Perang,*

- Ciptakan Kehidupan Damai*. <https://www.presidentri.go.id/ibu-negara/sampaikan-simpati-untuk-palestina-ibu-iriana-hentikan-perang-ciptakan-kehidupan-damai/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023l, November 11). *Presiden Jokowi: OKI Harus Bersatu dan Berada di Depan Selesaikan Krisis di Gaza*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-oki-harus-bersatu-dan-berada-di-depan-selesaikan-krisis-di-gaza/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023m, November 11). *Presiden Jokowi Tiba di Riyadh untuk Hadiri KTT Luar Biasa OKI*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tiba-di-riyadh-untuk-hadiri-ktt-luar-biasa-oki/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023n, November 11). *Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI)*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/presiden-republik-indonesia-pada-konferensi-tingkat-tinggi-ktt-luar-biasa-lb-organisasi-kerjasama-islam-oki/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023o, November 12). *Bertemu Raja Yordania, Presiden Jokowi: Posisi Indonesia dan Yordania Sama Soal Palestina*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bertemu-raja-yordania-presiden-jokowi-posisi-indonesia-dan-yordania-sama-soal-palestina/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023p, November 12). *Dari Riyadh Presiden Jokowi Bertolak ke AS*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/dari-riyadh-presiden-jokowi-bertolak-ke-as/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023q, November 13). *Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI)*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/keterangan-pers-presiden-republik-indonesia-terkait-konferensi-tingkat-tinggi-ktt-luar-biasa-lb-organisasi-kerjasama-islam-oki/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023r, November 13). *Presiden Jokowi Ajak Amerika Serikat Bela Keadilan dan Kemanusiaan di Palestina*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-ajak-amerika-serikat-bela-keadilan-dan->

- kemanusiaan-di-palestina/
Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023s, November 13). *Presiden Jokowi akan Sampaikan Pesan Kuat Hasil KTT OKI kepada Presiden Biden*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-akan-sampaikan-pesan-kuat-hasil-ktt-ok-kepada-president-biden/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023t, November 14). *Presiden Jokowi: Indonesia Dipersatukan oleh Keberagaman*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-indonesia-dipersatukan-oleh-keberagaman/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023u, December 16). *Presiden Jokowi dan PM Kishida Bahas Kerja Sama Bilateral Sejumlah Bidang hingga Isu Palestina*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-dan-pm-kishida-bahas-kerja-sama-bilateral-sejumlah-bidang-hingga-isu-palestina/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023v, December 17). *Presiden Jokowi: Kemitraan ASEAN–Jepang Harus Jadi Solusi Jaga Stabilitas dan Perdamaian*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-kemitraan-asean-jepang-harus-jadi-solusi-jaga-stabilitas-dan-perdamaian/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2024a, January 26). *Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Terkait Dukungan untuk Palestina*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/keterangan-pers-president-republik-indonesia-terkait-dukungan-untuk-palestina/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2024b, April 18). *Presiden Jokowi dan Menlu Wang Yi Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-dan-menlu-wang-yi-bahas-kerja-sama-ekonomi-dan-situasi-timur-tengah/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2024c, May 20). *Presiden Jokowi Dorong Penyelesaian Situasi di Palestina Saat Bertemu Presiden Majelis Umum PBB*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-dorong-penyelesaian-situasi-di-palestina-saat-bertemu-president-majelis-umum-pbb/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2024d, June 1). *Presiden*

- Jokowi Kecam Keras Serangan Israel ke Rafah*.
<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-kecam-keras-serangan-israel-ke-rafah/>
- Laman Resmi Presiden Republik Indonesia. (2024e, July 9). *Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Grand Syekh Al Azhar, Tekankan Perdamaian dan Toleransi*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-sambut-kunjungan-grand-syekh-al-azhar-tekankan-perdamaian-dan-toleransi/>
- Laman Resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. (2018, May 18). *Indonesia Serukan OKI Bersatu Bantu Palestina*.
<https://www.wapresri.go.id/indonesia-serukan-ok-i-bersatu-bantu-palestina/>
- Laman Resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. (2024, January 11). *Pertemuan Wapres dengan Wamenlu Arab Saudi, Bahas Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Syariah Hingga Soal Palestina*. <https://www.wapresri.go.id/pertemuan-wapres-dengan-wamenlu-arab-saudi-bahas-kerjasama-ekonomi-dan-keuangan-syariah-hingga-soal-palestina/>
- Ma'mun, A. S. (2012). Diplomasi Publik Dalam Membangun Citra Negara. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 9(2), 60–66.
<https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/119>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2023, November 30). *Peringati Hari Solidaritas Palestina Internasional, HNW Ingatkan Utang PBB untuk Kemerdekaan Palestina*.
<https://www.mpr.go.id/berita/Peringati-Hari-Solidaritas-Palestina-Internasional,-HNW-Ingatkan-Utang-PBB-untuk-Kemerdekaan-Palestina>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2024, April 2). *HNW : Konsitusi Menegaskan Indonesia Bersama dengan Perjuangan Bangsa Palestina*. <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Konsitusi-Menegaskan-Indonesia-Bersama-dengan-Perjuangan-Bangsa-Palestina>
- Masyrofah. (2015). Fakta Perjanjian Damai dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 2(1), 81–102.

- <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2243>
- Masyrofah, & Nahrowi. (2019). Israel's Violations of the International Agreement in Siyasaah Kharijiyyah (Study of Israeli-Palestinian Peace Agreement 1993-2007). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 97–126. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.10890>
- Mathew, W. M. (2011). War-Time Contingency and the Balfour Declaration of 1917: An Improbable Regression. *Journal of Palestine Studies*, 40(2), 26–42. <https://doi.org/10.1525/jps.2011.xl.2.26>
- Mathew, W. M. (2013). The Balfour Declaration and the Palestine Mandate, 1917-1923: British Imperialist Imperatives. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 40(3), 231–250. <https://doi.org/10.1080/13530194.2013.791133>
- Medcom.id. (2024, February 19). *Menlu Retno Tegaskan Isu Palestina Tentang Penjajahan, Bukan Agama!* <https://www.medcom.id/internasional/asean/PNGaAjRk-menlu-retno-tegaskan-isu-palestina-tentang-penjajahan-bukan-agama>
- Melissen, J. (2005). The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Metro TV. (2024, February 18). *Menlu Retno Sampaikan Pernyataan Lisan di ICJ pada 23 Februari*. <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CmVWY-menlu-retno-sampaikan-pernyataan-lisan-di-icj-pada-23-februari>
- Mingst, K. A., & Arreguín-Toft, I. M. (2017). *Essentials of International Relations* (Seventh Ed). W. W. Norton & Company.
- Ministry of Foreign Affairs of Israel. (n.d.-a). *The Gaza-Jericho Agreement between Israel and the PLO (1994)*. Retrieved April 3, 2024, from <https://embassies.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/Gaza-Jericho-Agreement-between-Israel-and-the-PLO.aspx>
- Ministry of Foreign Affairs of Israel. (n.d.-b). *The Peel Commission Plan (1937)*. Retrieved March 26, 2024, from <https://embassies.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/The-Peel-Commission-Plan-1937.aspx>
- Mohd Nor, M. R., & Hamzah, S. Z. (2015). Perjanjian Oslo: Kajian Terhadap Proses Damai Konflik Arab-Israel (Oslo Accord: A Study on Peace Process of Arab-Israel Conflict). *Journal of Al-*

- Tamaddun*, 10(1), 51–69.
<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/8685>
- Mousavi, H. (2019). The Rise and Fall of the Israeli-Palestinian Peace Process. *Journal of World Sociopolitical Studies*, 3(1), 75–107.
<https://doi.org/10.22059/wsps.2019.272092.1077>
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 390–406.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32>
- Muhamad, S. V. (2014). DPR RI Dan Isu Palestina Diplomasi Antar Parlemen. *Kajian*, 19(1), 69–87.
- Muhammadiyah. (2021, May 21). *Dubes RI untuk Lebanon: Masalah Palestina-Israel Bukan Konflik dan Perang, Tapi Penjajahan*.
<https://muhammadiyah.or.id/2021/05/dubes-ri-untuk-lebanon-masalah-palestina-israel-bukan-konflik-dan-perang-tapi-penjajahan/>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH (Badan Penerbit Fakultas Hukum) UNNES.
- Nabila, S. P., Liu, F., Esfandiary, J. K., & Hosnah, A. U. (2024). Konflik Israel – Palestina Dipandang dari Prespektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, 15(1), 175–183.
<https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8908>
- Nasution, I. K. (2010). Rethinking Isratine. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 116–122.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1485622&val=11313&title=Rethinking Isratine](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1485622&val=11313&title=Rethinking%20Isratine)
- National Geographic Indonesia. (2024, April 26). *Seperti Apa Palestina di Bawah Pemerintahan Kekaisaran Ottoman?*
<https://nationalgeographic.grid.id/read/134073328/seperti-apa-palestina-di-bawah-pemerintahan-kekaisaran-ottoman>
- Nicolson, H. (1961). Diplomacy Then and Now. *Foreign Affairs*, 40(1), 39–49. <https://doi.org/10.2307/20029531>
- Nurdyawati, T. T. (2020). Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1), 24–37.
<https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5204>
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal

- Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 15–26.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479>
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs.
- Office of the Historian - U.S. Department of State. (n.d.-a). *Camp David Accords and the Arab-Israeli Peace Process*. Retrieved March 31, 2024, from <https://history.state.gov/milestones/1977-1980/camp-david>
- Office of the Historian - U.S. Department of State. (n.d.-b). *The Madrid Conference, 1991*. Retrieved March 31, 2024, from <https://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference>
- Office of the Historian - U.S. Department of State. (n.d.-c). *The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process*. Retrieved April 1, 2024, from <https://history.state.gov/milestones/1993-2000/oslo>
- Organisation of Islamic Cooperation. (n.d.). *History*. Retrieved July 25, 2024, from <https://new.oic-oci.org/SitePages/CommonPage.aspx?Item=1>
- Jakarta Declaration on Palestine and Al-Quds Al-Sharif, (2016).
<https://new.oic-oci.org/Lists/ConferenceDocuments/Attachments/406/5emis-dec-en.pdf>
- Paat, V. E. (2013). Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/1421>
- Pease, K.-K. S. (2019). *International Organizations: Perspectives on Global Governance* (Sixth Ed.). Routledge.
- Peng, J., & Wegge, N. (2015). China's bilateral diplomacy in the Arctic. *Polar Geography*, 38(3), 233–249.
<https://doi.org/10.1080/1088937X.2015.1086445>
- Permanenet Mission of the Republic of Indonesia to the UN WTO and Other International Organizations in Geneva Switzerland. (2024, February 1). *Kepemimpinan Indonesia di UNCTAD dimanfaatkan untuk dukung Palestina*. <https://kemlu.go.id/jenewa-un/en/news/27905/kepemimpinan-indonesia-di-unctad-dimanfaatkan-untuk-dukung-palestina>
- Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations New York. (2021, May 16). *The Situation in Middle East*,

- including the Palestinian Question*. <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/read/the-situation-in-middle-east-including-the-palestinian-question/4635/etc-menu>
- Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa New York. (2019, October 28). *Indonesia Tegaskan Kembali Komitmen Dukungan kepada Kemerdekaan Palestina pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB*. <https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/2913/indonesia-tegaskan-kembali-komitmen-dukungan-kepada-kemerdekaan-palestina-pada-debat-terbuka-dewan-keamanan-pbb>
- Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa New York. (2020a, August 15). *Indonesia bersama Save The Children bahas nasib anak-anak Palestina di Forum PBB*. <https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/7989/indonesia-bersama-save-the-children-bahas-nasib-anak-anak-palestina-di-forum-pbb#!>
- Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa New York. (2020b, November 29). *Pesan Presiden RI Pada Peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina New York, 29 November 2020*. <https://kemlu.go.id/newyork-un/id/read/pesan-presiden-ri-pada-peringatan-hari-solidaritas-internasional-untuk-rakyat-palestina-new-york-29-november-2020/4204/etc-menu>
- Portal Informasi Indonesia. (2022, October 28). *Indonesia Bebaskan Biaya Masuk Produk Palestina*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6143/indonesia-bebaskan-biaya-masuk-produk-palestina%3Flang%3D1>
- Pujayanti, A. (2012). Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 111–134. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/309>
- Rachmawati, I. (2017). Indonesian Public Diplomacy: Preserving State Existence through Sharing of Identities to Gain Mutual Understanding. *Jurnal Global & Strategis*, 11(1), 55–71. <https://doi.org/10.20473/jgs.11.1.2017.55-71>
- Radio Republik Indonesia. (2023a, November 22). *ini Alasan Palestina Begitu Dekat dengan Indonesia*. <https://www.rri.co.id/internasional/452952/ini-alasan-palestina-begitu-dekat-dengan-indonesia>

- Radio Republik Indonesia. (2023b, December 30). *Pertempuran Hamas-Israel 7 Oktober*.
<https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober>
- Radio Republik Indonesia. (2024a, January 25). *Penjelasan Kemlu Soal Menlu RI “Walk Out” di PBB*.
<https://rri.co.id/internasional/530138/penjelasan-kemlu-soal-menlu-ri-walk-out-di-pbb>
- Radio Republik Indonesia. (2024b, June 3). *Menlu Retno: Indonesia Masih Konsisten Bela Palestina*.
<https://www.rri.co.id/internasional/732865/menlu-retno-indonesia-masih-konsisten-bela-palestina>
- Rana, K. S. (2007). Bilateral Diplomacy. In *The Encyclopedia of Diplomacy*. DiploFoundation.
- Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. (n.d.). *Organization of the Islamic Cooperation (OIC)*. Retrieved July 25, 2024, from <https://www.mfa.gov.tr/OIC.en.mfa>
- Reuters. (2024, June 20). *Israel may have violated laws of war in Gaza, UN rights office says*. <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-may-have-violated-laws-war-gaza-campaign-un-rights-office-says-2024-06-19/>
- Rodriguez, F. (2011). The 1991 Madrid Peace Conference: US Efforts Towards Lasting Peace in the Middle East Between Israel and its Neighbors [University of New Orleans]. In *University of New Orleans Theses and Dissertations*.
<https://scholarworks.uno.edu/td/1343/>
- Rourke, J. T. (2009). *International Politics on the World Stage* (Twelfth Ed). McGraw-Hill.
- Roza, R. (2024). Peningkatan Dukungan Internasional untuk Penghentian Perang di Gaza. In *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* (Vol. 16, Issue 10).
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-10-II-P3DI-Mei-2024-244.pdf
- Rusdiyanta. (2022). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Rajawali Pers.
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 13–28.

- <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.422>
- Said, E. W. (1997). The Real Meaning of the Hebron Agreement. *Journal of Palestine Studies*, 26(3), 31–36.
<https://doi.org/10.2307/2538154>
- Satow, E. M. (1979). *Satow's Guide to Diplomatic Practice* (Lord Gore-Booth & D. Pakenham (eds.); Fifth Ed.). Longman.
- Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Adabiyah*, 16(2), 172–185.
<https://doi.org/10.24252/JAd.v17i116i2a7>
- Satris, R. (2019). Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 161–170.
<https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>
- Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty. (1937). *Palestine Royal Commission Report*.
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peelfull.pdf>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015a, April 21). *Terima PM Rami Hamdallah, Presiden Jokowi Tegaskan Saatnya Penjajahan Di Palestina Diakhiri*. <https://setkab.go.id/terima-pm-rami-hamdallah-presiden-jokowi-tegaskan-saatnya-penjajahan-di-palestina-diakhiri/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015b, April 22). *Pembukaan KAA ke-60, Presiden Jokowi Ajak Negara Asia Afrika Dukung Negara Palestina*. <https://setkab.go.id/pembukaan-kaa-ke-60-presiden-jokowi-ajak-negara-asia-afrika-dukung-negara-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016a, March 6). *Indonesia-Yordania Dorong Persatuan Antar Negara OKI Dukung Palestina*. <https://setkab.go.id/indonesia-yordania-sepakat-jalin-kerja-sama-lawan-terorisme-dan-radikalisme/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016b, March 6). *Presiden Jokowi: Palestina Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-palestina-ucapkan-terima-kasih-atas-dukungan-indonesia/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016c, March 7). *Buka KTT LB OKI, Presiden Jokowi: OKI Harus jadi Bagian Dari Solusi Palestina*. <https://setkab.go.id/buka-ktt-lb-oki-presiden-jokowi-oki-harus-jadi-bagian-dari-solusi-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016d, March 7). *Presiden*

- Jokowi Tunjuk Maha Abou Susheh Jadi Konsul Kehormatan RI untuk Palestina.* <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tunjuk-maha-abou-susheh-jadi-konsul-kehormatan-ri-untuk-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016e, March 7). *RI – Oman Sepakat Dukung Penuh Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina.* <https://setkab.go.id/ri-oman-sepakat-dukung-penuh-perdamaian-dan-kemerdekaan-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016f, March 7). *Terima Menlu Tunisia, Wapres Bahas Palestina dan Sejumlah Isu Bilateral.* <https://setkab.go.id/terima-menlu-tunisia-wapres-bahas-palestina-dan-sejumlah-isu-bilateral/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016g, March 8). *Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Pernyataan Pers Bersama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani usai Penutupan KTT Luar Biasa OKI Ke-5, di JCC, Jakarta, 7 Maret 2016.* <https://setkab.go.id/pernyataan-presiden-joko-widodo-dalam-pernyataan-pers-bersama-dengan-presiden-palestina-mahmoud-abbas-dan-sekjen-oki-iyad-ameen-madani-usai-penutupan-ktt-luar-biasa-oki-ke-5-di-jcc-jakarta-7-maret/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016h, March 30). *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Deklarasi Jakarta.* <https://setkab.go.id/organisasi-kerja-sama-islam-oki-dan-deklarasi-jakarta/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016i, September 8). *Di KTT ASEAN-PBB, Presiden Jokowi Ajak Kerjasama Dukung Kemerdekaan Palestina.* <https://setkab.go.id/di-ktt-asean-pbb-presiden-jokowi-ajak-kerjasama-dukung-kemerdekaan-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017a, August 2). *Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Konkret Selamatkan Palestina.* <https://setkab.go.id/indonesia-desak-oki-ambil-langkah-konkret-selamatkan-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017b, November 14). *Bertemu Presiden Jokowi, Sekjen PBB Apresiasi Peran Indonesia Dalam Krisis di Rakhine State.* <https://setkab.go.id/bertemu-presiden-jokowi-sekjen-pbb-apresiasi-peran-indonesia-dalam-krisis-di-rakhine-state/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017c, December 7). *Kecam Pengakuan AS Untuk Yerusalem, Presiden Jokowi: Indonesia*

- Konsisten Bersama Rakyat Palestina*. <https://setkab.go.id/kecam-pengakuan-as-untuk-yerusalem-presiden-jokowi-indonesia-konsisten-bersama-rakyat-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017d, December 13). *Berbicara di KTT Luar Biasa OKI, Presiden Jokowi Sampaikan Enam Usulan*. <https://setkab.go.id/berbicara-di-ktl-luar-biasa-oki-presiden-jokowi-sampaikan-enam-usulan/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018a, January 27). *Bertemu PM Pakistan, Presiden Jokowi Bahas Ekonomi Hingga Palestina*. <https://setkab.go.id/bertemu-pm-pakistan-presiden-jokowi-bahas-ekonomi-hingga-pakistan/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018b, March 13). *Diundang ke Astana, Presiden Jokowi Ajak Kazakhstan Realisasikan Kemerdekaan Palestina*. <https://setkab.go.id/diundang-ke-astana-presiden-jokowi-ajak-kazakhstan-realisasikan-kemerdekaan-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018c, June 15). *Indonesia Dukung Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina*. <https://setkab.go.id/indonesia-dukung-resolusi-perlindungan-warga-sipil-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018d, October 28). *Kecam Serangan Israel, Presiden Jokowi: Indonesia Selalu di Belakang Bangsa Palestina*. <https://setkab.go.id/kecam-serangan-israel-presiden-jokowi-indonesia-selalu-di-belakang-bangsa-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018e, November 14). *Bertemu PM Australia di Singapura, Presiden Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Soal Palestina*. <https://setkab.go.id/bertemu-pm-australia-di-singapura-presiden-jokowi-tegaskan-sikap-indonesia-soal-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019a, March 27). *Kecam Kekerasan Israel di Palestina, Indonesia Tegaskan Dataran Tinggi Golan Wilayah Suriah*. <https://setkab.go.id/kecam-kekerasan-israel-di-palestina-indonesia-tegaskan-dataran-tinggi-golan-wilayah-suriah/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019b, April 6). *Dalam Forum PBB, Menlu Retno: Percayalah, Indonesia Akan Selalu Bersama Palestina*. <https://setkab.go.id/dalam-forum-pbb-menlu-retno-percayalah-indonesia-akan-selalu-bersama-palestina/>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019c, May 10). *Indonesia Serukan Penghentian Segera Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina*. <https://setkab.go.id/indonesia-serukan-penghentian-segera-pembangunan-pemukiman-ilegal-israel-di-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019d, November 3). *Bertemu Sekjen PBB, Presiden Jokowi Bahas Masalah Rakhine State dan Palestina*. <https://setkab.go.id/bertemu-sekjen-pbb-presiden-jokowi-bahas-masalah-rakhine-state-dan-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020a, April 24). *Indonesia Desak DK PBB Hentikan Israel Aneksasi Wilayah Palestina*. <https://setkab.go.id/indonesia-desak-dk-pbb-hentikan-israel-aneksasi-wilayah-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020b, June 11). *Menlu RI Ajak Negara OKI Bersatu Tolak Aneksasi Palestina oleh Israel*. <https://setkab.go.id/menlu-ri-ajak-negara-ok-bersatu-tolak-aneksasi-palestina-oleh-israel/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020c, June 24). *Pemerintah RI Tingkatkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina di Tahun 2020*. <https://setkab.go.id/pemerintah-ri-tingkatkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-palestina-di-tahun-2020/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, October 24). *Keterangan Pers Bersama usai Pertemuan Bilateral Indonesia – Palestina, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, 24 Oktober 2022*. <https://setkab.go.id/keterangan-pers-bersama-usai-pertemuan-bilateral-indonesia-palestina-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat-24-oktober-2022/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023a, November 11). *Bertolak ke Riyadh, Presiden Jokowi akan Hadiri KTT Luar Biasa OKI Bahas Gaza*. <https://setkab.go.id/bertolak-ke-riyadh-presiden-jokowi-akan-hadiri-ktt-luar-biasa-ok-bahas-gaza/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023b, November 13). *Kuliah Umum Presiden RI di Georgetown University, Washington, D.C., Amerika Serikat, 13 November 2023*. <https://setkab.go.id/kuliah-umum-presiden-ri-di-georgetown-university-washington-d-c-amerika-serikat-13-november-2023/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023c, November 21). *Presiden Jokowi Bahas Upaya MIKTA Ciptakan Perdamaian di Palestina*.

- <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-bahas-upaya-mikta-ciptakan-perdamaian-di-palestina/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, January 25). *Indonesia dan Tanzania Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sejumlah Bidang*. <https://setkab.go.id/indonesia-dan-tanzania-sepakat-perkuat-kerja-sama-di-sejumlah-bidang/>
- Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. (2017, August 6). *Para Menlu ASEAN Sangat Prihatin Atas Kejadian di Kompleks Masjid Al-Aqsa*. <https://setnasasean.id/siaran-pers/read/para-menlu-asean-sangat-prihatin-atas-kejadian-di-kompleks-masjid-al-aqsa>
- Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. (2018, November 15). *Soal Palestina-Israel, Indonesia Tegaskan “Two State Solution” sebagai Solusi Perdamaian*. <https://setnasasean.id/siaran-pers/read/soal-palestina-israel-indonesia-tegaskan-two-state-solution-sebagai-solusi-perdamaian>
- Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. (2020, June 24). *Indonesia Ajak ASEAN Tolak Rencana Aneksasi Palestina oleh Israel*. <https://setnasasean.id/news/read/indonesia-ajak-asean-tolak-rencana-aneksasi-palestina-oleh-israel>
- Shaleh, M. M. (2002). *Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi*. Gema Insani Press.
- Shlaim, A. (1988). *Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine*. Columbia University Press.
- Shlaim, A. (1990). The Rise and Fall of the All-Palestine Government in Gaza. *Journal of Palestine Studies*, 20(1), 37–53. <https://doi.org/10.2307/2537321>
- Silpiah, Karomah, S., Rosanti, S., Mundiroh, S., & Ayuni, S. (2022). The Oslo Agreement in the Peace Process and the Role of the United States in Resolving the Palestinian-Israeli Conflict. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.58355/historical.v1i1.18>
- Snow, N. (2009). Rethinking Public Diplomacy. In N. Snow & P. M. Taylor (Eds.), *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. Routledge.
- Soekarno. (1965). *Dibawah Bendera Revolusi* (Djilid II). Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Soleimani, F. (2020). *The Oslo Agreement: A Study of the Conflict*

- Peace Process Arabic-Israel. *International Journal of Science and Society*, 2(4), 72–83. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i4.193>
- Susilo, I. B. (2016). Realisme. In V. Dugis (Ed.), *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- The Jakarta Post. (2023, November 20). *Israeli tanks reported near Indonesian hospital in Gaza*. <https://www.thejakartapost.com/world/2023/11/20/israeli-tanks-reported-near-indonesian-hospital-in-gaza.html>
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (2021, October 30). *Press release on the 30th anniversary of the Madrid Peace Conference on Arab-Israeli settlement*. https://mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/1784706/
- The United Nations in Indonesia. (n.d.). *Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia*. Retrieved August 1, 2024, from <https://indonesia.un.org/id/about/about-the-un>
- tvOneNews. (2022, October 24). *PM Palestina Tanam Pohon Meranti di Istana Bogor*. <https://www.tvonenews.com/daerah/banten/76784-pm-palestina-tanam-pohon-meranti-di-istana-bogor>
- tvOneNews. (2024, January 16). *Indonesia Serius Soal Kemerdekaan Palestina, Kumpulkan Para Ahli Hukum Internasional Demi Lepas dari Cengkraman Israel*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/181431-indonesia-serius-soal-kemerdekaan-palestina-kumpulkan-para-ahli-hukum-internasional-demi-lepas-dari-cengkraman-israel>
- U.S. Embassy in Israel. (2018, October 2). *The Camp David Accords, 40 years later*. <https://il.usembassy.gov/the-camp-david-accords-40-years-later/>
- United Nations. (n.d.-a). *About Us | United Nations*. Retrieved August 1, 2024, from <https://www.un.org/en/about-us>
- United Nations. (n.d.-b). *History of the United Nations*. Retrieved August 1, 2024, from <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un>
- United Nations Human Rights Council. (n.d.). *Human Rights Council*. Retrieved March 13, 2024, from <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home>
- United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. (2023). *Genocide Convention Fact Sheet*. In *United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to*

- Protect.*
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Genocide_Convention_FactSheet_ENG_2023.pdf
- United Nations Peacemaker. (1994). *Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area (Cairo Agreement)*.
<https://peacemaker.un.org/israelopt-cairoagreement94>
- United States Institute of Peace. (2019, March 25). *Middle East Peace: What can we Learn from Camp David 40 Years Later?*
<https://www.usip.org/publications/2019/03/middle-east-peace-what-can-we-learn-camp-david-40-years-later>
- Wafa News Agency. (2023, November 9). *Israel bombs the vicinity of Gaza's Indonesian Hospital, killing and injuring many civilians*.
<https://english.wafa.ps/Pages/Details/139143>
- Wibowo, H. (2020). Mandat Liga Bangsa-Bangsa : Kegagalan Palestina Menjadi Negara Merdeka (1920-1948). *Buletin Al-Turas*, 20(2), 297–312. <https://doi.org/10.15408/bat.v20i2.3762>
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies*, 2(2), 70–95.
<https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i2.9487>
- Wirajaya, A. C., Nainggolan, M. G., & Aguw, Y. O. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4), 45–52.
<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>
- Yuliantiningsih, A. (2009). Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 110–118. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.219>
- Zainal, A. (2022). Peran Amerika Serikat dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina melalui Perjanjian Camp David dan Oslo. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(2), 121–127.
<https://doi.org/10.31605/lino%20jurnal.v2i2.1646>

Konflik antara Palestina dan Israel berakar pada perebutan wilayah yang dimulai sejak kekalahan Ottoman dan Deklarasi Balfour tahun 1917, yang mendukung pendirian 'rumah nasional' bagi Yahudi di tanah Palestina. Konflik ini menjadi perhatian dunia internasional karena menyangkut hak asasi manusia, penggunaan kekuatan militer, dan perlindungan warga sipil. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung politik luar negeri bebas aktif, menolak hubungan diplomatik dengan Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia konsisten menentang kolonialisme dan mengupayakan dukungan bagi Palestina dalam forum internasional seperti Gerakan Non-Blok dan Konferensi Tingkat Tinggi dunia.

Dalam buku ini, dibahas bagaimana Indonesia menerapkan *soft diplomacy* dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui tiga indikator utama: diplomasi publik, bilateral, dan multilateral. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk bantuan kemanusiaan, pelatihan, dan advokasi di forum global. Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi aktif menyuarakan isu Palestina dalam konferensi internasional, serta mengoordinasikan bantuan nyata, seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada tahun 2016.

Buku ini mengupas strategi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengungkap peran tokoh-tokoh penting dalam upaya tersebut.